



Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

# Modul Belajar Mandiri

---

## CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Bidang Studi

## Sejarah



# **MODUL BELAJAR MANDIRI CALON GURU**

**Aparatur Sipil Negara (ASN)**

**Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**

## **Bidang Studi Sejarah**

Penulis :

**Tim GTK DIKDAS**

Desain Grafis dan Ilustrasi :

**Tim Desain Grafis**

*Copyright* © 2021

Direktorat GTK Pendidikan Dasar

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## **Kata Sambutan**

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Pancasila yang prima. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen utama dalam pendidikan sehingga menjadi fokus perhatian Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam seleksi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Seleksi Guru ASN PPPK dibuka berdasarkan pada Data Pokok Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai satu juta guru (di luar guru PNS yang saat ini mengajar). Pembukaan seleksi untuk menjadi guru ASN PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil bagi guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Pemerintah membuka kesempatan bagi: 1). Guru honorer di sekolah negeri dan swasta (termasuk guru eks-Tenaga Honorer Kategori dua yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya. 2). Guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan; dan Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini tidak mengajar.

Seleksi guru ASN PPPK kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya formasi untuk guru ASN PPPK terbatas. Sedangkan pada tahun 2021 semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi. Semua yang lulus seleksi akan menjadi guru ASN PPPK hingga batas satu juta guru. Oleh karenanya agar pemerintah bisa mencapai target satu juta guru, maka pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan.

Untuk mempersiapkan calon guru ASN PPPK siap dalam melaksanakan seleksi guru ASN PPPK, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mempersiapkan modul-modul pembelajaran setiap bidang studi yang digunakan sebagai bahan belajar mandiri, pemanfaatan komunitas pembelajaran menjadi hal yang sangat

penting dalam belajar antara calon guru ASN PPPK secara mandiri. Modul akan disajikan dalam konsep pembelajaran mandiri menyajikan pembelajaran yang berfungsi sebagai bahan belajar untuk mengingatkan kembali substansi materi pada setiap bidang studi, modul yang dikembangkan bukanlah modul utama yang menjadi dasar atau satu-satunya sumber belajar dalam pelaksanaan seleksi calon guru ASN PPPK tetapi dapat dikombinasikan dengan sumber belajar lainnya. Peran Kemendikbud melalui Ditjen GTK dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan guru ASN PPPK melalui pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas peserta didik adalah menyiapkan modul belajar mandiri.

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar (Direktorat GTK Dikdas) bekerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan modul belajar mandiri bagi calon guru ASN PPPK. Adapun modul belajar mandiri yang dikembangkan tersebut adalah modul yang di tulis oleh penulis dengan menggabungkan hasil kurasi dari modul Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), dan bahan lainnya yang relevan. Dengan modul ini diharapkan calon guru ASN PPPK memiliki salah satu sumber dari banyaknya sumber yang tersedia dalam mempersiapkan seleksi Guru ASN PPPK.

Mari kita tingkatkan terus kemampuan dan profesionalisme dalam mewujudkan pelajar Pancasila.

Jakarta, Februari 2021

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga  
Kependidikan,



Iwan Syahril

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) untuk 25 Bidang Studi (berjumlah 39 Modul). Modul ini merupakan salah satu bahan belajar mandiri yang dapat digunakan oleh calon guru ASN PPPK dan bukan bahan belajar yang utama.

Seleksi Guru ASN PPPK adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten dan profesional yang memiliki peran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar peserta didik. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter Pancasila yang prima.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung keberhasilan seleksi guru ASN PPPK, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar pada tahun 2021 mengembangkan dan mengkurasi modul Pendidikan Profesi Guru (PPG), Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP), dan bahan lainnya yang relevan sebagai salah satu bahan belajar mandiri.

Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bacaan (bukan bacaan utama) untuk dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi pedagogik dan profesional sesuai dengan bidang studinya masing-masing.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada pimpinan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) yang telah mengizinkan stafnya dalam menyelesaikan Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK. Tidak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada para widyaiswara dan Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) di dalam penyusunan modul ini.

## Modul Belajar Mandiri

Semoga Modul Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK dapat memberikan dan mengingatkan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing.

Jakarta, Februari 2021

Direktur Guru dan Tenaga  
Kependidikan Pendidikan Dasar,



Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M. A  
NIP. 196805211995121002

## Daftar Isi

<b>Kata Sambutan.....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>viii</b>
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
Deskripsi Singkat.....	1
Peta Kompetensi .....	2
Ruang Lingkup .....	5
Petunjuk Belajar .....	6
<b>Pembelajaran 1. Sejarah dan Peradaban Awal Manusia .....</b>	<b>7</b>
A. Kompetensi .....	7
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	7
C. Uraian Materi.....	7
1. Pengertian Sejarah.....	7
2. Konsep Pembangun Ilmu Sejarah .....	9
3. Ruang Lingkup Sejarah .....	11
4. Penelitian Sejarah .....	16
5. Manusia Pra Aksara di Indonesia .....	23
6. Corak Kehidupan dan Hasil Kebudayaan Masyarakat Pra Aksara.....	40
7. Budaya Pra Aksara yang Masih Ada Hingga Saat Ini .....	50
D. Rangkuman.....	51
<b>Pembelajaran 2. Peradaban Hindu Budha dan Islam .....</b>	<b>53</b>
A. Kompetensi .....	53
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	53
C. Uraian Materi.....	53

1. Teori Masuknya Agama Hindu-Budha ke Indonesia .....	53
2. Perkembangan Awal Pengaruh Hindu-Budha di Indonesia.....	54
3. Kerajaan Bercorak Hindu-Buddha di Indonesia .....	55
4. Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia.....	71
5. Faktor-Faktor yang Memudahkan Islam Berkembang di Indonesia.....	77
6. Bukti-Bukti Masuknya Pengaruh Islam di Indonesia.....	78
7. Kerajaan-kerajaan Islam Awal di Indonesia .....	79
D. Rangkuman .....	87

### **Pembelajaran 3. Kolonialisme Bangsa Eropa dan Pergerakan Nasional**

<b>Indonesia.....</b>	<b>89</b>
A. Kompetensi .....	89
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	89
C. Uraian Materi.....	89
1. Kolonialisme dan Imperialisme .....	89
2. Latar Belakang Penjajahan Bangsa Eropa di Indonesia .....	91
3. Indonesia Masa Portugis, Spanyol, dan VOC .....	93
4. Indonesia masa Penjajahan Inggris dan Belanda .....	97
5. Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Pemerintah Kolonial.....	102
6. Masa Pergerakan Nasional Indonesia .....	103
D. Rangkuman .....	109

### **Pembelajaran 4. Pendudukan Jepang, Proklamasi, dan Perjuangan**

<b>Mempertahankan Kemerdekaan .....</b>	<b>110</b>
A. Kompetensi .....	110
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	110
C. Uraian Materi.....	111
1. Pemerintah Militer Jepang di Indonesia .....	111
2. Kondisi Sosial Masyarakat dan Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia.....	116
3. Persiapan dan Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan.....	123

D. Rangkuman.....	141
<b>Pembelajaran 5. Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi</b>	
<b>Terpimpin .....</b>	<b>143</b>
A. Kompetensi .....	143
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	143
C. Uraian Materi.....	144
1. Kembali ke NKRI .....	144
2. Indonesia Masa Demokrasi Liberal.....	149
3. Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin.....	157
4. Ancaman Disintegrasi Bangsa dan Usaha Penyelesaiannya .....	161
D. Rangkuman.....	168
<b>Pembelajaran 6. Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi .....</b>	<b>169</b>
A. Kompetensi .....	169
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	169
C. Uraian Materi.....	169
1. Kondisi Politik dan Pemerintahan Orde Baru .....	169
2. Pemerintahan Masa Reformasi .....	176
D. Rangkuman.....	181
<b>Penutup .....</b>	<b>182</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>184</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>189</b>

## Daftar Gambar

	Hlm.
Gambar 1. Alur Pembelajaran Bahan Belajar Mandiri .....	6
Gambar 2 Infografis Lapisan Tanah Sangiran.....	24
Gambar 3 Ilustrasi Manusia Meganthropus.....	29
Gambar 4 Manusia Pithecanthropus.....	30
Gambar 5 Tengkorak Pithecanthropus .....	30
Gambar 6 Tengkorak Homo Wajakensis.....	33
Gambar 7. Kjekkenmoddinger .....	44
Gambar 8 Gambar Lukisan Tangan.....	44
Gambar 9 Gambar Lukisan Tangan di Gua .....	44
Gambar 10 Kapak Persegi Masa Neolitikum.....	47
Gambar 11 Peta Penyebaran Islam Abad XIII-XVIII.....	75
Gambar 12 Rute Kedatangan Bangsa Barat di Nusantara .....	93
Gambar 13 Struktur Masyarakat Masa Pendudukan Jepang di Indonesia .....	118

## Daftar Tabel

Tabel 1 Target Kompetensi Guru PPPK .....	2
Tabel 2 Peta Kompetensi Bahan Belajar Mata Pelajaran Sejarah Indonesia .....	2

## **Pendahuluan**

### **Deskripsi Singkat**

Dalam rangka memudahkan guru mempelajari bahan belajar mandiri calon guru P3K, di dalam bahan belajar ini dimuat pada model kompetensi terkait yang memuat target kompetensi guru dan indikator pencapaian kompetensi.

Bahan belajar mandiri bidang studi Sejarah Indonesia berisi pembelajaran - pembelajaran bagi calon guru P3K yang yang terdiri dari,

- Pembelajaran 1. Sejarah dan Peradaban Awal Manusia
- Pembelajaran 2. Peradaban Hindu, Budha, dan Islam
- Pembelajaran 3. Kolonialisme Bangsa Eropa dan Pergerakan Nasional Indonesia
- Pembelajaran 4. Pendudukan Jepang, Proklamasi, dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan
- Pembelajaran 5. Indonesia dan Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin
- Pembelajaran 6. Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi

Bahan belajar mandiri ini memberikan pengamalan belajar bagi calon guru P3K dalam memahami teori dan konsep dari pembelajaran dari setiap materi dan substansi materi yang disajikan.

Komponen-komponen di dalam bahan belajar mandiri ini dikembangkan dengan tujuan agar calon guru P3K dapat dengan mudah memahami teori dan konsep bidang studi Sejarah Indonesia, sekaligus mendorong guru untuk mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Bahan belajar mandiri calon guru P3K diberikan latihan-lathan soal dan kasus beserta pembelahasan yang bertujuan memberikan pengalaman dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan calon guru P3K.

Rangkuman pembelajaran selalu diberikan di setiap akhir pembelajaran yang berfungsi untuk memudahkan dalam membaca substansi materi esensial, mudah dalam mengingat pembelajaran dan materi-materi esensial, mudah dalam

memahami pembelajaran dan materi-materi esensial, dan cepat dalam mengingat kembali pembelajaran dan materi-materi esensial

## Peta Kompetensi

Bahan belajar mandiri ini dikembangkan berdasarkan model kompetensi guru. Kompetensi tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator. Target kompetensi menjadi patokan penguasaan kompetensi oleh guru P3K.

Kategori Penguasaan Pengetahuan Profesional yang terdapat pada dokumen model kompetensi yang akan dicapai oleh guru P3K ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Target Kompetensi Guru PPPK

KOMPETENSI	INDIKATOR
Menganalisis struktur & alur pengetahuan untuk pembelajaran	1.1.1 Menganalisis struktur & alur pengetahuan untuk pembelajaran
	1.1.2 Menganalisis prasyarat untuk menguasai konsep dari suatu disiplin ilmu
	1.1.3. Menjelaskan keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain

Untuk menerjemahkan model kompetensi guru, maka dijabarkanlah target kompetensi guru bidang studi yang terangkum dalam pembelajaran-pembelajaran dan disajikan dalam bahan belajar mandiri bidang studi Sejarah Indonesia. Kompetensi guru bidang studi Sejarah Indonesia dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Peta Kompetensi Bahan Belajar Mata Pelajaran Sejarah Indonesia

KOMPETENSI GURU	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Pembelajaran 1. Sejarah dan Peradaban Awal Manusia	

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis konsep dasar sejarah</li> <li>2. Menganalisis penelitian sejarah</li> <li>3. Menganalisis manusia praaksara di Indonesia.</li> <li>4. Menganalisis corak kehidupan dan hasil kebudayaan manusia praaksara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Menjelaskan pengertian sejarah</li> <li>1.2 Menganalisis konsep pembangun ilmu sejarah</li> <li>1.3 Menganalisis ruang lingkup sejarah</li> <li>2.1 Menganalisis sumber sejarah</li> <li>2.2 Menganalisis tahap-tahap penelitian sejarah</li> <li>3.1 Menganalisis lokasi-lokasi penemuan dan jenis-jenis manusia praaksara di Indonesia</li> <li>3.2 Menganalisis kronologis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia</li> <li>4.1 Menganalisis corak kehidupan manusia praaksara di Indonesia</li> <li>4.2 Menganalisis hasil budaya manusia praaksara di Indonesia.</li> </ol>
<b>Pembelajaran 2. Peradaban Hindu, Budha, dan Islam</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis peradaban Hindu-Buddha di Indonesia</li> <li>2. Menganalisis peradaban Islam di Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Menganalisis Teori Masuknya Agama Hindu-Buddha ke Indonesia</li> <li>1.2. Menganalisis Perkembangan Awal Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia</li> <li>1.3. Menganalisis Kerajaan-kerajaan Bercorak Hindu-Buddha di Indonesia</li> <li>2.1 Menganalisis Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia</li> <li>2.2 Menganalisis Faktor-faktor yang memudahkan Islam berkembang di Indonesia</li> <li>2.3 Menganalisis Bukti-bukti Masuknya Pengaruh Islam di Indonesia</li> <li>2.4 Menganalisis Kerajaan Islam Awal di Indonesia</li> </ol>
<b>Pembelajaran 3. Kolonialisme Bangsa Eropa dan Pergerakan Nasional Indonesia</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis kolonialisme bangsa Eropa</li> <li>2. Menganalisis Pergerakan Nasional Indonesia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Menjelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme</li> <li>1.2 Menganalisis latar belakang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia</li> <li>1.3 Menganalisis Indonesia Masa Portugis, Spanyol, dan VOC</li> <li>1.4 Menganalisis Indonesia masa Penjajahan Inggris dan Belanda</li> <li>1.5 Menganalisis Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Pemerintah Kolonial</li> <li>2.1 Menganalisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia</li> </ol>
<b>Pembelajaran 4. Pendudukan Jepang, Proklamasi, dan Perjuangan mempertahankan Kemerdekaan</b>	

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis pelaksanaan pemerintahan militer Jepang di Indonesia</li> <li>2. Menganalisis kondisi sosial masyarakat dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia</li> <li>3. Menganalisis persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.</li> <li>4. Menganalisis perang dan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Menjelaskan latar belakang pemerintahan militer Jepang di Indonesia.</li> <li>1.2 Menganalisis strategi pergerakan nasional pada masa Pemerintahan Militer Jepang.</li> <li>1.3 Menganalisis aspek perubahan-perubahan akibat pemerintahan militer Jepang             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat dan dampak pada Pendudukan Jepang di Indonesia.</li> <li>3.1 Menjelaskan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia.</li> <li>3.2 Mengidentifikasi perbedaan pendapat antar kelompok menjelang proklamasi kemerdekaan RI</li> <li>3.3 Menganalisis pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.</li> <li>4.1 Mengidentifikasi perjuangan fisik dan konfrontasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI.</li> <li>4.2 Mengidentifikasi perjuangan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI.</li> <li>4.3 Menganalisis pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Pengakuan Kedaulatan</li> </ol> </li> </ol>
<b>Pembelajaran 5. Indonesia dan Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan proses kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.</li> <li>2. Menganalisis berbagai dimensi saat Indonesia masa Demokrasi Liberal.</li> <li>3. Menganalisis berbagai dimensi saat Indonesia masa Demokrasi Terpimpin.</li> <li>4. Menganalisis berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan usaha penyelesaiannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Menjelaskan hakekat adanya Konferensi Meja Bundar (KMB).</li> <li>1.2 Menganalisis munculnya Republik Indonesia Serikat (RIS)</li> <li>1.3 Menganalisis proses kembalinya ke Republik Indonesia.             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Menganalisis sistem pemerintahan parlementer masa Demokrasi Liberal</li> <li>2.2 Menganalisis kehidupan politik era Demokrasi Liberal</li> <li>2.3 Menganalisis kehidupan ekonomi era Demokrasi Liberal</li> <li>2.4 Menganalisis akhir dari Demokrasi Liberal di Indonesia.                 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Menganalisis permasalahan yang terjadi pada Konstituante dan munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.</li> <li>3.2 Menganalisis kebijakan masa Demokrasi Terpimpin.</li> <li>3.3 Menganalisis permasalahan pembebasan Irian Barat pada masa Demokrasi Terpimpin.</li> <li>3.4 Menganalisis permasalahan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada masa Demokrasi Terpimpin.</li> </ol> </li> <li>4.1 Menjelaskan peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun.</li> <li>4.2 Menjelaskan peristiwa Pemberontakan DI/TII.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>4.3 Menjelaskan peristiwa Pemberontakan APRA.</p> <p>4.4 Menjelaskan peristiwa Pemberontakan Andi Azis</p> <p>4.5 Menjelaskan peristiwa Pemberontakan RMS</p> <p>4.6 Menjelaskan peristiwa Pemberontakan PRRI-Permesta.</p> <p>4.7 Menjelaskan peristiwa Pemberontakan G30S/PKI</p>
<b>Pembelajaran 6. Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi</b>	
<p>1. Menjelaskan kondisi politik dan pemerintahan Orde Baru</p> <p>2. Menganalisis pemerintahan Masa Reformasi</p>	<p>1.1 Menjelaskan lahirnya pemerintahan Orde Baru</p> <p>1.2 Mengidentifikasi karakter pemerintahan Orde Baru</p> <p>1.3 Mengidentifikasi kehidupan politik dan pemerintahan pada Masa Orde Baru.</p> <p>1.4 Menganalisis proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru</p> <p>2.1 Mengidentifikasi sistem pemerintahan Era Reformasi.</p> <p>2.2 Menganalisis masa pemerintahan BJ Habbibie sampai pemerintahan Joko Widodo.</p>

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada bahan belajar mandiri calon guru P3K ini disusun dalam dua bagian besar, bagian pertama adalah pendahuluan dan bagian berikutnya adalah pembelajaran – pembelajaran.

Bagian Pendahuluan berisi deskripsi singkat, Peta Kompetensi yang diharapkan dicapai setelah pembelajaran, Ruang Lingkup, dan Petunjuk Belajar. Bagian Pembelajaran terdiri dari lima bagian, yaitu bagian Kompetensi, Indikator Pencapaian Kompetensi, Uraian Materi, Latihan Soal/Kasus, dan Rangkuman. Latihan/Kasus akan diberikan kunci dan pembahasan di bagian lampiran bahan belajar mandiri. Bahan belajar mandiri diakhiri dengan Penutup, Daftar Pustaka, dan Lampiran.

Rincian materi pada bahan belajar mandiri bagi calon guru P3K adalah substansi materi esensial dalam bidang studi Sejarah Indonesia terkait sejarah dan peradaban awal manusia, peradaban Hindu, Budha, dan Islam, Kolonialisme Bangsa Barat, Pendudukan Jepang, Proklamasi, dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan, Indonesia dan masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi.

## Petunjuk Belajar

Secara umum, cara penggunaan bahan belajar mandiri bagi calon guru P3K pada setiap Pembelajaran disesuaikan dengan skenario setiap penyajian substansi materi bidang studi. Bahan belajar mandiri ini dapat digunakan dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru bidang studi, baik melalui untuk moda mandiri, maupun moda daring yang menggunakan konsep pembelajaran Bersama dalam komunitas pembelajaran secara daring.



Gambar 1. Alur Pembelajaran Bahan Belajar Mandiri

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa akses ke bahan belajar mandiri dapat melalui SIMPB, dimana bahan belajar mandiri akan didapat secara mudah dan dipelajari secara mandiri oleh calon Guru P3K. Bahan belajar mandiri dapat di unduh dan dipelajari secara mandiri, system LMS akan memberikan perangkat ajar lainnya dan latihan-latihan soal yang dimungkinkan para guru untuk berlatih.

Sistem dikembangkan secara sederhana, mudah, dan ringan sehingga *user friendly* dengan memanfaatkan komunitas pembelajaran secara daring, Segala permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran mandiri dapat di selesaikan dalam komunitas, karena konsep dari bahan belajar ini tidak ada pendampingan Narasumber / Instruktur / Fasilitator sehingga komunitas pembelajaran menjadi hal yang sangat membantu guru.

## **Pembelajaran 1. Sejarah dan Peradaban Awal Manusia**

### **A. Kompetensi**

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 1. Sejarah dan Peradaban Awal Manusia yang akan dicapai pada pembelajaran ini, adalah guru P3K mampu;

1. Menganalisis konsep dasar sejarah
2. Menganalisis penelitian sejarah
3. Menganalisis manusia praaksara di Indonesia.
4. Menganalisis corak kehidupan dan hasil kebudayaan manusia praaksara.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 1. Sejarah dan Peradaban Awal manusia adalah sebagai berikut;

1. Menjelaskan pengertian sejarah
2. Menganalisis konsep pembangun ilmu sejarah
3. Menganalisis ruang lingkup sejarah
4. Menganalisis manusia praaksara di Indonesia

### **C. Uraian Materi**

#### **1. Pengertian Sejarah**

Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa sejarah dapat dibagi menjadi dua pengertian yakni: Pertama, sejarah dalam arti subjektif yaitu suatu konstruksi, ialah bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita yang mencakup rangkaian fakta-fakta untuk menggambarkan gejala sejarah, baik proses maupun struktur. Kedua, sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau

peristiwa yaitu sejarah dalam aktualisasinya. Kejadian tersebut hanya terjadi sekali dan tidak terulang kembali (Kartodirdjo, 1992: 31).

Kata sejarah diambil dari bahasa Arab “*syajaratun*” yang artinya pohon atau keturunan atau asal usul yang kemudian berkembang sebagai kata dalam bahasa Melayu “*syajarah*”, akhirnya menjadi kata sejarah dalam bahasa Indonesia (Frederick dan Soeri Soeroto, 1982: 1). Jadi kata pohon di sini mengandung pengertian suatu percabangan geneologis dari suatu kelompok keluarga tertentu yang kalau dibuat bagannya menyerupai profil pohon yang ke atas penuh dengan cabang serta ranting-rantingnya serta ke bawah juga menggambarkan percabangan dari akar-akarnya. Pohon sebagai simbol kehidupan yang menunjukkan adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan. Cabang, ranting, akar, buah, dan daun memiliki hubungan yang saling terkait.

Dengan demikian kata *syajarah* itu mula-mula dimaksudkan sebagai gambaran silsilah/ keturunan (Widja, 1988: 6). Memang kalau kita perhatikan historiografi tradisional kebanyakan intinya memuat asal usul keturunan (silsilah). Kata-kata seperti kisah, hikayat, tambo, riwayat, tarikh adalah istilah yang sering dipakai untuk gambaran asal-usul tersebut. Dalam bahasa Jawa dikenal babad, kidung, pamancangah adalah juga mengandung di dalamnya unsur silsilah, meskipun sering dirangkai juga dengan gambaran kejadian/peristiwa.

Di negeri Barat dikenal istilah dalam bahasa Inggris “*history*”. Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani kuno “*istoria*” yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya (Widja, 1988: 7). Kalau pengertian ini diluaskan artinya, hakikatnya sudah mengacu pada pengertian ilmu. Pada mulanya belum kelihatan adanya usaha membatasi pengertian pada gejala yang menyangkut kehidupan manusia saja, tapi mencakup gejala alam secara keseluruhan. Dalam perkembangan kemudian baru kelihatan munculnya dua istilah yaitu *scientia* yang lebih mengkhususkan pada penelaahan sistematis yang sifatnya *non kronologis* atas gejala alam, sedangkan kata *istoria* lebih dikhususkan bagi penelaahan kronologis atas gejala-gejala yang menyangkut kehidupan manusia.

Dengan demikian terdapat perbedaan makna antara kata *sejarah* dan *history*. Pada istilah *sejarah* (yang tradisional) terkandung usaha mengabadikan/menjunjung kebesaran penguasa atau cikal bakal kelompok orang

dengan menekankan terutama unsur asal usul keturunan serta peristiwa yang menyangkut tokoh-tokoh tersebut dan biasanya diuraikan secara magis-religius. Sedangkan pada istilah *history*, tekanan pengertian diletakkan pada usaha untuk mengetahui apa yang telah terjadi sebelum kehidupan kita, atau keinginan untuk mengetahui perjalanan waktu (Widja, 1988: 7). Dalam hubungan ini terlihat di Barat pengertian *history* dari semula sudah menunjuk pada unsur-unsur keilmuan.

## **2. Konsep Pembangun Ilmu Sejarah**

### **a. Manusia dan Sejarah**

Sejarah adalah ilmu tentang aktivitas manusia yang terjadi pada masa lampau. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Manusia menjadi penggerak sejarah dalam rangka mewujudkan perubahan dan kemajuan yang dicita-citakan. Peran manusia dalam sejarah layaknya pemeran utama dalam drama.

Akan tetapi, manusia bukan monopoli kajian sejarah. Ilmu-ilmu lain, seperti Sosiologi, Antropologi, Politik, Kedokteran, dan sebagainya, juga mengkaji tentang manusia. Perbedaannya terletak pada titik perhatian masing-masing ilmu. Sejarah mengkaji aktivitas manusia di segala bidang dalam perspektif waktu. Akan tetapi, sejarah juga bukan kisah manusia pada masa lampau secara keseluruhan. Manusia yang sudah memfosil menjadi objek kajian Antropologi Ragawi. Demikian juga benda-benda, meskipun sebagai hasil karya manusia, tetapi menjadi bidang kajian Arkeologi.

### **b. Waktu/temporal**

Mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain.

Menurut Kuntowijoyo (1995), dalam waktu terjadi empat hal, yaitu (1) perkembangan, (2) kesinambungan, (3) pengulangan, (4) perubahan. Konsep waktu terbagi menjadi tiga, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dalam sejarah, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lalu. Akan tetapi, konsep waktu pada masa lalu ini juga mempengaruhi peristiwa pada masa sekarang.

### **c. Ruang/spasial**

Ruang adalah konsep yang paling melekat dengan waktu. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa – peristiwa sejarah dalam perjalanan waktu. Konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah menyebabkan adanya pembagian sejarah. Jika mempelajari sejarah menggunakan konsep ruang, kita akan dapat menganalisis dan membandingkan pola kehidupan di suatu daerah, termasuk pola pikir dan pola perilaku masyarakat setempat.

#### d. Peristiwa

Sejarawan terutama tertarik pada peristiwa-peristiwa yang mempunyai arti istimewa. Untuk itu, Reiner (1997:99) membedakan apa yang disebut *occurrence* dengan *event*. *Occurrence* menunjuk pada peristiwa biasa, sedangkan *event* merupakan peristiwa istimewa. Ada pula yang menggunakan istilah kejadian “*non historis*” untuk peristiwa biasa, dan kejadian “*historis*” untuk peristiwa istimewa (Widja, 1988: 18).

Secara pemahaman konvensional, peristiwa yang dikategorikan sejarah memuat hal objektif, unik, dan penting. Namun dalam perkembangan sejarah modern, muncul hal sejarah tematik yang sesuai dengan tema-tema tertentu.

#### e. Kausalitas/Sebab-Akibat

Apabila pengungkapan sejarah bersifat *deskriptif*, maka fakta-fakta yang perlu diungkapkan terutama bersangkutan dengan *apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana*. Dengan mengetahui data deskriptif itu sebagian besar dari keingintahuan terhadap peristiwa sejarah tertentu terpenuhi. Dalam jawaban terhadap bagaimananya peristiwa itu, pada umumnya telah tercakup beberapa keterangan tentang sebab-sebabnya (sebab umum dan sebab khusus), meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, hanya secara implisit saja. Seringkali pembaca sudah puas dengan uraian mengenai bagaimananya itu.

Apabila pertanyaan-pertanyaan di atas masih disusul dengan pertanyaan mengapa, maka timbul tuntutan untuk secara eksplisit memberikan uraian tentang sebab-sebab atau kausalitas peristiwa itu.

#### f. Tidak berulang / Terjadi hanya sekali

Sejarah bersifat tidak berulang (*einmalig*). Kalau terdapat dua peristiwa atau lebih yang mempunyai kesamaan, bukan berarti sejarah berulang. Hal ini hanya sebuah kemiripan, karena unsur-unsur yang melekat dalam masing-masing peristiwa (waktu, pelaku, tempat, kausalitas) berbeda.

### 3. Ruang Lingkup Sejarah

#### 1) Sejarah Sebagai Ilmu

Definisi sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa persyaratan utama, yaitu obyek, tujuan, metode, kegunaan, sistematika, kebenaran, generalisasi dan prediksi.

##### a. Obyek

Objek sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau. Sejarah merupakan ilmu empiris. Sejarah seperti ilmu-ilmu lain yang mengkaji manusia, bedanya sejarah mengkaji aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Aspek waktu inilah yang menjadi jiwa sejarah. Selanjutnya objek sejarah dibedakan menjadi dua, yakni objek formal dan objek material. Objek formal sejarah adalah keseluruhan aktivitas masa silam umat manusia. Objek material berupa sumber-sumber sejarah yang merupakan bukti adanya peristiwa pada masa lampau (Zed, 2002: 48). Bukti-bukti itu merupakan kesaksian sejarah yang bisa dilihat. Tegasnya, rekonstruksi sejarah hanya mungkin kalau memiliki bukti-bukti berupa dokumen atau jenis peninggalan lainnya.

##### b. Tujuan

Menurut Sutrasno (1975: 22) sejarah bertujuan sebagai berikut; 1) Memberikan kenyataan-kenyataan sejarah yang sesungguhnya, menceriterakan segala yang terjadi apa adanya, 2) Membimbing, mengajar, dan mengupas setiap kejadian sejarah secara kritis dan realistis. Makin objektif (makin dekat kepada kenyataan sejarah yang sesungguhnya) makin baik, karena dengan demikian pembaca akan mendapat gambaran sesungguhnya tentang apa yang benar-benar terjadi.

##### c. Metode

Metode ini berfungsi mencari kebenaran peristiwa masa lampau.

Metode sejarah bertumpu pada empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. metode sejarah bersifat universal, artinya metode sejarah dapat dimanfaatkan oleh ilmu-ilmu lain untuk keperluan memastikan fakta pada masa lampau. Dengan semakin mendekatnya ilmu-ilmu sosial dan ilmu sejarah, maka semakin terlihat pemanfaatan metode sejarah dalam ilmu-ilmu sosial. Di samping itu, dalam sejarah terdapat metode sejarah lisan, *kwantohistori* yang dekat dengan statistik, psikohistori, dan sebagainya.

### d. Kegunaan

Menurut Widja (1988: 49-51) sejarah paling tidak mempunyai empat kegunaan, yaitu edukatif, inspiratif, rekreatif, dan instruktif.

- 1) Guna edukatif adalah sejarah memberikan kearifan dan kebijaksanaan bagi orang yang mempelajarinya. Menyadari guna edukatif dari sejarah berarti menyadari makna dari sejarah sebagai masa lampau yang penuh arti. Selanjutnya berarti bahwa kita bisa mengambil dari sejarah nilai-nilai berupa ide-ide maupun konsep-konsep kreatif sebagai sumber motivasi bagi pemecahan masalah-masalah masa kini dan selanjutnya untuk merealisasikan harapan-harapan di masa akan datang.
- 2) Guna inspiratif terutama berfungsi bagi usaha menumbuhkan harga diri dan identitas sebagai suatu bangsa. Guna sejarah semacam ini sangat berarti dalam rangka pembentukan nation building. Di negara-negara yang sedang berkembang guna inspiratif sejarah menjadi bagian yang sangat penting, terutama dalam upaya menumbuhkan kebanggaan kolektif.
- 3) Guna rekreatif menunjuk kepada nilai estetis dari sejarah, terutama kisah yang runtut tentang tokoh dan peristiwa. Di samping itu, sejarah memberikan kepuasan dalam bentuk "pesona perlawatan". Dengan membaca sejarah seseorang bisa menerobos batas waktu dan tempat menuju zaman lampau dan tempat yang jauh untuk mengikuti berbagai peristiwa di dunia ini.
- 4) Guna instruktif adalah fungsi sejarah dalam menunjang bidang-bidang studi kejuruan/ketrampilan seperti navigasi, teknologi senjata, jurnalistik, taktik militer, dan sebagainya.

Kuntowijoyo (1995: 19-35) membedakan guna sejarah menjadi guna ekstrinsik dan guna intrinsik. Guna intrinsik sejarah meliputi, (1) sejarah sebagai ilmu, (2) sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, (3) sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan (4) sejarah sebagai profesi. Guna ekstrinsik merupakan manfaat sejarah terutama di bidang pendidikan. Sejarah mempunyai fungsi pendidikan, yaitu sebagai pendidikan (1) moral, (2) penalaran, (3) politik, (4) kebijakan, (5) perubahan, (6) masa depan, (7) keindahan, (8) ilmu bantu. Dalam guna ekstrinsik selain pendidikan, sejarah juga berfungsi sebagai (1) latar belakang, (2) rujukan, dan (3) bukti.

### e. Sistematika

Bentuk sistematika dalam sejarah berupa periodisasi dan percabangan dalam ilmu sejarah. Periodisasi adalah pemenggalan waktu dalam periode-periode dengan menggunakan kriteria tertentu. Secara garis besar materi sejarah dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok teori sejarah dan kelompok kajian sejarah. Kelompok teori sejarah, seperti Pengantar Ilmu Sejarah, Filsafat Sejarah, Metodologi dan Historiografi. Kelompok kajian sejarah masih terbagi lagi dalam sejarah dunia, sejarah Indonesia dan sejarah tematis. Masing-masing masih terpecah dalam cabang-cabang lagi, seperti sejarah tematis terdiri atas sejarah ekonomi, sejarah politik, sejarah maritim, dan sebagainya.

f. Kebenaran

Sedikitnya ada dua teori kebenaran yang biasanya bisa dikaitkan dengan usaha pengujian kebenaran fakta, yaitu kebenaran korespondensi dan kebenaran koherensi. Kebenaran korespondensi menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar apabila sama dengan realitasnya. Apa yang disebut realitas dalam konteks sejarah adalah kenyataan yang benar-benar telah terjadi, suatu kenyataan seperti apa adanya yang tidak tergantung pada orang yang menyelidikinya. Sedangkan kebenaran koherensi menyatakan bahwa sesuatu itu (suatu pernyataan) benar jika cocok dengan pernyataan-pernyataan lain yang pernah diucapkan/dinyatakan dan kita terima kebenarannya. Jadi, kebenaran itu tidak dicari dalam hubungan pernyataan dengan realitas, tapi antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya.

Oleh karena sejarah terjadi satu kali, pada masa lampau, dan tidak bisa diulang, maka dari dua teori kebenaran itu, teori kebenaran koherensi yang tepat bagi sejarah.

Meskipun kebenaran sejarah juga terkait dengan hasil interpretasi para sejarawan yang sudah mengadakan tahap-tahap dalam penelitian.

g. Generalisasi

Generalisasi atau kebenaran-kebenaran yang bersifat umum sering terabaikan dalam kajian sejarah. Sejarawan biasanya tidak menjadikan generalisasi sebagai tujuan utamanya. Sejarawan lebih memusatkan perhatian pada usaha menerangkan, untuk kemudian mengartikan jalan yang sebenarnya dari peristiwa-peristiwa khusus, yaitu kejadian-kejadian dalam dimensi waktu, ruang, dan kondisi-kondisi tertentu (Widja, 1988: 3).

Akan tetapi, banyak juga sejarawan yang membicarakan sifat-sifat umum, di samping juga kekhususan, dari masing-masing revolusi, seperti revolusi Perancis, revolusi Amerika, revolusi Indonesia, dan sebagainya. Demikian juga Kartodirdjo (1984) telah berhasil memberikan generalisasi tentang gerakan-gerakan protes di Jawa.

### h. Prediksi

Prediksi dapat diartikan sebagai berlakunya hukum dikemudian hari. Hukum sejarah adalah keteraturan yang dapat diserap pada sejumlah kejadian, yang memberikan rupa persamaan pada perubahan-perubahan keadaan tertentu dalam sejarah. Dalam sejarah keteraturan yang menjadi unsur utama dari suatu hukum dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu, yaitu sepanjang keteraturan itu bisa diserap pada sejumlah kejadian yang berarti pula tidak ada jaminan bahwa keteraturan itu bisa diterapkan pada setiap kejadian, dan bahwa kejadian-kejadian itu dibatasi hanya kejadian yang punya rupa persamaan, bukan kejadian yang memang benar-benar sama (identik). Dengan kata lain, hukum itu berlaku apabila bisa dilihat unsur-unsurnya pada peristiwa, kalau tidak maka berarti hukum itu tidak berlaku.

Kenyataan ini tidak menghalangi usaha untuk memproyeksikan pengalaman masa lampau ke situasi masa kini dan akan datang. Meskipun tidak dengan landasan prediksi seperti yang terjadi dalam ilmu alam.

## 2) Sejarah Sebagai Seni

Menurut Kuntowijoyo (1995: 67-70) kedudukan sejarah sebagai seni disebabkan alasan-alasan sebagai berikut.

### a. Sejarah memerlukan intuisi

Apa yang harus dikerjakan setiap langkah memerlukan kepandaian sejarawan dalam memutuskan apa yang harus dilakukan. Sering terjadi untuk memilih suatu penjelasan, bukan peralatan ilmu yang berjalan tetapi intuisi. Dalam hal ini cara kerja sejarawan sama dengan seniman.

Sering sejarawan merasa tidak lagi sanggup melanjutkan tulisannya, apabila sejarah tersebut bersifat deskripsi atau penggambaran peristiwa. Dalam keadaan tidak tahu itu sebenarnya yang diperlukan intuisi. Untuk mendapatkan intuisi sejarawan harus kerja keras dengan data yang ada. Di sinilah beda intuisi seorang

sejarawan dengan seniman. Mungkin seniman akan melamun, tetapi sejarawan harus tetap ingat akan data-datanya.

b. Sejarah memerlukan imajinasi

Dalam pekerjaannya, sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebelumnya, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Pikiran sejarawan harus mampu menerobos masa silam, membayangkan peristiwa dan kondisi yang mengiringinya dalam konteks jaman di mana peristiwa terjadi. Tentu saja imajinasi sejarawan harus tetap berdasar pada bukti-bukti, sehingga tidak terjebak dalam anakronisme.

c. Sejarah memerlukan emosi

Sejarawan diharapkan menyatukan perasaan dengan objeknya. Sejarawan dapat menghadirkan objeknya seolah-olah pembacanya mengalami sendiri peristiwa itu. Akan tetapi, sejarawan harus tetap setia dengan fakta. Penulisan sejarah yang melibatkan emosi sangat penting untuk pewarisan nilai. Untuk keperluan ini, dalam sejarah dikenal *historical thinking* atau cara berpikir historis, yaitu upaya menempatkan pikiran-pikiran pelaku sejarah pada pikiran sejarawan. *Historical thinking* didasari bahwa peristiwa sejarah mempunyai aspek luar dan aspek dalam. Aspek luar peristiwa adalah bentuk dari peristiwa, seperti pemberontakan, perubahan sosial, pelacuran, dan lain-lain. Sedangkan aspek dalam merupakan pikiran-pikiran dari pelaku sejarah. Untuk dapat menjangkau pikiran-pikiran ini dilakukan dengan percakapan imajiner. Tentu saja sejarawan tidak boleh berbuat semuanya saja, harus tetap bertumpu pada fakta sejarah. Dengan penerapan *historical thinking* diharapkan muncul emosi kesejarahan.

d. Sejarah memerlukan gaya bahasa

Gaya bahasa yang baik, tidak berarti gaya bahasa yang berbunga-bunga. Kadang-kadang gaya bahasa yang lugas lebih menarik. Gaya yang berbelit-belit dan tidak sistematis jelas merupakan bahasa yang jelek. Akan tetapi perlu diingat, seperti dinyatakan Kuntowijoyo (1995: 11) bahwa sejarah bukan sastra. Sejarah berbeda dengan sastra dalam hal: (1) cara kerja, (2) kebenaran, (3) hasil keseluruhan, dan (4) kesimpulan. Dari cara kerjanya, sastra adalah pekerjaan imajinasi yang lahir dari kehidupan sebagaimana dimengerti oleh pengarangnya. Sedangkan sejarah

harus berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapya, setuntas-tuntasnya, dan sejelas-jelasnya.

### 3) Sejarah Sebagai Peristiwa dan Kisah

Sejarah sebagai peristiwa hanya terjadi satu kali pada masa lampau. Orang masa kini mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa melalui bukti-bukti (*evidensi*) yang ditinggalkan. Bagi sejarawan bukti-bukti merupakan sesuatu yang utama dan pertama. Tanpa adanya bukti peristiwa masa lalu hanya mitos belaka. Untuk mengungkapkan peristiwa, bukti-bukti itu selanjutnya diolah melalui kritik sejarah. Hasil upaya mempertanyakan bukti-bukti disebut fakta sejarah. Jadi, fakta dalam ilmu sejarah berarti informasi atau keterangan yang diperoleh dari sumber atau bukti setelah melalui proses kritik.

Deretan fakta-fakta belum dapat disebut sejarah, melainkan masih *pseudo* sejarah (sejarah semu) dan belum mempunyai arti. Agar dapat berarti dan dipahami maka perlu dilakukan sintesis (interpretasi). Ketika hasil sintesis dituliskan maka lahirlah sejarah sebagai kisah. Dengan demikian sejarah sebagai kisah, merupakan produk serangkaian kerja intelektual dari seorang sejarawan dan bagaimana menangani bukti-bukti hingga mewujudkannya dalam tulisan sejarah (historiografi).

## 4. Penelitian Sejarah

### a. Sumber-sumber Sejarah

Sutrasno (1975:43) mendefinisikan sumber sejarah sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai bahan penulisan atau penceriteraannya kembali sejarah. Sedangkan Widja (1988:19) mengartikan sumber sejarah sebagai apa-apa yang ditinggalkan oleh peristiwa masa lampau yang menunjukkan bahwa benar-benar telah ada peristiwa. Sebagian sejarawan lebih senang menggunakan istilah jejak sejarah (*traces/relics*) atau bukti-bukti sejarah untuk bahan yang sangat penting artinya bagi penyusunan cerita sejarah itu.

Mengingat peristiwa masa lampau manusia meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang bervariasi dalam berbagai jenis aktivitas (politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain), maka jejak yang ditinggalkan sejarah itu pun beraneka ragam pula wujudnya. Sesuai dengan sifat-sifat aktivitas

manusia tersebut, maka biasanya jejak-jejak tersebut dikelompokkan dalam berbagai macam klasifikasi.

Menurut Notosusanto (1971:18) pembagian sumber sejarah terbagi atas sumber benda, sumber tertulis, dan sumber lisan. Tentu saja yang terutama menarik perhatian sejarawan adalah sumber tertulis, karena sumber benda lebih menuntut keahlian khusus yang terutama dikuasai/dikembangkan oleh disiplin arkeologi. Sumber tertulis lebih lanjut dibedakan antara sumber resmi dengan sumber tak resmi serta sumber formal dan informal. Kedua macam klasifikasi ini dapat saling potong memotong. Ada dokumen resmi formal dan dokumen resmi informal. Ada pula dokumen tak resmi formal dan dokumen resmi informal. Keputusan presiden adalah dokumen resmi formal. Surat "Kattebellece" yang dibuat oleh seorang pejabat kepada pejabat yang lain adalah dokumen resmi informal, karena ditulis oleh seorang pejabat dan diperuntukkan kepada pejabat. Surat seorang pejabat sebagai pribadi kepada Kepala Sekolah di mana putranya bersekolah dan berisi hal ihwal tentang putranya itu merupakan dokumen tak resmi formal, karena ditulis sebagai pribadi akan tetapi ditulis sebagai surat yang memenuhi syarat-syarat dari surat menyurat formal. Surat dari perjalanan seorang pejabat kepada istrinya merupakan dokumen tak resmi informil.

Sumber tak tertulis adalah semua peninggalan yang di dalamnya tak terdapat tulisan-tulisan. Benda-benda ini adalah hasil karya manusia pada masa itu. Dari sini dapat diketahui sampai di tingkat mana manusia itu hidup berbudaya, beserta perkembangannya, pengaruh kebudayaan luar, dan sebagainya. Atas dasar sumber ini kita dapat mengetahui sampai di mana pengaruh sesuatu kebudayaan memasuki suatu daerah, mengetahui jalur-jalur jalannya dan tersebarnya kebudayaan tersebut, dan dengan demikian pula dapat diketahui perkembangan politik dan kebudayaan pada suatu zaman.

Gottschalk (1983) membagi sumber sejarah menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra lain, atau dengan alat mekanis, hadir pada saat peristiwa terjadi. Sumber primer disebut juga saksi pandangan mata. Sumber primer dihasilkan oleh orang yang sejaman dan setempat. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa pun yang bukan saksi pandangan mata, yakni dari orang yang tidak hadir pada saat

peristiwa terjadi. Sumber sekunder digunakan untuk tujuan; (1) menjabarkan latar belakang yang cocok dengan bukti sejaman mengenai subjeknya, tetapi harus siap sedia untuk menyangsikan dan meluruskan sumber sekunder, bilamana suatu analisa kritis terhadap saksi-saksi sejaman memerlukan hal itu; (2) memperoleh petunjuk mengenai data bibliografis yang lain; (3) memperoleh kutipan atau petikan dari sumber dari sumber-sumber sejaman; (4) memperoleh intepretasi atau hipotesa mengenai suatu masalah. Contoh sumber primer adalah buku Adam Malik dan Sidik Kertapati mengenai saat-saat di sekitar proklamasi, karena kedua orang tersebut menyaksikan sendiri peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Sebaliknya kajian dari Banedict R.O.G Anderson adalah sumber sekunder.

### b. Tahapan Penelitian Sejarah

Prosedur kerja seorang peneliti sejarah dalam mengkaji masa lampau berkisar pada langkah-langkah; (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan. Kelima langkah ini kemudian diringkas dalam empat kegiatan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Kuntowijoyo (1995: 90-92) menyarankan, sebaiknya topik atau objek kajian dipilih berdasarkan: (1) kedekatan emosional, dan (2) kedekatan intelektual. Kedekatan emosional biasanya akan diikuti atau berjalan bersamaan dengan kedekatan intelektual, bahkan tidak jarang kedekatan intelektual mendahului kedekatan emosional. Kalau tertarik terhadap permasalahan tertentu, seseorang akan memper-kaya khasanah intelektualnya dengan hal-hal yang terkait dengan permasalahan tersebut.

#### 1) Heuristik/ Pencarian dan Pengumpulan Sumber

Dianjurkan sebelum masuk pada tahap heuristik (pencarian dan pengumpulan sumber), peneliti melakukan studi kepustakaan dan atau perbandingan. Dengan studi kepustakaan dan atau perbandingan akan diperoleh keuntungan, yakni (1) mencapai kedalaman tentang objek atau topik serta permasalahannya; (2) kalau mungkin mendapatkan penulisan-penulisan pendahulu atau yang menyangkut topik. Peneliti harus membiasakan diri untuk mengumpulkan sumber kapan saja dan di mana saja sumber ditemukan.

Sumber sejarah dapat ditemukan di berbagai tempat antara lain, perpustakaan, arsip, dan museum. Penemuan sumber baru sejarah secara terus menerus bermunculan. Sumber-sumber itu berupa memori, otobiografi, kumpulan surat-surat dari orang-orang sezaman yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah, peninggalan-peninggalan dan catatan-catatan penting yang dimiliki perorangan. Sumber-sumber baru itu tidak selalu mengubah substansi pengetahuan sejarah, tetapi yang pasti akan memperluas pengetahuan, akan mengisi lubang-luang yang membingungkan sejarawan, dan menghasilkan rekonstruksi yang lebih rinci dari masa lalu. Dengan penemuan sumber baru, kesalahan-kesalahan akan diperbaiki dan kebenaran masa lalu diperkuat (Sjamsuddin, 1996: 93).

## 2) Kritik Sumber/Verifikasi

Kritik sumber merupakan proses menilai, menguji atau menyeleksi sumber-sumber sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar dan mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang disusun. Semua sumber mempunyai aspek ekstern dan aspek intern, oleh karena itu kritik sejarah bisa dibedakan menjadi kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern bertugas mempermasalahkan kesejatan bahan atau mempersoalkan apakah sumber itu merupakan sumber sejati yang dibutuhkan. Kritik intern bertugas mem-permasalahkan kesejatan isi atau bertalian dengan persoalan: apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Kritik ekstern terutama bertujuan menjawab tiga pertanyaan pokok yang menyangkut sumber.

- a) Apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki, di mana sejarawan ingin mengetahui /meyakinkan diri apakah sumber itu asli atau palsu.
- b) Apakah sumber itu sesuai dengan aslinya atau tiruan, yang mana terutama menyangkut sumber-sumber kuno di mana satu-satunya cara untuk memperbanyak atau mengabadikan naskah adalah dengan menyalin. Dalam menyalin inilah ada kemungkinan terjadi perubahan dari dokumen aslinya.
- c) Apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah. Ini menyangkut utuh atau tidaknya sumber, artinya mempertanyakan kondisi fisik sumber (rusak, retak, robek, dll.) (Notosusanto, 1971: 20; Widja, 1988: 21-22).

Dengan kata lain, kritik ekstern harus menegaskan kesaksian, bahwa: (1) kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang ini atau pada waktu ini; (2)

kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa ada perubahan, tanpa ada penambahan-penambahan atau penghilangan-penghilangan (Sjamsuddin, 1996: 105).

Kritik intern mulai bekerja setelah kritik ekstern selesai menentukan, bahwa dokumen yang kita hadapi memang dokumen yang kita cari. Kritik intern harus membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya. Buktinya diperoleh dengan cara: (1) penilaian intrinsik daripada sumber-sumber; (2) membanding-bandingkan kesaksian daripada berbagai sumber (Notosusanto, 1971).

Penilaian intrinsik sumber dilakukan dengan dua cara, yakni menentukan sifat sumber dan menyoroti pengarang atau pembuat sumber. Harus dapat diidentifikasi suatu sumber apakah bersifat rahasia atau tidak, bersifat sakral atau profan. Pengarang atau pembuat adalah orang yang memberikan informasi mengenai masa lampau melalui bukti yang sampai kepada kita. Untuk itu, harus mempunyai kepastian bahwa kesaksiannya dapat dipercaya. Untuk memastikan kesaksian dari pengarang atau pembuat dilakukan dengan mengajukan dua pertanyaan. Pertama, apakah ia mampu untuk memberikan kesaksian? Kemampuan ini antara lain berdasarkan kehadirannya pada waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Kemampuan itu bergantung pula pada keahliannya, karena, misalnya, keterangan seorang prajurit mengenai jalannya sebuah rapat staf divisi, tentu perlu disangsikan nilainya. Kedua, apakah ia mau memberikan kesaksian yang benar? Ini menyangkut kepentingan si pengarang atau pembuat terhadap peristiwa itu. Harus diketahui, apakah ia mempunyai alasan untuk menutup-nutupi sesuatu peristiwa atau untuk melebih-lebihkannya.

Proses kedua kritik intern, yaitu membanding-bandingkan kesaksian berbagai sumber. Hal ini dilakukan dengan “mensejajarkan” kesaksian dari sumber-sumber.

### 3) Interpretasi/ Penafsiran

Interpretasi atau penafsiran sejarah adalah kegiatan mensintesakan fakta-fakta yang diperoleh dari analisis sumber. Analisis sendiri berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Dalam melakukan interpretasi keduanya tidak dapat dipisahkan. Sintesis adalah upaya menyusun/menyatukan sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber

sejarah dan bersama teori-teori disusunlah fakta-fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 1999: 64). Walsh (1970) mengungkapkan, bahwa ada empat faktor yang melatar-belakangi perbedaan interpretasi sejarawan.

- a) Kecenderungan pribadi (personal bias), yaitu rasa suka atau tidak suka terhadap pelaku sejarah.
- b) Prasangka kelompok (group prejudice), yaitu anggapan-anggapan yang berkaitan dengan masuknya seorang ahli sejarah menjadi anggota dari suatu golongan atau kelompok tertentu.
- c) Teori-teori yang saling bertentangan atas dasar penafsiran sejarah atau penafsiran berlainan tentang fakta sejarah (*conflicting theories of historical interpretation*), yaitu tafsiran yang berlainan mengenai apa yang sesungguhnya yang paling besar pengaruhnya terhadap terjadinya suatu peristiwa.
- d) Pandangan filsafat yang berbeda (*underlying philosophical conflicts*), yaitu perbedaan dalam keyakinan moral dan metafisis. Keyakinan moral berarti penilaian-penilaian yang diberikan oleh sejarawan ke dalam pengertian mereka tentang masa lampau. Sedang pengertian metafisis merupakan pengertian teoretis tentang hakikat manusia dari tempatnya di dalam alam semesta dengan mana penilaian itu dihubungkan.

Sejarawan mengkaji masa lampau dengan ide-ide filosofisnya dan dengan sendirinya ini menentukan cara mereka menafsirkan masa lampau tersebut, sehingga menghasilkan penafsiran sejarah yang berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan-perbedaan pandangan filsafatnya.

Berkaitan dengan subjektivitas dan objektivitas dalam sejarah, Poespoprodjo (1987) mengingatkan, bahwa subjektivitas mempunyai pengertian lain dan tidak selalu negatif, berbeda dengan subjektivistik dan subjektivisme. Subjektivitas adalah hal-hal yang berhubungan dengan subjek. Subjektivistik lebih mengarah pada segala sesuatu yang diserahkan pada kesewenangan subjek, sedang subjektivisme berarti objek dipandang sebagai suatu kreasi (tidak dipandang sebagaimana mestinya). Dalam hal ini objek seharusnya dipandang dengan kacamata totalitas akal budi. Pada taraf yang ideal seorang sejarawan seharusnya tidak dipengaruhi oleh subjektivistik ataupun subjektivisme.

Walaupun sejarah tidak mungkin objektif (menurut kriteria objektif mutlak), tetapi penulisan sejarah didasarkan atas aturan atau metodologi yang menjamin keobjektifannya. Ilmu sejarah mengembangkan ceritera tersendiri untuk mengukur sejauh mana pengkajiannya dinyatakan berhasil dan sejauh mana pengkajian itu gagal mencapai tujuannya. Selanjutnya perlu disadari bahwa objektivitas yang berlebihan, khususnya bila maksudnya tidak pada kejujuran biasa atau keengganan menyatakan pendapat yang tegas, tidak diinginkan dalam sejarah. Dengan kata lain, pengetahuan tentang masa lampau tidak bertambah, apabila sejarahnya ditulis secara ragu-ragu (Frederik dan Soeroto, 1982). Upaya sejarawan untuk menampilkan pelaku sejarah secara jujur dan terbuka makin jauh dari objektif dan kemungkinan akan menimbulkan kekacauan secara politis maupun ilmiah.

Cara menghindari subjektivitas berlebihan dan agar sejarawan tidak terjebak dalam subjektivistik dan subjektivisme menurut Poespoprodjo (1987); (1) sejarawan terus menerus belajar agar kapasitas intelektualnya bertambah kaya. Luasnya bidang yang digarap sejarawan, jika sejarawan tidak peka terhadap bermacam ragam hal yang berasal dari berbagai bidang sektor kehidupan, maka sejarah akan menyedihkan; (2) sejarawan harus selalu memperhatikan kelengkapan kejiwaannya, hal ini penting agar sejarawan tidak (a) dipermainkan oleh prasangka, (b) dibutakan oleh konsepsi, (c) diperbudak oleh kesewenangan. Meskipun kita tentu dapat mempertahankan pandangan atau tafsiran agar jangan sampai menjadi dogma. Kita harus senantiasa siap untuk mengubah atau menggantinya, jika bukti-bukti baru memaksa kita mengubah atau menggantinya.

#### 4) Historiografi

Historiografi berasal dari history (sejarah) dan graphy (*graphein*: melukiskan, mencitra, menggambarkan). Historiografi berarti melukiskan atau menggambarkan sejarah atau pengertian yang lebih umum adalah penulisan sejarah.

Penulisan sejarah adalah usaha rekonstruksi masa lampau untuk menjawab pertanyaan pokok yang terlebih dahulu dirumuskan. Penulisan tanpa adanya penelitian tidak lebih dari rekonstruksi tanpa pembuktian. Abdullah (1985:xv) menyatakan, bahwa penulisan adalah puncak segala-galanya. Sebab apa yang dituliskan itulah sejarah, yaitu *histoire-recite* (sejarah sebagaimana

dikisahkan) yang mencoba menangkap dan memahami *histoire-realite* (sejarah sebagaimana terjadi-nya). Hasil penulisan sejarah yang akademis atau kritis berusaha sejauh mungkin mencari kebenaran historis dari setiap fakta.

Dalam melakukan pemaparan, penulis sejarah sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut.

- a) Memiliki kemampuan mengungkapkan dengan menggunakan bahasa secara baik. Misalnya, memperhatikan aturan atau pedoman bahasa Indonesia yang baik dan memilih kata serta gaya bahasa yang tepat untuk mengungkapkan maksud.
- b) Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum.
- c) Diperlukan pola penulisan atau sistematika penyusunan dan pembahasan agar mudah diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca.
- d) Pemaparan harus argumentatif, artinya usaha peneliti dalam menyampaikan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau didasarkan bukti-bukti terseleksi, bukti yang cukup lengkap, dan detail fakta yang akurat (Hasan Usman dalam Abdurrahman, 1999: 67-68).

## 5. Manusia Pra Aksara di Indonesia

### a. Penemuan Manusia Pra Aksara

Pulau Jawa hingga saat ini masih menjadi lokasi banyaknya penemuan fosil manusia di Indonesia, kecuali beberapa temuan artefak yang berada di Flores Nusa Tenggara Timur. Penelitian terbaru pada 2018 dengan adanya temuan kerangka manusia purba di Jawa Barat juga melengkapi banyaknya sebaran manusia purba di wilayah Jawa. Penemuan-penemuan fosil di Jawa hingga saat ini masih menjadi salah satu temuan penting yang dalam penelusuran asal-usul dan evolusi manusia pra aksara di dunia.

#### 1) *Sangiran*

Penemuan fosil pertama di daerah Kalioso yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Sangiran berupa vertebrata terjadi tahun 1864 oleh P.E.C Schemulling, namun kurang perhatian oleh peneliti lain. Hingga pada tahun 1934 wilayah Sangiran kembali menyeruak ketika G.H.R von Koenigswald

menemukan artefak *litik* di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km barat kubah Sangiran.

Lapisan batu di Sangiran juga memperlihatkan proses evolusi lingkungan yang panjang. Dimulai dari formasi (lapisan tanah) Kalibeng dari akhir kala Plestosen, berlanjut pada formasi Pucangan dari kala Pleistosen Bawah, formasi Kabuh dari kala Pleistosen Tengah (diselengi lapisan Grenzbank), formasi Notopuro dari kala Pleistosen Atas hingga endapan-endapan teras Resen (Widianto, 2012:82). Formasi Kalibeng sebagai sedimentasi lingkungan laut tersingkap di bagian tengah situs berupa lempung biru dengan kepra-aksaraan 2.4 juta tahun (A.M Semah,1982).



Gambar 2 Infografis Lapisan Tanah Sangiran

2) Kedungbrubus, Madiun, Jawa Timur.

Penemuan *Pithecanthropus Erectus* oleh Eugene Dubois di Trinil bukan penemuan pertama. Setahun sebelumnya di Desa Kedungbrubus yang berada di wilayah selatan Pegunungan Kendeng ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar dengan geraham yang masih tersisa pada tahun 1890. Rahang ini menunjukkan bagian bawah yang lebar, yang jauh melampaui rahang manusia modern dan mengenakan ciri yang sangat *arkaik*. Namun, rahang yang masih menancap menunjukkan ciri gigi manusia, bukan kera. Hal ini diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut milik rahang hominid. Temuan ini kemudian diumumkan sebagai *Pithecanthropus A.*

3) Trinil, Ngawi, Jawa Timur

Trinil merupakan sebuah wilayah dipinggiran sungai Bengawan Solo, dan masuk dalam administrasi Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Ekskavasi pertama di daerah ini dilakukan oleh Eugene Dubois yang menemukan fosil-fosil manusia pra aksara yang sangat berharga bagi perkembangan dunia pengetahuan. Dari penelitian ini ditemukan atap tengkorak *Pithecanthropus erectus* dan beberapa buah tulang paha (utuh dan fragmen) yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak *Pithecanthropus erectus* dari Trinil sangat pendek tetapi menajang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc, dimana volume otak ini merupakan volume otak diantara kera (600cc) dan otak manusia modern (1200cc-1400cc). Tulang kening sangat menonjol dan di bagian belakang orbit mata terdapat penyempitan yang sangat jelas, menandakan otak yang belum berkembang. Berdasarkan kaburnya sambungan perekatan antartulang kepala, ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa.

4) Perning, Mojokerto, Jawa Timur

Koenigswald dan Duyfjes menemukan atap tengkorak anak-anak berusia 3-5 tahun di Sumber Tengah, sekitar 3 km di utara Pering tahun 1936. Fosil ini berasal dari endapan yang tebal dari kala Pleistosen Bawah dan Pleistosen Tengah berupa pasing konglomerat formasi Pucangan yang disisipi oleh endapan marin (Duyfjes, 1936). Tengkorak dicirikan dengan penyempitan tulang kening bagian occipital yang meruncing, ciri kuat *Homo erectus*. Meskipun aspek fisiknya belum berkembang secara penuh karena masih atap tengkorak anak-anak yang berusia sekitar 5 tahun, aspek fisik tengkorak ini menunjukkan dengan jelas ciri-ciri dari *Homo erectus*. Hal ini terlihat dari

bagian kening yang telah menonjol, penyempitan jelas di daerah orbit mata, maupun bagian belakang tengkorak yang runcing. Penemuan Homo erectus di Mojokerto ini merupakan individu Homo erectus yang paling pra aksara di Indonesia (Widianto, 2012:87).

5) Ngandong, Blora, Jawa Tengah

Ngandong adalah sebuah wilayah yang terletak ditepian sungai Bengawan Solo,

yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bermula tahun 1931 ketika mengadakan pemetaan di daerah ini, Ter Haar menemukan endapan teras yang mengandung fosil-fosil vertebrata pada suatu lekukan di Bangawan Solo. Pada tahun yang sama Ter Haar mengadakan penggalian pada salah satu teras yang berada 20 meter di atas aliran sungai sekarang dan menemukan dua buah atap tengkorak manusia pra aksara. Tahun 1933 berlangsung penggalian bersama antara Oppenoorth dan von Koenigswald menemukan beberapa atap tengkorak lainnya. Temuan ini kemudian dideskripsikan oleh Oppenoorth sebagai Homo soloensis. Berdasarkan karakter morfologi yang dimiliki manusia Ngandong digolongkan sebagai kelompok Homo erectus maju yang diperkirakan berumur antara 300.000-100.000 tahun. Tengkorak Homo erectus Ngandong berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1.100 cc, ciri yang lebih berevolusi dibanding dengan Homo erectus dari Sangiran maupun Trinil. Ciri lebih maju dengan ditunjukkan dengan bentuk tengkorak dimana atapnya lebih tinggi dan lebih bundar. Berdasarkan hal-hal di atas otak manusia Ngandong lebih berkembang daripada yang hidup di Sangiran. Apabila dikaitkan dengan tiga tingkat evolusi yang pernah terjadi di Indonesia, posisi Homo erectus Ngandong berada pada bagian paling akhir sehingga tengkorak tersebut merupakan tengkorak Homo erectus yang paling berevolusi, paling maju (Widianto, 2012:88).

6) Sambungmacan, Sragen, Jawa Tengah

Penemuan situs ini terjadi tahun 1973 ketika penduduk setempat menggali kanal untuk melancarkan aliran Bengawan Solo menemukan sebuah fosil tengkorak pra aksara. Kanal yang digali menajang sekitar 200 m dan lebar 50 m dengan kedalam 12 m. Lapisan yang mengandung fosil binatang, termasuk tengkorak manusia pra aksara kurang lebih 8 meter di bawah permukaan

tanah sekarang ini. Fosil vertebrata yang ditemukan antara lain *Cervus lydekkiri*, *Cervus hippelapus*, *Rhinceros sondaicus*, *Stegodon trigonochepalus*, *Elephas sp.* dan *Bibos Sodaicus* (Widiyanto, 2012:88). Komposisi fauna Sambung macan khususnya kehadiran *Homo erectus soloensis*, *Panthera tiguris soloensis*, dan *Elephas sp.*, mengidentifikasi persamaan dengan fauna Ngandong. Temuan fosil-fosil dari situs Sabungmacan mewakili empat individu yang diwakili oleh tiga buah tengkorak dan sebuah potongan tulang kaki. Dari berbagai segi *Homo erectus* Sambungmacan memiliki banyak kesamaan dengan *Homo erectus* Ngandong yang dalam posisi evolutifnya berada pada *Homo erectus* yang paling maju.

b. Evolusi Manusia Purba

Ciri tubuh makhluk hidup diakibatkan oleh faktor pewarisan dan lingkungan. Di dalam evolusi manusia, terdapat beberapa proses penting yang terjadi, pertama adalah sikap tubuh dan cara bergerak (Poesponegoro, 2009: 20). Sikap tegak adalah hal yang pokok, oleh karena mempunyai rentetan akibat dalam evolusi manusia selanjutnya. Sikap tegak mulai dengan kemampuan duduk tegak, dan melalui tahapan berlari tegak, serta berjalan tegak, berakhir dengan berdiri tegak untuk waktu yang lama. Dalam proses ini terjadilah perubahan-perubahan pada tulang belakang, berpindahnya titik berat badan mendekati anggota bawah, dan spesialisasi anggota bawah untuk menampung berat badan seluruhnya serta bergerak. Anggota atas dibebaskan dari bebannya menampung berat badan dan bergerak, serta menjadi lebih kecil daripada anggota bawah.

Perubahan-perubahan terjadi pada tubuh sendiri karena letaknya berubah dari horisontal ke vertikal. Panggul sekarang menampung berat tubuh di atasnya dan isi rongga perut. Titik berat badan juga harus mendekati tulang belakang sehingga dada menjadi pipih dalam arah muka-belakang dan lebar. Panggul menjadi lebih besar dan lebar serta dasarnya bertambah kuat. Otot-otot yang perlu untuk berjalan tegak pada panggul dan paha berubah pula. Peredaran darah tentu terpengaruh oleh perubahan sikap tubuh, demikian pula persalinan dan beberapa fungsi tubuh yang lain.

Tulang-tulang tungkai makin bertambah kuat untuk menunjang berat badan. Tulang paha reatif bertambah panjang dan berat; tulang kering bertambah

besar. Jari kaki mengalami reduksi, oleh karena tidak dipakai lagi untuk menggenggam.

Seperti disebutkan di awal, akibat berdiri tegak ialah pembebasan tangan dari tugas menunjang badan. Lengan seluruhnya dapat bergerak bebas leluasa daripada tungkai. Lengan atas dapat diputar melalui sumbu bujur sehingga lebih mudah menggunakan tangan untuk menggenggam dan pekerjaan-pekerjaan cermat lainnya. Lengan bawah menjadi lebih pendek daripada lengan atas.

Yang terpenting pada lengan adalah tangan sendiri, yang makin berkembang untuk menggenggam cermat, seperti dalam menggunakan alat kecil, tidak hanya untuk menggenggam secara kokoh, seperti dalam menggenggam alat besar. Untuk ini diperlukan pengawasan dan koordinasi otot-otot tangan dengan teliti. Peranan ibu jari sangat penting dalam menggenggam. Pekerjaan dilakukan dengan tangan juga makin lama makin banyak. Sekali-sekali tangan juga masih digunakan untuk menumpu badan, tetapi sebagian besar pekerjaannya berhubungan dengan membuat dan mempergunakan alat, menyelidiki lingkungan, mencari, membawa, mempersiapkan dan menyuap makanan, memelihara kebersihan badan, mempertahankan diri dan mengasuh anak-anak (Posponegoro, 2009: 21). Terlihatlah bahwa banyak pekerjaan yang pada primata ataupun hewa lain dilakukan dengan mulut, pada manusia diambil alih leh tangan.

Evolusi tangan sangat berpengaruh bagi evolusi budaya. Memakai, membawa dan membuat alat memungkinkan oleh pembebasan dan perkembangan tangan. Berburu dan membawa hasil buruan dan selanjutnya brbagi makanan, juga dimungkinkan olh perkembangan tangan.

Selain sikap tegak, yang pokok dalam evolusi manusia ialah evolusi kepala. Tengkorak terdiri atas tengkorak muka dan tengkorak otak, oleh karena itu evolusi kepala berhubungan erat dengan evolusi muka, sebagai bagian teratas sistem pencernaan dan pernapasan serta evolusi otak.

### c. Jenis Manusia Pra Aksara

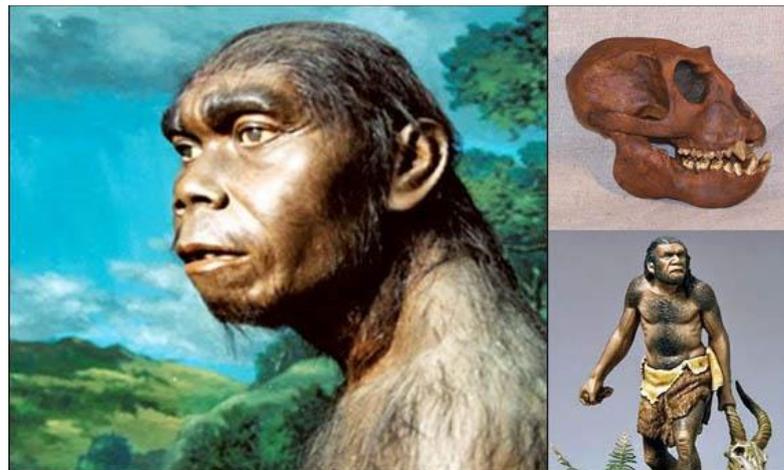
Fosil manusia di Indonesia pernah ditemukan di masa lalu bersamaan dengan fosil-fosil hewan. Penelitian ilmiah tentang fosil di Indonesia telah di mulai pada abad ke-19 yang terbagi dalam tiga tahap yaitu 1) 1889-1909; 2) 1931-1941; dan 3) 1952-sekarang.

Penelitian tentang fosil manusia yang ditemukan di Indonesia ini dipelopori oleh Eugene

Dubois, seorang paleontolog Belanda.

1) Jenis Meganthropus

Fosil manusia pra aksara paling primitif yang ditemukan di Indonesia disebut Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus berasal dari kata mega yang berarti besar, dan anthropo yang berarti manusia. Fosil dari jenis meganthropus juga ditemukan di Sangiran (Jawa Tengah) oleh von Koenigswald tahun 1936 dan 1941 (Herimanto, 2012: 23). Meganthropus diperkirakan hidup antara 2-1 juta tahun yang lalu. Dari rahang dan gigi yang ditemukan terlihat bahwa makhluk ini adalah pemakan tumbuhan yang tidak dimasak terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan asumsi dari temuan rahang dan gigi yang besar dan kuat.



Gambar 3 Ilustrasi Manusia Meganthropus

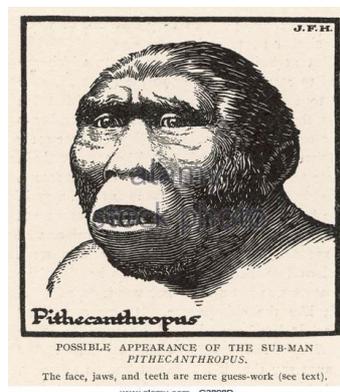
Ketika penemuan fosil, belum ditemukan perkakas atau alat dalam lapisan ini sehingga diperkirakan jenis ini belum memiliki kebudayaan. Secara umum ciri-ciri dari manusia jenis Meganthropus sebagai berikut.

- Hidup dikisaran 2-1 juta tahun lalu;
- Memiliki tubuh kekar dan lebih tegap;
- Memiliki bentuk geraham seperti manusia tetapi tidak berdagu seperti kera;
- Rahang yang relative lebih besar;
- Ada penonjolan pada kening dan belakang kepalanya;

- o Memiliki tulang pipi yang relative tebal; dan
- o Makanan pokok adalah tumbuh-tumbuhan (vegetarian).

## 2) Jenis Pithecanthropus

Fosil manusia yang paling banyak ditemukan adalah fosil Pithecanthropus, sehingga dapat dikatakan bahwa pada saat kala Plestosein di Indonesia didominasi oleh manusia jenis tersebut. Pithecanthropus hidup pada kala Plestosein Awal dan Tengah, dan kemungkinan juga pada Pleistosen Akhir. Sisa-sisa kehidupan manusia jenis Pithecanthropus banyak ditemukan di Perning, Kerdungbrubus, Trinil, Sangiran, Sambungmacan, dan Ngandong.



Gambar 4 Manusia Pithecanthropus



Gambar 5 Tengkorak Pithecanthropus

Hidupnya mungkin dilembah-lembah atau di kaki pegunungan dekat dengan perairan darat di Jawa Tengah dan Jawa Timur (sekarang), yang mungkin dahulu merupakan padang rumput dengan pohon-pohon yang jarang. Genus pithecanthropus mempunyai ciri-ciri:

- Tinggi badan berkisar 165-180 cm dengan tubuh dan anggota badan tegap;
- Geraham yang besar, rahang kuat, tonjolan kening tebal, dan tonjolan kepala yang nyata;
- Dagu belum ada dan hidungnya lebar;
- Wajah menonjol kedepan dan dahinya miring ke belakang; dan
- Volume tengkorak berkisar antara 750-1300 cc;
- Alat pengunyah dan otot tengkorak mengecil;
- Makanan masih kasar dengan sedikit pengolahan.

Fosil *Pithecanthropus erectus* pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1890 di sekitar desa Trinil, wilayah Ngawi, Jawa Timur di sekitar Lembah Sungai Bengawan Solo. Fosil yang ditemukan berupa tulang rahang bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang kaki. Manusia pra aksara *Pithecanthropus Erectus* memiliki kedudukan diantara manusia dan kera, dengan kata lain mereka mirip seperti kera tetapi dapat berjalan seperti manusia. Manusia pra aksara *pithecanthropus erectus* hidup pada masa Pleistosen Awal, Pleistosen Tengah, dan Pleistosen Akhir. Pada masa-masa itu, daerah tempat tinggal mereka diperkirakan masih berupa padang rumput dengan pepohonan yang tidak terlalu jauh dengan sumber air.

Beberapa puluh tahun, *Pithecanthropus erectus* yang ditemukan oleh E. Dubois ini dianggap sebagai manusia pra aksara tertua di Indonesia. tahun 1936-1941, von Koenigswald dan F. Weinderich melakukan penyelidikan disepanjang Sungai Bengawan Solo dan berhasil menemukan fosil tengkorak manusia. Berawal dari penemuan ini, kemudian disimpulkan bahwa manusia tertua bukan *Pithecanthropus erectus*, melainkan *Meganthropus paleojavanicus* (Al Anshori, 2010:4). *Pithecanthropus* yang tertua yang ditemukan adalah *Pithecanthropus modjokertensis* atau *robustus*, yang ditemukan di formasi Pucangan di sebelah utara Pening dan Mojokerto. Fosil ini ditemukan tahun 1936 berupa tengkorak anak-naka berusia sekitar 6 tahun berdasarkan tulang pelipis dan sendi rahang bawahnya.

### 3) Jenis Homo

Dilihat dari ciri-cirinya, manusia pra aksara jenis homo lebih maju dan sempurna dari jenis manusia lain yang ditemukan di Indoensia. Manusia pra

aksara jenis homo terdapat berbagai macam perbedaan dengan pendahulunya yakni manusia pra aksara

jenis Meganthropus dan manusia pra aksara jenis Pithecanthropus. Jika dibandingkan

Megantropus ataupun Pithcanthropus. Secara fisik, ciri-ciri manusia Homo sudah mirip

dengan manusia modern sekarang ini. Misalnya, bentuk kepalanya sudah tidak lonjong.

Fosil manusia jenis Homo yang ditemukan di Indonesia berasal dari kala Plestosein.

Rangka yang ditemukan adalah rangka Wajak dan beberapa tulang paha dari Trinil dan

tulang tengkorak dari Sangiran. Homo menurut definisi yang dipakai disini memiliki ciri-ciri yang lebih progresif daripada Pithecanthropus. Ciri-ciri manusia pra aksara jenis Homo sebagai berikut.

- Volume tengkorak bervariasi antara 1000-2000 cc, dengan nilai rata-rata antara 1350-1450 cc;
- Tinggi badannya juga lebih besar yaitu 130-210 cm dengan berat badan 30-150 kg.
- Otak dari manusia jenis homo lebih berkembang terutama kulit otaknya sehingga
- bagian terlebar tengkorak terletak di sisi tengkorak dan dahinya membulat serta lebih tinggi.
- Gigi mengecil, begitu pula dengan rahang serta otot kunyah, dan muka tidak begitu menonjol ke depan; dan
- Berjalan serta berdiri dengan tegak, dan koordinasi otot sudah jauh lebih cermat dan seimbang.

Temuan fosil di Wajak merupakan jenis Homo sapiens. Rangka Wajak ditemukan oleh Rietschoten tahun 1889. Temuan ini diselidiki pertama kali oleh Dubois, dan terdiri atas tulang tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher.

Temuan Wajak mengisyaratkan bahwa sekitar 40.000 tahun sebelum sekarang, Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens yang tergolong jenis Wajak, yang berbeda dengan manusia sekarang. Manusia Wajak

kelihatannya tidak hanya mendiami Indonesia barat, tetapi juga di sebagian Indonesia Timur. Oleh karena itu, populasinya pasti lebih besar dari Pithecanthropus. Von Koenigswald menyebutkan barangkali Homo wajakensis termasuk jenis homo sapiens (manusia cerdas) karena telah mengenal teknik penguburan.

Diperkirakan jenis ini merupakan nenek moyang dari Austroloid dan menurunkan penduduk asli Asutralia yang sekarang ini (Sudrajat, 2012:11).



Fig. 14. Wajak-1 (norma lateralis dextra), cranium W-H-24 and mandibula W-H-25; photograph taken after the latest reconstruction (courtesy NHM, London).

Gambar 6 Tengkorak Homo Wajakensis

Tahun 1931-1934 von Koenigswald dan Weidenrich menemukan fosil fosil manusia pra aksara di lembah Sungai Bengawan Solo di dekat Desa Ngandong. Jenis manusia pra aksara dari lembah Bengawan Solo tersebut dinamakan Homo Soloensis atau manusia dari Solo. Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa ternyata manusia pra aksara jenis Homo Soloensis lebih tinggi tingkatannya dari pada Pithecanthropus Erectus. Bahkan, sebagian para ahli menggolongkan ke dalam kelompok Homo Neanderthalensis, yang merupakan manusia pra aksara jenis Homo Sapiens dari daratan Eropa yang sama-sama hidup dilapisan Pleistosen Atas. Menurut para ahli, Homo soloensis dan Homo neandhertalensis merupakan hasil evolusi dari Pithecanthropus Mojokertensis. Berdasarkan penelitian fosil-fosil yang ditemukan, Homo Soloensis mempunyai ciri-ciri, antara lain sebagai berikut.

- Otak kecilnya lebih besar daripada otak kecil Pithecanthropus Erectus;

- Tengkoraknya lebih besar daripada *Pithecanthropus Erectus* dengan volumenya berkisar 1.000-1.300 cc;
- Tonjolan kening agak terputus ditengah (di atas hidung); dan
- Berbadan tegap dan tingginya kurang lebih 180 cm.

Penemuan manusia jenis homo, juga ditemukan di daerah timur Indonesia. Dibandingkan jenis lainnya, fosil ini memiliki keistimewaan karena tubuhnya yang kerdil. Fosil ini dinamai Homo floresiensis atau manusia dari Flores. Fosil ini ditemukan oleh seorang pastur bernama Verhoeven tahun 1958 di Liang Bua Manggarai, Flores Nusa Tenggara Timur. Homo floresiensis diperkirakan hidup pada sekitar 30.000-18.000 tahun yang lalu. Berdasarkan penemuan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa manusia jenis ini telah mampu membuat peralatan dari batu, pemburu handal, dan menggunakan api untuk memasak. Manusia jenis ini memiliki tubuh sekitar 1meter dan ukuran tengkorak seperti anak kecil. Homo floresiensis mempunyai ciri memiliki tengkorak yang panjang dan rendah, berukuran kecil, dan dengan volume otak 380 cc. kapasitas cranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus (1000 cc), manusia modern Homo sapiens (1400 cc), dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse (380 cc).

#### d. Asal-Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia

Terhubungnya pulau-pulau akibat peng-esan yang terjadi pada masa *glasial* memungkinkan terjadinya migrasi manusia dan fauna dari daratan Asia ke kawasan Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, migrasi ini didahului oleh perpindahan binatang yang kemudian diikuti oleh manusia dan diperkirakan terjadi pada masa pleistosen. Sebagai bukti adanya proses migrasi awal binatang dari daratan Asia ke wilayah Indonesia ialah ditemukannya situs paleontologi tertua di daerah Bumiayu yang terletak di sebelah selatan Tegal (Jawa Tengah) dan Rancah di sebelah timur Ciamis (Jawa Barat). Fosil tersebut, yaitu *Mastodon Bumiayuensis* (spesies gajah) dan *Rhinoceros Sondaicus* (spesies Badak). Bila dibandingkan dengan fosil binatang didaratan Asia, fosil-fosil tersebut berumur lebih muda dari fosil-fosil yang terdapat dalam kelompok fauna Siwalik di India.

Proses migrasi yang terjadi pada masa pleistosen ini menyebabkan wilayah Indonesia mulai dihuni oleh manusia. Timbul pertanyaan tentang asal-usul

manusia yang bermigrasi ke wilayah Indonesia ini. Menilik dari segi fisik manusia Indonesia sekarang ini, mayoritas dapat dikelompokkan ke dalam ras Mongoloid dan Austroloid. Para ahli memperkirakan bahwa pada sekitar abad ke-40 sebelum masehi, Pulau Jawa merupakan daerah pertemuan dari beberapa ras dan daerah pertemuan kebudayaan.

Ciri-ciri Mongoloid yang terdapat pada manusia Indonesia, nampaknya disebabkan adanya arus migrasi yang berasal dari daratan Asia. Kedatangan mereka pada akhirnya menyingkirkan manusia yang sudah hidup sebelumnya di wilayah Indonesia, yaitu dari ras yang disebut Austroloid. Bangsa pendatang dari Asia ini mempunyai kebudayaan dan tingkat adaptasi yang lebih baik sebagai pemburu dibandingkan dengan manusia pendahulunya. Keturunan dari ras Austroloid ini nampaknya tidak ada yang dapat hidup di Jawa, tetapi mereka saat ini dapat ditemukan sebagai suku Anak Dalam atau Kubu di Sumatera Tengah dan Indonesia bagian timur.

Arus migrasi para pendatang dari wilayah Asia ke Kepulauan Indonesia terjadi secara bertahap. Pada sekitar 3.000 - 5.000 tahun lalu, tiba arus pendatang yang disebut *proto-Malays* (Proto Melayu) ke Pulau Jawa. Mereka masuk melalui dua rute: jalan barat dan jalan timur. Jalan barat adalah melalui Semenanjung Melayu kemudian terus ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke seluruh Indonesia. Sementara jalan timur adalah melalui Kepulauan Filipina terus ke Sulawesi dan kemudian tersebar ke seluruh Indonesia. Keturunan mereka saat ini dapat dijumpai di Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Tengger di Jawa Timur, Dayak di Kalimantan, dan Sasak di Lombok.

Setelah itu, tibalah arus pendatang yang disebut Austronesia atau *Deutero-Malays* (Detro Melayu) yang diperkirakan berasal dari Taiwan dan Cina Selatan. Para ahli memperkirakan kedatangan mereka melalui laut dan sampai di Pulau Jawa sekitar 1.000 - 3.000 tahun lalu. Bangsa Detro Melayu (Melayu Muda) memasuki kawasan Indonesia secara bergelombang. Mereka masuk melalui jalur barat, yaitu melalui daerah Semenanjung Melayu terus ke Sumatera dan tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Sekarang keturunannya banyak tinggal di Indonesia sebelah barat. Orang Detro Melayu ini datang ke wilayah Indonesia dengan membawa keterampilan dan keahlian

bercocok tanam padi, pengairan, membuat barang tembikar/pecah-belah, dan kerajinan dari batu.

Seorang ahli bahasa, yaitu H. Kern, melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat keserumpunan bahasa-bahasa di Daratan Asia Tenggara dan Polinesia. Menurut pendapatnya, tanah asal orang-orang yang mempergunakan bahasa Austronesia, termasuk bahasa Melayu, harus dicari di daerah Campa, Vietnam, Kamboja, dan daratan sepanjang pantai sekitarnya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Selatan yaitu di daerah Yunan. Selain itu, R. von Heine Geldern yang melakukan penelitian tentang distribusi dan kronologi beliung dan kapak lonjong yang ada di Indonesia tiba pada kesimpulan bahwa alat-alat tersebut merupakan hasil persebaran kompleks kebudayaan *Bacson-Hoabinh* yang ada di daerah Tonkin (Indocina) atau Vietnam sekarang ini.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, terdapat beberapa teori yang membahas tentang asal-usul manusia yang sekarang menghuni wilayah Indonesia ini. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut.

### 1) Teori Yunan

Teori ini didukung oleh beberapa sarjana seperti R.H Geldern, J.H.C Kern, J.R Foster, J.R Logan, Slamet Muljana, dan Asmah Haji Omar. Secara keseluruhan, alasan-alasan yang menyokong teori ini yaitu sebagai berikut.

- a) Kapak Tua yang ditemukan di wilayah Indonesia memiliki kemiripan dengan Kapak Tua yang terdapat di Asia Tengah. Hal ini menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Indonesia.
- b) Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun dengan bahasa yang ada di Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kamboja mungkin berasal dari Dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini kemudian dilanjutkan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Indonesia. Kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja sekaligus menandakan pertaliannya dengan Dataran Yunan.

Teori ini merupakan teori yang paling populer dan diterima oleh banyak pasangan. Berdasarkan teori ini, orang-orang Indonesia datang dan berasal

dari Yunan. Kedatangan mereka ke Kepulauan Indonesia ini melalui tiga gelombang utama, yaitu perpindahan orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutro.

a) Orang Negrito

Orang Negrito merupakan penduduk paling awal di Kepulauan Indonesia. Mereka diperkirakan sudah mendiami kepulauan ini sejak 1000 SM. Hal ini didasarkan pada hasil penemuan arkeologi di Gua Cha, Kelantan, Malaysia. Orang Negrito ini kemudian menurunkan orang Semang, yang sekarang banyak terdapat di Malaysia. Orang Negrito mempunyai ciri-ciri fisik berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, bibir penuh, serta ukuran badan yang pendek.

b) Melayu Proto

Perpindahan orang Melayu Proto ke Kepulauan Indonesia diperkirakan terjadi pada 2.500 SM. Mereka mempunyai peradaban yang lebih maju daripada orang Negrito. Hal ini ditandai dengan kemahirannya dalam bercocok tanam.

c) Melayu Deutro

Perpindahan orang Melayu Deutro merupakan gelombang perpindahan orang Melayu kuno kedua yang terjadi pada 1.500 SM. Mereka merupakan manusia yang hidup di pantai dan mempunyai kemahiran dalam berlayar.

2) Teori Indonesia

Teori ini menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Indonesia ini tidak berasal dari luar melainkan mereka sudah hidup dan berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Teori ini didukung oleh sarjana-sarjana seperti J. Crawford, K. Himly, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Gorys Keraf. Akan tetapi, nampaknya teori ini kurang populer dan kurang banyak diterima oleh masyarakat.

Teori Indonesia didasarkan pada alasan-alasan seperti di bawah ini.

- a) Bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Indonesia.
- b) K. Himly tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Champa (Kamboja). Baginya, persamaan

yang berlaku di kedua bahasa tersebut adalah suatu fenomena yang bersifat “kebetulan”.

- c) Manusia kuno Homo Soloensis dan Homo Wajakensis yang terdapat di Pulau Jawa. Penemuan manusia kuno ini di Pulau Jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang Melayu itu keturunan dari manusia kuno tersebut, yakni berasal dari Jawa.
- d) Bahasa yang berkembang di Indonesia yaitu rumpun bahasa Austronesia, mempunyai perbedaan yang sangat jauh dengan bahasa yang berkembang di Asia Tengah yaitu bahasa Indo-Eropa.

### 3) Teori “*out of Africa*”

Hasil penelitian mutakhir/kontemporer menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang ini berasal dari Afrika. Setelah mereka berhasil melalui proses evolusi dan mencapai taraf manusia modern, kemudian mereka bermigrasi ke seluruh benua yang ada di dunia ini.

Dasar dari teori ini adalah berdasarkan ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria gen perempuan dan gen laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Ingman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika antara kurun waktu 100-200 ribu tahun lalu. Dari Afrika, mereka menyabar ke luar Afrika. Dari hasil penelitian Ingman, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba.

Manusia Afrika melakukan migrasi ke luar Afrika diperkirakan berlangsung sekitar 50.000-70.000 tahun silam. Tujuannya adalah menuju Asia Barat. Jalur yang mereka tempuh ada dua, yaitu mengarah ke Lembah Sungai Nil, melintasi Semenanjung Sinai lalu ke utara melewati Arab Levant dan yang kedua melewati Laut Merah. Pada 70.000 tahun yang lalu bumi memasuki zaman glasial terakhir dan permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Dengan keadaan seperti ini mereka sangat memungkinkan menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu primitif.

Setelah memasuki Asia, beberapa kelompok tinggal sementara di Timur Tengah, sedangkan kelompok lainnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai Semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, Indonesia,

dan bahkan sampai ke Barat Daya Australia, yaitu dengan ditemukannya fosil laki-laki di Lake Mungo. Jejak paling kuat untuk membuktikan bahwa manusia Afrika telah bermigrasi hingga ke Australia adalah jejak genetika.

Apabila kita bersandar pada teori ini, maka bisa dikatakan bahwa manusia yang hidup di Indonesia sekarang ini merupakan hasil proses migrasi manusia modern yang berasal dari Afrika tersebut.

Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa fosil-fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia atau khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak mempunyai hubungan langsung dengan manusia modern.

Dengan demikian, nampaknya jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia khususnya Jawa, seperti *Meganthropus Palaeojavanicus*, *Pithecanthropus Erectus*, *Homo Soloensis*, *Homo Wajakensis*, dan sebagainya telah mengalami kepunahan. Mereka pada akhirnya digantikan oleh komunitas manusia yang berasal dari Afrika yang melakukan proses migrasi hingga sampai di Kepulauan Indonesia. Nampaknya teori ini perlu terus dikaji dan disosialisasikan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Namun Homo Erectus yang pernah tinggal di Pulau Jawa mempunyai sejarah menarik karena dapat bertahan sekitar 250.000 tahun lebih lama dari jenis yang sama yang tinggal di tempat lain di Asia, bahkan mungkin bertahan sekitar 1 juta tahun lebih lama dari yang tinggal di Afrika. Umur fosil *Homo Erectus* terakhir yang ditemukan di Ngandong dan Sambung Macan (Jawa Tengah) sekitar 30.000 sampai 50.000 tahun. *Homo Erectus* ("javaman") di Pulau Jawa diduga pernah hidup dalam waktu yang bersamaan dengan *Homo Sapiens* (manusia modern).

Sampai saat ini, penyebab kepunahan "java man" masih misteri. Diduga salah satu penyebabnya ialah karena keterbatasan strategi hidup mereka. Tidak ditemukannya peralatan dari batu (misalnya untuk membelah daging atau untuk berburu) di sekitar fosil mereka menunjukkan bahwa kehidupannya masih sangat primitif. Diduga mereka memakan daging dari binatang yang telah mati (*scavenger*). Kolonisasi Homo Sapiens yang berasal dari Afrika berhasil, karena mereka punya strategi hidup yang lebih baik dibanding penduduk asli Homo Erectus.

## 6. Corak Kehidupan dan Hasil Kebudayaan Masyarakat Pra Aksara

### a. Corak Kehidupan

#### 1) Pola Hunian

Pada dasarnya pola hidup pada masa Praaksara terdiri atas dua macam, yaitu:

##### a) Nomaden

Nomaden adalah pola hidup dimana manusia purba pada saat itu hidup berpindah-pindah atau menjelajah. Mereka hidup dalam komunitas-komunitas kecil dengan mobilitas tinggi di suatu tempat. Mata pencahariannya adalah berburu dan mengumpulkan makanan dari alam (Food Gathering)

##### b) Sedenter

Sedenter adalah pola hidup menetap, yaitu pola kehidupan dimana manusia sudah terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat. Mata pencahariannya bercocok tanam serta sudah mulai mengenal norma dan adat yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan

Pola hunian manusia purba memiliki dua karakter khas, yaitu:

##### a) Kedekatan dengan sumber air

Air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup terutama manusia. Keberadaan air pada suatu lingkungan sebagai tempat bertemunya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuhan. Air memberikan kesuburan pada tanaman.

##### b) Kehidupan di alam terbuka

Manusia purba mempunyai kecenderungan hidup untuk menghuni sekitar aliran sungai. Mereka beristirahat misalnya di bawah pohon besar dan juga membuat atap dan sekat tempat istirahat itu dari daun-daun. Kehidupan di sekitar sungai itu menunjukkan pola hidup manusia purba di alam terbuka.

#### 2) Mengetahui Api

Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi penemuan api diperkirakan ditemukan pada 400.000 tahun yang lalu. Pertama kali api dikenal adalah pada zaman purba yang secara tidak sengaja mereka melihat petir yaitu

cahaya panas dilangit yang menyambar pohon-pohon disekitarnya, sehingga api itu pun muncul membakar pohon-pohon itu.

Dalam menemukan api, manusia purba membutuhkan proses yang sangat panjang. Proses tersebut dikenal dengan trial and error, yaitu seseorang yang mencoba sesuatu tanpa tahu petunjuk atau cara kerjanya sehingga banyak mengalami kegagalan dan mereka akan terus mencoba walaupun gagal sampai mereka menemukan hasil yang mereka inginkan.

Setelah mengalami banyak kegagalan, akhirnya cara membuat apipun ditemukan. Caranya dengan membenturkan dua buah batu atau dengan menggesekkan dua buah kayu, sehingga akan menimbulkan percikan api yang kemudian bisa kita gunakan pada ranting atau daun kering yang kemudian bisa menjadi sebuah api.

Api memperkenalkan manusia pada teknologi memasak makanan dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu. Selain itu api juga berfungsi untuk menghangat badan, sumber penerangan, dan sebagai senjata untuk menghalau binatang buas yang menyerang.

Melalui pembakaran juga manusia dapat menaklukan alam, seperti membuka lahan untuk garapan dengan cara membakar hutan. Kebiasaan bertani dengan cara menebang lalu membakar dikenal dengan nama *slash and burn*. Ini adalah kebiasaan pada masa kuno yang berkembang sampai sekarang.

b. Hasil Kebudayaan Masyarakat Pra Aksara

1) Paleolitik

Kehidupan manusia Praaksara masa paleolitik berlangsung sekitar 1,9 juta-10.000 tahun yang lalu. Bukti-bukti peninggalan masa ini terekam dalam sisa-sisa peralatan yang sering disebut *artefak*. Di Indonesia tradisi pembuatan alat pada masa Paleolitik dikenal 3 macam bentuk pokok, yaitu tradisi kapak perimbas-penetak (*chopper chopping-tool complex*), tradisi serpih-bilah (*flake-blade*), dan alat tulang-tanduk (*Ngandong Culture*) (Heekeren 1972).

Tradisi kapak perimbas-penetak yang ditemukan di Indonesia kemudian terkenal dengan nama *budaya Pacitan*, dan dipandang sebagai tingkat perkembangan budaya batu yang terawal di Indonesia. Alat budaya Pacitan dapat digolongkan dalam beberapa jenis utama yaitu kapak perimbas (*chopper*), kapak penetak (*chopping-tool*), pahat genggam (*proto hand-adze*),

kapak genggam awal (*proto hand-axe*), kapak genggam (*hand-axe*), dan serut genggam (*scraper*).

Tradisi kapak perimbas, di dalam konteks perkembangan alat-alat batu seringkali ditemukan bersama-sama dengan tradisi alat serpih. Bentuk alat serpih tergolong sederhana dengan kerucut pukul (*bulbus*) yang jelas menonjol dan dataran pukul (*striking platform*) yang lebar dan rata.

Seperti diketahui bahwa hakekat data paleolitik di Indonesia kebanyakan ditemukan di permukaan tanah. Hal ini menyebabkan belum ada yang dapat menjelaskan tentang siapa pendukung dan apa fungsi alat-alat batu itu secara menyakinkan. Meskipun demikian menurut Movius, manusia yang diduga sebagai pencipta dan pendukung alat-alat batu ini adalah manusia *Pithecanthropus*, yang bukti-buktinya ditemukan dalam satu konteks dengan lapisan yang mengandung fosil-fosil *Pithecanthropus pekinensis* di gua Chou-kou-tien di Cina (Movius, 1948: 329-340, Soejono 1984).

Bukti peninggalan alat paleolitik menggambarkan bahwa kehidupan manusia pada masa ini sangat bergantung kepada alam lingkungannya. Daerah yang diduduki manusia dapat memberikan cukup persediaan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Mereka hidup secara berpindah-pindah (nomaden) sesuai dengan batas-batas kemungkinan memperoleh makanan. Suatu upaya penting yang mendominasi aktivitas hidupnya adalah subsistensi. Segala daya manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan makan.

Manusia masa Paleolitik hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Besarnya kelompok ditentukan oleh besarnya daerah dan hasil perburuan. Jika penduduk suatu daerah melebihi jumlah optimal, maka sebagian dari kelompok ini memisahkan diri dengan cara migrasi ataupun mungkin dilakukan infantisida (membunuh bayi sesaat setelah dilahirkan) untuk membatasi besarnya populasi.

Dalam kehidupan masa Paleolitik ini secara tidak langsung terjadi pembagian kerja berdasarkan perbedaan seks atau umur. Kaum lelaki bertugas mencari makan dengan berburu binatang, sedang kaum perempuan tinggal di rumah mengasuh anak sembari meramu makanan. Bahkan setelah api ditemukan, maka peramu menemukan cara memanasi makanan. Sementara itu pada masa ini belum ditemukan bukti adanya kepercayaan atau religi dari manusia

pendukungnya. Manusia purba hidup berkelompok sebagai bagian peduli sosial tetapi mereka sebagai pribadi yang mandiri dan pekerja keras.

## 2) Mesolitik

Kehidupan manusia Praaksara masa mesolitik diperkirakan berlangsung sejak akhir plestosen atau sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat di Indonesia yaitu tradisi serpih-bilah (Toala Culture), tradisi alat tulang (Sampung Bone Culture), dan tradisi kapak genggam Sumatera (Sumatralith). Ketiga tradisi alat ini ditemukan tidak berdiri sendiri, melainkan seringkali unsur-unsurnya bercampur dengan salah satu jenis alat lebih dominan daripada lainnya.

Tradisi serpih-bilah secara tipologis dapat dibedakan menjadi pisau, serut, lancipan, mata panah, dan mikrolit. Tradisi serpih terutama berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Sulawesi Selatan, yang sebagian pada masa tidak lama berselang masih didiami oleh suku bangsa Toala, sehingga dikenal sebagai budaya Toala (Heekeren 1972). Sementara industri tulang Sampung tersebar di situs-situs gua di Jawa Timur. Kelompok budaya ini memperlihatkan dominasi alat tulang berupa sudip dan lancipan. Temuan lain berupa alat-alat batu seperti serpih-bilah, batu pipisan atau batu giling, mata panah, serta sisa-sisa binatang. Sedangkan tradisi *Sumatralith* banyak ditemukan di daerah Sumatera, khususnya pantai timur Sumatera Utara. Situs-situs di daerah ini berupa bukit-bukit kerang.

Bukti peninggalan alat mesolitik menggambarkan bahwa corak penghidupan yang menggantungkan diri kepada alam masih berlanjut. Hidup berburu dan mengumpulkan makanan masih ditemukan, namun sudah ada upaya pengenalan awal tentang hortikultur yang dilakukan secara berpindah. Masyarakat mulai mengenal pola kehidupan yang berlangsung di gua-gua alam (*abris sous roche*) dan di pantai (*kjokkenmoddinger*) yang tidak jauh dari sumber bahan makanan.



Gambar 7. Kjekkenmoddinger

Suatu

sistem penguburan di dalam gua (antara lain budaya Sampung) dan bukit Kerang (Sumatera Utara) sebagai bukti awal penguburan manusia di Indonesia, serta lukisan dinding gua dan dinding karang (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua) yang merupakan ekspresi rasa estetik dan religius, melengkapi bukti kegiatan manusia pada masa ini. Bahan zat pewarna merah, hitam, putih, dan kuning digunakan untuk bahan melukis cap-cap tangan, manusia, manusia, binatang, perahu, matahari, dan lambang-lambang.



Gambar 8 Gambar Lukisan Tangan



Gambar 9 Gambar Lukisan Tangan di Gua

Sumber: Buku Siswa Sejarah Kelas X SMA (hal.66)

Arti dan maksud lukisan dinding gua ini masih belum jelas pada umumnya tulisan itu menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan dan harapan hidup. Lukisan tersebut bukanlah sekedar dekorasi atau kegemaran seni semata-mata melainkan bermakna lebih mendalam lagi yaitu menyangkut aspek kehidupan berdasarkan kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang ada di alam sekitarnya. Adanya penguburan dan lukisan dinding gua merupakan bukti berkembangnya corak kepercayaan di kalangan masyarakat Praaksara.

### 3) Neolitik

Bukti yang didapat dari masa neolitik terutama berupa berbagai jenis batu yang telah dipersiapkan dengan baik. Kemahiran mengupam alat batu telah melahirkan jenis alat seperti beliung persegi, kapak lonjong, alat obsidian, mata panah, pemukul kulit kayu, gerabah, serta perhiasan berupa gelang dari batu dan kerang.

Beliung persegi mempunyai bentuk yang bervariasi dan persebaran yang luas terutama di Indonesia bagian barat. Beliung tersebut terbuat dari batu rijang, kalsedon, agat, dan jaspis. Sementara kapak lonjong tersebar di Indonesia bagian timur dan diduga lebih tua dari beliung persegi (Heekeren 1972). Gerabah yang merupakan unsur paling banyak ditemukan pada situs-situs neolitik memperlihatkan pembuatan teknik tatap. Bentuk gerabah antara lain berupa periuk dan cawan yang memiliki slip merah dengan hias gores dan tera bermotifkan garis lurus dan tumpal. Sedangkan alat pemukul kulit kayu banyak ditemukan di Sulawesi dan Kalimantan. Demikian pula mata panah yang sering dihubungkan dengan budaya neolitik, terutama ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi.

Kebudayaan Neolitik yang berupa kapak persegi dan kapak lonjong yang tersebar ke Indonesia tidak datang/menyebarkan dengan sendirinya, tetapi terdapat manusia pendukungnya yang berperan aktif dalam rangka penyebaran kebudayaan tersebut. Manusia pendukung yang berperan aktif dalam rangka penyebaran kebudayaan itulah merupakan suatu bangsa yang melakukan perpindahan/imigrasi dari daratan Asia ke Kepulauan Indonesia bahkan masuk ke pulau-pulau yang tersebar di Lautan Pasifik.

Bangsa yang bermigrasi ke Indonesia berasal dari daratan Asia tepatnya Yunan Utara bergerak menuju ke Selatan memasuki daerah Hindia Belakang

(Vietnam)/Indochina dan terus ke Kepulauan Indonesia, dan bangsa tersebut adalah:

- 1) Bangsa Melanesia atau disebut juga dengan Papua Melanosoide yang merupakan rumpun bangsa Melanosoide/Ras Negroid. Bangsa ini merupakan gelombang pertama yang bermigrasi ke Indonesia.
- 2) Bangsa Melayu yang merupakan rumpun bangsa Austronesia yang termasuk golongan Ras Malayan Mongoloid. Bangsa ini melakukan perpindahan ke Indonesia melalui dua gelombang yaitu:
  - a) Gelombang pertama tahun 2000 SM, menyebar dari daratan Asia ke Semenanjung Melayu, Indonesia, Philipina dan Formosa serta Kepulauan Pasifik sampai Madagaskar yang disebut dengan Proto Melayu. Bangsa ini masuk ke Indonesia melalui dua jalur yaitu Barat dan Timur, dan membawa kebudayaan Neolithikum (Batu Muda).
  - b) Gelombang kedua tahun 500 SM, disebut dengan bangsa Deutro Melayu. Bangsa ini masuk ke Indonesia membawa kebudayaan logam (perunggu). Manusia masa neolitik sudah tidak lagi menggantungkan hidupnya pada alam, tetapi sudah menguasai alam lingkungan sekitarnya serta aktif membuat perubahan. Masyarakat mulai mengembangkan penghidupan baru berupa kegiatan bercocok tanam sederhana dengan sistem *slash and burn*, atau terjadi perubahan dari *food gathering* ke *food producing*. Berbagai macam tumbuhan dan hewan mulai dijinakkan dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, kegiatan berburu, dan menangkap ikan masih terus dilakukan.

Masyarakat masa neolitik mulai menunjukkan tanda-tanda cara hidup menetap di suatu tempat, berkelompok membentuk perkampungan-perkampungan kecil. Di masa ini kelompok manusia sudah lebih besar, karena pertanian dan peternakan dapat memberi makan penduduk dalam jumlah yang lebih besar. Pada masa ini diperkirakan telah muncul bentuk perdagangan yang bersifat barter. Barang yang dipertukarkan adalah hasil pertanian ataupun kerajinan tangan. Adanya penemuan-penemuan baru ini menyebabkan masa ini oleh v. Gordon Childe (1958) sering disebut sebagai masa *Revolusi Neolitik*, karena kegiatan ini menunjukkan kepada kita adanya perubahan cara hidup yang kemudian mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya manusia.



Gambar 10 Kapak Persegi Masa Neolitikum

Sumber: <https://vdokumen.com/zaman-neolitikum.html>

Pengembangan konsep kepercayaan pada masa neolitik mulai memainkan peranan penting. Konsep kepercayaan ini kemudian diabadikan dengan mendirikan bangunan batu besar. Kegiatan kepercayaan seperti ini dikenal dengan nama *tradisi megalitik*. R. Von Heine Geldern (1945) menggolongkan tradisi megalitik dalam 2 tradisi, yaitu megalitik tua yang berkembang pada masa neolitik (2500-1500 SM) dan megalitik muda yang berkembang dalam masa paleometalik (1000 SM – abad I M). Megalitik tua menghasilkan bangunan yang disusun dari batu besar seperti *menhir*, *dolmen*, undak batu, limas berundak, pelinggih, patung simbolik, tembok batu, dan jalan batu.

Pengertian tentang bangunan megalitik tidak selalu diartikan sebagai suatu bangunan yang dibuat dari batu besar dan berasal dari masa Praaksara. Pengertian di atas tidak terlalu mutlak. Bahkan F.A. Wagner (1962) dalam Soejono (1984) mengatakan bahwa pengertian monumen besar (megalitik) tidak mesti diartikan sebagai "batu besar", akan tetapi objek-objek batu lebih kecil dan bahan-bahan lain seperti kayu, bahkan tanpa monumen atau objek sama sekalipun dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi megalitik bila benda-benda itu jelas dipergunakan untuk tujuan sakral tertentu yakni pemujaan arwah nenek moyang. Dengan demikian maksud utama dari pendirian bangunan megalitik tersebut tidak luput dari latar belakang pemujaan nenek

moyang, pengharapan kesejahteraan bagi yang masih hidup, dan kesempurnaan bagi si mati. Segi kepercayaan dan nilai-nilai hidup masyarakat ini kemudian berlanjut dan berkembang pada masa logam awal (paleometalik).

#### 4) *Paleometalik* (Logam awal)

Masa paleometalik merupakan masa yang mengandung kompleksitas, baik dari segi materi maupun alam pikiran yang tercermin dari benda buatanya. Perbendaharaan masa paleometalik memberikan gambaran tentang kemajuan yang dicapai manusia pada masa itu, terutama kemajuan di bidang teknologi. Dalam masa paleometalik teknologi berkembang lebih pesat sebagai akibat dari tersusunnya golongan-golongan dalam masyarakat yang dibebani pekerjaan tertentu.

Pada masa ini teknologi pembuatan alat jauh lebih tinggi tingkatnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal tersebut dimulai dengan penemuan baru berupa teknik peleburan, pencampuran, penempaan, dan pencetakan jenis-jenis logam. Penemuan logam merupakan bukti kemajuan pyrotechnology karena manusia telah mampu menghasilkan temperatur yang tinggi untuk dapat melebur bijih logam.

Atas dasar temuan arkeologis, Indonesia mengenal alat-alat yang dibuat dari perunggu, besi, dan emas. Benda-benda perunggu di Indonesia ditemukan tersebar di bagian barat dan timur. Hasil utama benda perunggu pada masa paleometalik ini meliputi nekara perunggu, kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, perhiasan perunggu, dan benda perunggu lainnya. Sedangkan benda-benda besi yang ditemukan antara lain mata kapak, mata pisau, mata sabit, mata tembilang, mata pedang, mata tombak, dan gelang besi. Pada prinsipnya teknik pengerjaan artefak logam ini ada dua macam, yakni teknik tempa dan teknik cetak. Proses pencetakannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung ialah dengan menuang logam yang sudah mencair langsung ke dalam cetakan, dan secara tidak langsung ialah dengan membuat model terlebih dahulu, dari model ini kemudian dibuat cetakannya. Cara yang kedua ini disebut dengan *acire perdue* atau lilin hilang sementara itu tipe-tipe cetakan yang digunakan dapat berupa cetakan tunggal atau cetakan terbuka, cetakan setangkup (*bivalve mould*), dan cetakan ganda (*piece mould*).

Pada masa ini dihasilkan pula gerabah yang menunjukkan perkembangan yang lebih meningkat. Gerabah tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diperlukan dalam upacara penguburan baik sebagai bekal kubur maupun tempayan kubur. Sementara itu benda-benda temuan lainnya berupa perhiasan seperti hiasan dari kulit kerang, tulang, dan manik-manik.

Kemahiran teknik yang dimiliki manusia masa paleometalik ini berhubungan dengan tersusunnya masyarakat yang menjadi makin kompleks, dimana perkampungan sudah lebih besar. Pembagian kerja makin ketat dengan munculnya golongan yang melakukan pekerjaan khusus (undagi). Pertanian dengan sistem persawahan mulai dikembangkan dengan menyempurnakan alat pertanian dari logam, pengolahan tanah, dan pengaturan air sawah. Hasil pertanian ini selain disimpan juga diperdagangkan ke tempat lain bersama nekara perunggu, moko, perhiasan, dan sebagainya. Peranan kepercayaan dan upacara-upacara religius sangat penting pada masa paleometalik. Kegiatan-kegiatan dalam masyarakat dilakukan terpimpin, dan ketrampilan dalam pelaksanaannya makin ditingkatkan.

Pada masa ini kehidupan spiritual yang berpusat kepada pemujaan nenek moyang berkembang secara luas. Demikian pula kepada orang yang meninggal diberikan penghormatan melalui upacara penguburan dengan disertai bekal kubur. Penguburan dapat dilakukan dalam tempayan, tanpa wadah dalam tanah, atau dengan berbagai kubur batu melalui upacara tertentu yang mencapai puncaknya dengan mendirikan bangunan batu besar. Tradisi inilah yang kemudian dikenal sebagai tradisi megalitik muda. Tradisi megalitik muda yang berkembang dalam masa paleometalik telah menghasilkan bangunan batu besar berupa peti kubur batu, kubur *dolmen*, *sarkofagus*, *kalamba*, *waruga*, dan batu Kandang. Di tempat kuburan semacam itu biasanya terdapat beberapa batu besar lainnya sebagai pelengkap pemujaan nenek moyang seperti *menhir*, patung nenek moyang, batu saji, lumpang batu, ataupun batu dakon. Pada akhirnya kedua tradisi megalitik tua dan muda tersebut bercampur, tumpang tindih membentuk variasi lokal, bahkan pada perkembangan selanjutnya bercampur dengan unsur budaya Hindu, Islam, dan kolonial.

### 7. Budaya Pra Aksara yang Masih Ada Hingga Saat Ini

Perwujudan kebudayaan pra aksara adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Di Indonesia, masih banyak terdapat peninggalan kebudayaan dari zaman prasejarah yang masih bisa dijumpai bahkan masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sisa-sisa dari kebudayaan pra aksara yang paling mudah dijumpai maupun diamati berupa benda, corak kehidupan sosial-ekonomi, dan sistem kepercayaan. Sisa-sisa kebudayaan pra aksara tersebut pada dasarnya masih ada dan masih memiliki kegunaan bagi masyarakat, bahkan ada yang beberapa di antaranya mengalami perkembangan (fungsi dan bentuk). Sisa-sisa kebudayaan pra aksara tersebut diantaranya sebagai berikut.

- a) Alat-alat dari Batu. Alat-alat batu yang lahir dan berkembang sejak jaman pra aksara sebenarnya masih ada di Indonesia. Akan tetapi alat-alat batu yang ada telah mengalami perkembangan bentuk dan fungsi. Beberapa alat tersebut adalah cobek batu dan lesung batu.
- b) Gerabah. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk menjadi suatu obyek dengan menggunakan tangan dan kemudian dibakar. Gerabah diperkirakan telah ada sejak zaman manusia purba. Di situs-situs bersejarah, telah ditemukan banyak gerabah kuno yang berfungsi sebagai perkakas rumah tangga. Dahulu gerabah yang dibuat oleh manusia tidak memiliki corak khusus, walaupun ada hanya bercorak sederhana, akan tetapi sekarang gerabah memiliki bentuk dan corak yang beragam. Selain itu, sekarang ini gerabah tidak hanya digunakan sebagai perkakas rumah tangga, namun ada juga yang berfungsi sekedar hanya sebagai penghias ruangan.
- c) Motif Batik. Batik sebagai warisan budaya dunia memiliki corak dan motif yang beragam, namun ternyata motif yang ada sekarang ini sebenarnya merupakan pengembangan dari motif yang ada sejak jaman pra aksara. Dulu motif tersebut kebanyakan hanya digunakan untuk menghias gerabah dari tanah liat saja, akan tetapi motif sederhana (ulir, bulatan, garis, dll) kini telah berkembang dan menjadi ciri khas dari suatu kain batik.

- d) Sistem Kepercayaan. Animisme dan dinamisme merupakan kepercayaan (agama) yang dianut oleh masyarakat pra aksara. Walaupun Indonesia telah memiliki agama pokok, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat Indonesia yang percaya bahwa arwah leluhur dan benda disekitarnya memiliki pengaruh terhadap kehidupan mereka. Sebagai contoh adalah upacara pemakaman. Ada suku tertentu di Indonesia yang percaya bahwa ruh orang yang meninggal masih memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu, mereka melakukan upacara pemakaman dengan megah dan diiringi dengan ritual-ritual tertentu. Selain itu, ada juga masyarakat yang memakamkan seseorang di tempat-tempat tertentu (misal: tebing batu) sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah meninggal.

#### **D. Rangkuman**

1. Menurut Sartono Kartodirdjo, sejarah dibagi menjadi dua pengertian yakni: Pertama, sejarah dalam arti subjektif. Kedua, sejarah dalam arti objektif.
2. Sejarah sebagai ilmu adalah sebuah kumpulan fakta yang ada. Fakta tersebut diseleksi oleh Sejarawan untuk ditemukan validitasnya dan menurut perspektif masing-masing sejarawan. Fakta sejarah dapat menghasilkan penggambaran yang berbeda dari suatu peristiwa sejarah, hal tersebut didasarkan pandangan yang berbeda dari setiap sejarawan berdasarkan subjektifitasnya. Diperkuat dengan fakta bahwa sejarah memiliki objek, teori metode, generalisasi dan prediksi. Sejarah sebagai seni memerlukan beberapa bagian, intuisi, imajinasi, emosi dan gaya bahasa. Sejarah sebagai peristiwa hanya terjadi satu kali pada masa lampau. Orang masa kini mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa melalui bukti-bukti (*evidensi*) yang ditinggalkan. Kisah merupakan produk serangkaian kerja intelektual dari seorang sejarawan yang akan dimanifestasikan dalam tulisan sejarah (historiografi).
3. Metode penelitian sejarah meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik, interpretasi dan penulisan (historiografi).

4. Praaksara merupakan bagian dari periodisasi sejarah Indonesia dimana belum ditemukan sumber tertulis. Indonesia menjadi wilayah yang kaya akan temuan manusia purba, mulai dari masa plestosen sampai holosen. Beberapa diantaranya banyak ditemukan di wilayah pulau Jawa (beberapa di Flores dan Sulawesi Selatan). Temuan kerangka manusia purba di wilayah Pulau Jawa dengan ciri fisik yang berbeda menunjukkan adanya evolusi pada struktur lapisan tanah tempat penemuan tersebut. Dari ciri fisik manusia purba dapat diungkap keadaan social, pola hidup, hasil budaya dan teknologi yang digunakan saat itu.

## **Pembelajaran 2. Peradaban Hindu Budha dan Islam**

### **A. Kompetensi**

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 2. Peradaban Hindu, Buddha dan Islam yang akan dicapai pada pembelajaran ini, adalah guru P3K mampu;

1. Menganalisis peradaban Hindu-Buddha di Indonesia
2. Menganalisis peradaban Islam di Indonesia.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi.

Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 2. Peradaban Hindu-Buddha dan Islam adalah sebagai berikut;

1. Menganalisis Teori Masuknya Agama Hindu-Buddha ke Indonesia
2. Menganalisis Perkembangan Awal Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia
3. Menganalisis Kerajaan-kerajaan Bercorak Hindu-Buddha di Indonesia
4. Menganalisis Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia
5. Menganalisis Faktor-faktor yang memudahkan Islam berkembang di Indonesia
6. Menganalisis Bukti-bukti Masuknya Pengaruh Islam di Indonesia
7. Menganalisis Kerajaan Islam Awal di Indonesia

### **C. Uraian Materi**

#### **1. Teori Masuknya Agama Hindu-Budha ke Indonesia**

Masuknya pengaruh Hindu-Budha ke Indonesia masih menjadi sebuah perdebatan hingga kini. Beberapa alternatif hipotesa coba dikemukakan oleh beberapa pakar setelah memperhatikan beberapa fenomena dan fakta sejarah. Hipotesa-hipotesa ini kemudian mendapat dukungan dari beberapa pakar sejarah

kuna baik dalam maupun luar namun tidak sedikit yang menentang salah satu hipotesa tersebut.

Teori-teori tersebut adalah: *Teori pertama* yang dilontarkan adalah *teori Kstaria*, dimana para pengikutnya berpendapat bahwa agama Hindu dan Budha disebarluaskan melalui kolonisasi oleh para Ksatriya. *Teori yang kedua* adalah *Teori Waisya* dimana perdagangan dan perkawinan adalah salurannya, sedangkan *teori ketiga* adalah *Teori Brahmana* dimana mengemukakan peran para Brahmana dalam menyebarkan agama karena sifatnya yang rahasia. Sebuah teori menarik dikemukakan oleh van Leur yang menyatakan bahwa telah terjadi usaha oleh para Brahmana lokal mempelajari agama ini di India dan kemudian pulang untuk menyebarkannya, teori ini dikenal sebagai *Teori Arus Balik*. Ada satu teori yaitu Teori Sudra yang menganggap bahwa para sudra yang tinggal di Indonesia menjadi pelopor penyebaran agama ini. Teori Arus Balik segera mendapat tempat di hati para pakar sejarah kuna karena bersifat Indonesiasentris dan didukung dari beberapa intepretasi prasasti dan naskah.

## 2. Perkembangan Awal Pengaruh Hindu-Budha di Indonesia

Beberapa temuan memperlihatkan bahwa terjadi pergeseran konsep kekuasaan dan politik dari para penguasa lokal Indonesia. Model kesukuan dan hidup berkelompok kemudian berkembang menjadi konsep kemaharajaan denan segala atura dan keyakinan yang melekat padanya. Segeralah berbagai nama gelar dan jabatan yang berbau India digunakan dan bahkan kemudian dikembangkan oleh masyarakat penganut Hindu-Budha awal ini.

Konsep dewaraja (memuja dan menganggap raja memiliki sifat kedewaan) yang dianut ternyata efektif untuk membangun sebuah kemaharajaan yang mendasarkan kekuasaan mutlak pada diri seorang raja. Konsep ini kemudian juga berimbas pada keyakinan bahwa yang berhak menggantikan raja adalah keturunan raja itu sendiri yang juga dianggap sebagai titisan dewa di dunia. Sehingga pada perkembangan selanjutnya terjadi banyak permasalahan suksesi yang terkait denan pewaris yang amat banyak (Pada beberapa peristiwa suksesi terlihat bahwa raja pemberontak selain musuh bisa jadi sebenarnya masih terdapat pertalian saudara yang merupakan akibat politik perkawinan (ini diteruskan hingga Mataram Islam). Sebagai contoh pemberontakan Jayakatwang

yang merupakan musuh Kertanegara namun juga pewaris Singhasari dari pihak ibu).

### **3. Kerajaan Bercorak Hindu-Buddha di Indonesia**

#### **a. Kutai dan Tarumanegara**

Kerajaan Kutai yang terletak di Kalimantan Timur sampai saat ini dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia (Penemuan sumber sejarah berupa prasasti sampai saat ini menunjukkan bahwa 7 buah prasasti *yūpa* yang menginformasikan keberadaan sebuah kerajaan bernama Kutai memuat angka tahun tertua yaitu abad ke IV M. Pertanggalan relatif ini didapat dari perbandingan bentuk huruf yang dipahatkan dengan beberapa prasasti di India dan menunjukkan keserupaan yang mendekati perkembangan huruf pallawa sekitar akhir abad ke IV dan awal abad ke V (lihat Soemadio, 1993:31). Penemuan bukti berupa 7 buah prasasti berbentuk *yūpa*, yaitu tugu peringatan bagi sebuah upacara kurban. Prasasti ini berhuruf pallawa yang menurut bentuk dan jenisnya berasal dari abad IV M, sedangkan bahasanya adalah sansekerta yang tersusun dalam bentuk syair. Semuanya dikeluarkan atas titah seorang raja bernama Mūlawarmman.

Berdasarkan isi dari prasasti tersebut dapat diketahui silsilah raja-raja Kutai. Dimulai dengan raja Kunduṅga yang mempunyai anak bernama Aśwawarman, dan Mūlawarmman adalah seorang dari ketiga anaknya. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa pendiri keluarga kerajaan (*vaśakrttā*) adalah Aśwawarman, dan bukan Kunduṅga yang dianggap sebagai raja pertama. Kunduṅga bukan nama sansekerta, mungkin ia seorang kepala suku penduduk asli yang belum terpengaruh kebudayaan India, sedangkan Aśwawarman adalah nama yang berbau India. Disebut pula nama Aṅsuman yaitu dewa matahari di dalam agama Hindu yang dapat menunjukkan bahwa Mūlawarmman adalah penganut agama Hindu (Sumadio, 1993).

Prasasti ini juga memberikan informasi mengenai kehidupan masyarakat ketika itu, dimana sebagian penduduk hidup dalam suasana peradaban India. Sudah ada golongan masyarakat yang menguasai bahasa Sansekerta yaitu kaum Brahmana (pendeta) yang mempunyai peran penting dalam memimpin upacara keagamaan. Setiap *yūpa* yang didirikan oleh Mūlawarmman sebagai peringatan bahwa ia telah

memberikan korban besar-besaran dan hadiah-hadiah untuk kemakmuran negara dan rakyatnya. Sedangkan golongan lainnya adalah kaum ksatria yang terdiri atas kaum kerabat Mūlawarmman. Diluar kedua golongan ini adalah rakyat Kutai pada umumnya yang terdiri atas penduduk setempat, dan masih memegang teguh agama asli leluhur mereka.

Kerajaan Tārumanāgara berkembang kira-kira bersamaan dengan kerajaan Kutai pada abad V M, dan berlokasi di Jawa Barat dengan rajanya bernama Pūrṇawarman. Keberadaan kerajaan Tārumanāgara dapat diketahui melalui 7 buah prasasti batu yang ditemukan di daerah Bogor, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut adalah prasasti Ciaruteun, Jambu, Kebon Kopi, Tugu, Pasir Awi, Muara Cianten, dan Lebak. Prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sansekerta yang digubah dalam bentuk syair.

Agama yang melatari alam pikiran raja adalah agama Hindu. Hal ini dapat diketahui karena pada prasasti Ciaruteun terdapat lukisan 2 tapak kaki raja yang diterangkan seperti tapak kaki Wisnu. Pada prasasti Kebon Kopi ada gambar tapak kaki gajah sang raja yang disamakan sebagai tapak kaki gajah Airawata. Pada prasasti Tugu disebutkan penggalian 2 sungai terkenal di Punjab yaitu Candrabhaga dan Gomati. Maksud pembuatan saluran pada sungai ini diperkirakan ada hubungannya dengan usaha mengatasi banjir (Poerbatjaraka, 1952). Dalam prasasti Jambu dijumpai nama negara Tarumayam dan sungai Utsadana. Negara Tarumayam disamakan dengan Tarumanagara, sedangkan Utsadana identik dengan sungai Cisadane. Pada prasasti ini, Pūrṇawarman disamakan dengan Indra sebagai dewa perang serta memiliki sifat sebagai dewa matahari.

Selain 7 prasasti tersebut, di daerah ini juga ditemukan arca-arca rajasi dan disebutkan dalam prasasti Tugu serta memperlihatkan sifat Wisnu-Surya. Akan tetapi Stutterheim berpendapat bahwa arca tersebut adalah arca Siwa. Sedangkan arca Wisnu Cibuaya diduga mempunyai persamaan dengan langgam seni Palla di India Selatan dari abad VII-VIII M.

Dari bukti tersebut dapat dikatakan bahwa Jawa Barat telah menjadi pusat seni dan agama, dan sesuai pula denganberita Cina yang mengatakan bahwa pada abad VII M terdapat negara bernama To-lo-mo yang berarti Taruma. Dari

peninggalan ini pula dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh para penguasa setempat adalah agama Hindu aliran Wisnu. Bahkan raja dianggap sebagai titisan dewa Wisnu yang memelihara kehidupan rakyat agar makmur dan tenteram. Pembuatan dan penggalian 2 sungai untuk menahan banjir dan saluran irigasi menunjukkan bahwa masa itu sudah mengenal tatanan masyarakat agraris.

b. Śrīwijaya

Kerajaan Śrīwijaya merupakan sebuah kerajaan di Sumatra yang sudah dikenal pada abad VII M. Bukti keberadaan kerajaan Śrīwijaya adalah 6 prasasti yang ditemukan tersebar di Sumatra Selatan dan pulau Bangka. Prasasti tertua ditemukan di Kedukan Bukit (Palembang) berangka tahun 604 S (682 M) serta berhuruf pallawa dan berbahasa melayu kuno. Menurut Krom, prasasti ini dimaksudkan untuk memperingati pembentukan negara Śrīwijaya. Namun Moens berpendapat lain bahwa prasasti ini untuk memperingati kemenangan Śrīwijaya terhadap Malayu. Sementara Coedes (1964) menduga prasasti ini untuk memperingati ekspedisi Śrīwijaya ke daerah seberang laut yakni kerajaan Kamboja yang diperintah oleh Jayawarman. Sedangkan Boechari (1979) berpendapat bahwa prasasti ini untuk memperingati usaha penaklukan daerah sekitar Palembang oleh Dapunta Hyang dan pendirian ibukota baru atau ibukota kedua di tempat ini.

Prasasti lain yang penting adalah Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Pulau Bangka dan berangka tahun 608 S (686 M). Kata Śrīwijaya dijumpai pertama kali di dalam prasasti ini. Keterangan yang penting adalah mengenai usaha Śrīwijaya untuk menaklukkan bhumi Jawa yang tidak tunduk kepada Śrīwijaya. Coedes berpendapat bahwa pada saat prasasti ini dibuat, tentara Śrīwijaya baru saja berangkat untuk berperang melawan Jawa yaitu kerajaan Tārūma. Prasasti lain yang ditemukan di Palembang adalah prasasti Talang Tuo dan Telaga Batu. Sementara di Jambi ditemukan prasasti Karang Brahi dan di Lampung ditemukan prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini pada umumnya dipandang sebagai pernyataan kekuasaan Śrīwijaya.

Satu hal yang menjadi perdebatan bagi para ahli adalah lokasi Sriwijaya. Berdasarkan prasasti dan berita Cina, Coedes berpendapat bahwa Palembang

adalah lokasi . Pendapat ini mendapat dukungan dari Nilakanta Sastri, Poerbatjaraka, Slamet Mulyana, Wolters, dan Bronson. Namun Bosch dan Majumdar berpendapat bahwa Śrīwijaya harus dicari di pulau Jawa atau di daerah Ligor. Sementara Quaritch Wales dan Rajani menempatkan Śrīwijaya di Chaiya atau Perak. Berdasarkan rekonstruksi peta, berita Cina dan Arab, Moens sampai pada kesimpulan bahwa Śrīwijaya mula-mula berpusat di Kedah kemudian berpindah ke Muara Takus. Selanjutnya Soekmono melalui penelitian geomorfologi berkesimpulan bahwa Jambi sebagai pusat lokasi Śrīwijaya. Sedangkan Boechari berpendapat bahwa sebelum tahun 682 M ibukota Śrīwijaya ada di daerah Batang Kuantan, setelah tahun 682 M berpindah ke Mukha Upang di daerah Palembang (Sumadio, 1994). Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa secara geomorfologis pada awal masehi semenanjung malaya masih menyatu dengan pulau Bangka dan Belitung, serta Sumatra masih belum sebesar sekarang sehingga penempatan Palembang sebagai ibukota dapat beralasan karena berada di mulut botol selat malaka sehingga sebagai bandar dagang sangat strategis (Daldjoeni, 1984). Manguin secara arkeologis kemudian dapat memperlihatkan bahwa ibukota ini telah berpindah dari Palembang ke Jambi (Munoz, 2009)

Dari peninggalan prasasti dan berita Cina dapat diketahui kebijakan penguasa Śrīwijaya. Kerajaan Śrīwijaya adalah sebuah kerajaan maritim yang besar dan terlibat dalam perdagangan internasional. Śrīwijaya lebih mengembangkan suatu tradisi diplomasi dan kekuatan militer untuk melakukan gerakan ekspedisioner. Disamping prasasti-prasasti yang berisi pujian kepada dewa-dewa dan pelaksanaan suatu keputusan raja, sejumlah prasasti menunjukkan pada birokrasi dan berbagai aturan untuk menjamin ketenangan dalam negeri. Hubungan antara Śrīwijaya dengan negeri di luar Indonesia bukan hanya dengan Cina tapi juga dengan India. Sebuah prasasti raja Dewapaladewā dari Benggala (India) pada abad IX M menyebutkan tentang pendirian bangunan biara di Nalanda oleh raja Balaputradewā, raja Śrīwijaya yang menganut agama Budha. Hal ini didukung berita dari I-tsing yang mengatakan bahwa Śrīwijaya adalah pusat kegiatan agama Budha.

### c. Mataram Hindu

Kerajaan Mataram dikenal dari prasasti Canggal yang berasal dari halaman permandian di Gunung Wukir Magelang. Prasasti ini berhuruf pallawa dan berbahasa sansekerta, serta berangka tahun 654 S (732 M). Isinya adalah memperingati didirikannya sebuah lingga (lambang Siwā) oleh raja Sanjaya diatas bukit Kunjarākunjā di pulau Yawadwipā yang kaya akan hasil bumi.

Yawadwipa mula-mula diperintah oleh raja Sanna yang bijaksana. Pengganti Sanna yaitu raja Sanjaya, anak Sannaha, saudara perempuan raja Sanna. Ia adalah seorang raja gagah berani yang telah menaklukkan raja-raja di sekelilingnya dan raja yang ahli dalam kitab-kitab suci.

Mendirikan lingga adalah lambing mendirikan atau membangun kembali suatu kerajaan. Sanjaya memang dianggap Wamçakarta kerajaan Mataram. Hal ini juga terlihat dari prasasti para raja yang menggantikannya, misal prasasti dari Balitung yang memuat silsilah yang berpangkal dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Bahkan ada pula prasasti yang menggunakan tarikh Sanjaya.

Kecuali prasasti Canggal tidak ada prasasti lain dari Sanjaya, yang ada ialah prasasti-prasasti dari keluarga raja lain yaitu Syailendrawangsa. Istilah Syailendrawangsa dijumpai pertama kali di dalam prasasti Kalasan tahun 700 S (778 M). Prasasti ini ditulis dengan huruf pra-nagari dan berbahasa sansekerta. Isinya adalah pendirian bangunan suci bagi Dewi Tarā dan sebua biara bagi para pendeta oleh Maharaja Tejahpurna Pananḡkaran. Bangunan tersebut adalah Candi Kalasan di Yogyakarta. Rupa-rupanya keluarga Sanjaya ini terdesak oleh para Syailendra, tetapi masih mempunyai kekuasaan di sebagian Jawa Tengah. Meskipun demikian masih ada kerjasama antara keluarga Sanjaya dan Syailendra (Sumadio, 1994).

Tejahpurna Pananḡkaran adalah Rakai Pananḡkaran, pengganti Sanjaya, seperti nyata dari prasasti Mantiyasih yang dikeluarkan raja Balitung tahun 907 M. Prasasti ini bahkan memuat silsilah raja-raja yang mendahului Balitung yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) *Rahyangta rumuhun ri Mdang ri Poh Pitu,*
- 2) *Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya,*
- 3) *Çri Maharaja Rakai Pananḡkaran,*
- 4) *Çri Maharaja Rakai Panunggalan,*

- 5) *Çri Maharaja Rakai Warak,*
- 6) *Çri Maharaja Rakai Garung,*
- 7) *Çri Maharaja Rakai Pikatan,*
- 8) *Çri Maharaja Rakai Kayuwangi,*
- 9) *Çri Maharaja Rakai Watuhumalang,*
- 10) *Çri Maharaja Rakai Watukuro Dyah Balitung Dharmodaya Mahaçambu.*

Jelaslah bahwa pemerintah Sanjayawangsa berlangsung terus di samping pemerintahan Syailendrawangsa. Keluarga Sanjaya beragama Hindu memuja Siwa dan keluarga Syailendra beragama Budha Mahayana yang sudah cenderung kepada Tantrayana. Demikian juga ada kecenderungan candi-candi dari abad VIII dan IX yang ada di Jawa Tengah bagian utara bersifat Hindu (Candi Dieng, Gedongsongo), sedangkan yang ada di Jawa Tengah bagian selatan bersifat Budha (candi Kalasan, Borobudur)., maka daerah kekuasaan keluarga Sanjaya adalah bagian utara Jawa Tengah dan Syailendra adalah bagian selatan Jawa Tengah (Soekmono, 1985).

Pada pertengahan abad IX kedua wangsa ini bersatu melalui perkawinan Rakai Pikatan dan Pramodawardani, raja puteri dari keluarga Syailendra. Dalam masa pemerintahan Syailendra banyak bangunan suci didirikan untuk memuliakan agama Budha, antara lain candi Kalasan, Sewu, dan Borobudur. Rakai Pikatan dari wangsa Sanjaya telah pula mendirikan bangunan suci agama Hindu seperti candi Loro Jonggrang di Prambanan.

Mengenai wangsa raja-raja yang berkuasa di kerajaan Mataram ini terdapat dua pendapat yang berbeda. Casparis (1956) berpendapat bahwa sejak pertengahan abad VIII ada 2 wangsa raja yang berkuasa yaitu wangsa Sanjaya yang beragama Siwa dan para pendatang baru dari Funan yang menamakan dirinya wangsa Syailendra yang beragama Budha Mahayana. Pendapat Casparis tersebut ditentang oleh Poerbatjaraka. Menurut Poerbatjaraka (1956), hanya ada satu wangsa saja yaitu wangsa Syailendra yang merupakan orang Indonesia asli dan anggota-anggotanya semula menganut agama Siwa, tetapi sejak pemerintahan Rakai Panangkaran menjadi penganut agama Budha Mahayana, untuk kemudian pindah lagi menjadi penganut agama Siwa sejak pemerintahan Rakai Pikatan.

Pengganti Pikatan adalah Rakai Kayuwangi yang memerintah tahun 856-886 M. Pengganti Kayuwangi adalah Watuhumalang yang memerintah tahun 886-898 M. Kemudian menyusullah raja Balitung (Rakai Watukura) yang memerintah tahun 898-910 M. Prasastinya terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga dapat disimpulkan ia adalah raja pertama yang memerintah kedua bagian pulau Jawa itu, mungkin kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur telah ia taklukkan, mengingat ia dalam pemerintahan di Jawa Tengah ada sebutan Rakryan Kanuruhan yaitu salah satu jabatan tinggi langsung di bawah raja.

Raja-raja sesudah Balitung adalah Daksa (910-919 M), Tulodong (919-924 M), kemudian Wawa (924-929 M). Sejak 929 M prasasti hanya didapatkan di Jawa Timur dan yang memerintah adalah seorang raja dari keluarga lain yaitu Sindok dari Isanawangsa. Beberapa teori dikemukakan di antaranya mengemukakan bahwa perpindahan itu karena terjadi perang saudara, namun ada pula teori dari van Beumellen yang menyatakan bahwa perpindahan tersebut secara geomorfologis diakibatkan sebuah bencana hebat letusan gunung merapi di Jawa Tengah sehingga menimbulkan mahapralaya.

Sindok dianggap sebagai pendiri dinasti baru di Jawa Timur yaitu Isanawangsa. Istilah wangsa Isana dijumpai dalam prasasti Pucangan tahun 963 S (1041 M) yang menyebut gelar Sindok yaitu Sri Isanattungga. Rupanya kerajaan yang baru itu tetap bernama Mataram, sebagaimana tertera dalam prasasti Paradah 865 S (943 M) dan prasasti Anjukladang 859 S (937 M).

Kedudukan Mpu Sindok dalam keluarga raja Mataram memang dipermasalahkan. Poerbatjaraka berpendapat bahwa Sindok naik tahta karena perkawinannya dengan Pu Kbi, anak Wawa. Dengan demikian Pu Sindok adalah menantu Wawa, Stutterheim membantah pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa Pu Sindok adalah cucu Daksa. Bahkan Boechari (1962) mengemukakan bahwa Pu Sindok pernah memegang jabatan Rakai Halu dan Rakryan Mapatih I Hino yang menunjukkan bahwa ia pewaris tahta kerajaan yang sah, siapapun ayahnya. Jadi tidak perlu harus kawin dengan putri mahkota untuk dapat menjadi raja.

Pu Sindok memerintah mulai tahun 929-948 M. Ia meninggalkan banyak prasasti yang sebagian besar berisi penetapan Sima. Dari prasasti tersebut dapat diketahui bahwa agama Sindok adalah Hindu. Selama Sindok berkuasa terhimpun pula

sebuah kitab suci agama Budha yaitu Sang Hyang Kamahayanikan yang menguraikan ajaran dan ibadah agama Budha-Tantrayana.

Pengganti-pengganti Sindok dapat diketahui pula dari prasasti Pucangan yang dikeluarkan Airlangga. Demikianlah Sindok digantikan anak perempuannya Sri Isana Tunggalwajaya yang bersuamikan raja Sri Lokapala. Mereka berputra Sri Makutawangsawarddhana. Mengenai kedua raja pengganti Sindok tak ada suatu keterangan lain lagi, kecuali bahwa Makutawangsawarddhana mempunyai seorang anak perempuan bernama Gunapriyadharmmapatni atau Mahendradatta yang kawin dengan Udayana dari keluarga Warmadewa dan memerintah di Bali. Mereka mempunyai anak bernama Airlangga.

Pengganti Makutawangsawarddhana adalah Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama. Kemungkinan besar ia adalah anak Makutawangsawarddhana, jadi saudara Mahendradatta yang menggantikan ayahnya duduk di atas tahta kerajaan Mataram. Dalam masa pemerintahan Dharmawangsa, kitab Mahabharata disadur dalam bahasa Jawa Kuno. Sementara itu dalam bidang politik, Dharmawangsa berusaha keras untuk menundukkan Sriwijaya yang saat ini merupakan saingan berat karena menguasai jalur laut India-Indonesia-Cina.

Politik Dharmawangsa Teguh berambisi meluaskan kekuasaannya ternyata mengalami keruntuhan. Prasasti Pucangan memberitakan tentang keruntuhan itu. Disebutkan bahwa tak lama sesudah perkawinan Airlangga dengan putri Teguh, kerajaan ini mengalami pralaya pada tahun 939 S (1017 M), yaitu pada waktu raja Wurawari menyerang dari Lwaram. Banyak pembesar yang meninggal termasuk Dharmawangsa Teguh.

Prasasti Pucangan menyebutkan bahwa Dharmawangsa Airlangga dapat menyelamatkan diri dari serangan Haji Wurawari, dan masuk hutan hanya diikuti abdinya yang bernama Narottama. Selama di hutan Airlangga tetap melakukan pemujaan terhadap dewa-dewanya. Maka pada tahun 941 S (1019 M) ia direstui para pendeta Siwa, Budha, dan Mahabrahmana sebagai raja dengan gelar Rake Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramottunggadewa (Soekmono, 1973).

Pada masa pemerintahannya, raja Airlangga telah banyak mengeluarkan prasasti. Hal ini dikarenakan raja ini memerlukan pengesahan atau legitimasi atas

kekuasaannya dengan menciptakan leluhur (wangsakara). Salah satu prasasti yang penting adalah prasasti Pucangan atau Calcutta. Prasasti ini dikeluarkan Airlangga pada tahun 963 S (1041 M). prasasti ini memuat silsilah raja Airlangga yang dimulai dari raja Sri Isana Tungga atau Pu Sindok. Dengan silsilah ini, Airlangga ingin memperkokoh dan melegitimasi kedudukannya sebagai pewaris sah atas tahta kerajaan Dharmawangsa Teguh dan benar-benar masih keturunan Pu Sindok.

Sebagian besar masa pemerintahan Airlangga dipenuhi dengan peperangan menaklukkan kembali raja-raja bawahannya, antara lain menyerang Haji Wengker, Haji Wurawari, dan raja Hasin. Di bidang karya sastra, pada masa ini telah dihasilkan kitab Arjunawidaha yang merupakan gubahan Pu Kanwa.

Pada masa pemerintahan Airlangga, yang menjabat kedudukan Rakryan Mahamantri I Hino (putra mahkota kerajaan) adalah seorang putrid bernama Sri Sanggrama Wijaya Dharmmaprasadottunggadewi, seperti disebutkan dalam prasasti Cane, Munggut, dan Kamalagyan. Akan tetapi dalam prasasti pucangan dan Pandan, yang menjabat Hino adalah seorang laki-laki bernama Sri Samarawijaya Dhamasuparnnawahana Tguh Uttunggadewa, anak laki-laki Dharmawangsa Teguh yang selamat dari pralaya menuntut haknya atas tahta kerajaan Mataram. Selanjutnya Sanggramawijaya lebih memilih kehidupan sebagai pertapa di Kambang Sri karena tidak menginginkan adanya perebutan kekuasaan yang mengarah pada perpecahan. Diperkirakan ada adik Sanggramawijaya yang tidak dapat menerima keputusan itu lalu bermaksud merebut kekuasaan.

Untuk menghindari perang saudara maka Airlangga terpaksa membagi kerajaan menjadi dua. Samarawijaya sebagai pewaris yang sah karena ia anak Dharmawangsa Teguh mendapatkan kerajaan Pangjalu dengan ibukota yang lama yaitu Dahana Pura. Sedangkan anak Airlangga sendiri entah Sanggramawijaya entah adiknya mendapat bagian kerajaan Janggala yang beribukota di Kahuripan.

d. Kadiri dan Janggala

Berdasarkan pembagian kerajaan tersebut, selanjutnya Boechari (1968) menyebut bahwa raja pertama Pangjalu yang berkedudukan di Daha adalah

Sanggramawijaya yang kemudian diambil alih oleh Samarawijaya. Sedangkan kerajaan Janggala yang berkedudukan di Kahuripan rajanya bernama Mapanji Garasakan, yang tidak lain adalah anak Airlangga, adik Sanggramawijaya. Garasakan kemudian digantikan oleh Alanjung Ahyes, selanjutnya digantikan oleh Samarotsaha.

Tampaknya setelah 3 orang raja Janggala tersebut di atas dan setelah ada masa gelap selama kira-kira 60 tahun, yang muncul dalam sejarah adalah kerajaan Kediri dengan ibukotanya di Daha. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa temuan prasasti batu yang sebagian besar ada di daerah Kediri. Prasasti yang pertama adalah Prasasti Pandlegan tahun 1038 S (1117 M) yang dikeluarkan oleh raja Sri Bameswara. Prasasti ini berisi tentang anugerah raja Bameswara kepada penduduk desa Pandlegan (Boechari, 1968). Prasasti lain yang dikeluarkan Bameswara adalah prasasti Panumbangan (1042 S), Geneng (1050 S), Candi (1051 S), Besole (1051 S), Tangkilan (1052 S), dan Pagilitan (1056 S). Berdasarkan data prasasti yang ada dapat diketahui bahwa raja Bameswara memerintah antara tahun 1038-1056 S.

Setelah pemerintahan raja Bameswara, muncul raja lain bernama Jayabaya. Hanya 3 prasasti yang telah ditemukan dari raja ini yaitu prasasti Hantang (1057 S), Talang (1058 S), dan Jepun (1066 S) yang berisi tentang penetapan Sima. Cap kerajaannya berupa Narasingha. Pada masa pemerintahan Jayabaya telah digubah kakawin Bhatarayuddha pada tahun 1079 S (1157 M) oleh Mpu Sedah dan Mpu Panuluh.

Raja berikutnya adalah Sri Sarweswara. Dua prasastinya adalah prasasti Pandlegan II (1081 S) dan Kahyunan (1082 S). pada tahun 1169 M muncul raja Sri Aryswara. Hanya dua prasasti yang ditemukan dari raja ini yaitu prasasti Waleri (1091 S) dan prasasti Angin (1093 S). cap kerajaannya berupa Ganesa. Raja selanjutnya adalah Sri Kroncaryyadipa. Satu-satunya prasasti yang ditemukan adalah prasasti Jaring atau Gurit (1103 S). raja ini hanya memerintah kerajaan Kediri selama 4 tahun (1181-1184 M). kemudian dijumpai nama raja Kameswara yang memerintah Kediri antara tahun 1184-1194 M. Ada dua prasasti dari raja ini yaitu prasasti Semanding (1104 S) dan Ceker (1107 S). Pada masa pemerintahan Kameswara, seorang pujangga bernama Mpu Darmaja berhasil menggubah kitab Smaradhahana.

Raja Kadiri yang terakhir adalah Srengga atau Krtajaya. Raja ini memerintah antara tahun 1194-1222 M. Ada 6 prasasti dari raja ini yaitu prasasti Kemulan (1116 S), Palah (1119 S), Galunggung (1122 S), Biri (1124 S), Sumber Ringin Kidul (1126 S), dan Lawadan (1127 S). Lencana kerajaan Kadiri yang dipakai Kertajaya adalah *Srenggalanchana* (Prasasti Palah 1119 S atau 1197 M terletak di pelataran percandian Panataran di Blitar. Keberadaan candi ini ternyata merupakan sebuah bangunan kontinuitas yang digunakan dari masa Kadiri hingga Majapahit, dan mungkin merupakan candi kerajaan pada setiap masanya (Wahyudi, 2005).

Masa akhir kerajaan Kadiri dapat diketahui dari beberapa sumber tertulis. Kerajaan Kadiri runtuh pada tahun 1144 S (1222 M). Menurut Nagarakretagama (XL:3-4) Sri Ranggah Rajasa yang bertahta di Kutaraja, ibukota kerajaan Tumapel pada tahun 1144 S menyerang raja Kadiri yaitu raja Sri Krtajaya. Krtajaya kalah, kerajaan dihancurkan, dan ia melarikan diri ke gunung yang sunyi. Sedangkan menurut Pararaton, raja Kadiri bernama Dandang Gendis minta kepada para bhujangga Siwa dan Budha supaya menyembah kepadanya. Para bhujangga menolak lalu melarikan diri ke Tumapel berlindung pada Ken Angrok. Para bhujangga merestui Ken Angrok sebagai raja di Tumapel, kerajaannya bernama Singhasari dengan gelar Sri Ranggah Rajasa Bhatara Sang Amurwabhumi. Lalu ia menyerang Daha (Kadiri), dan raja Dandang Gendis dapat dikalahkan.

Dalam Nagarakretagama (XLIV:2) disebutkan pula dengan ditaklukkannya Daha tahun 1222 M oleh Ken Angrok dari Tumapel, maka bersatulah Janggala dan Kadiri sama-sama beraja di Tumapel (Singhasari). Kadiri tidak dihancurkan, tetapi tetap diperintah oleh keturunan raja Krtajaya dengan mengakui kepemimpinan Singhasari. Sejak tahun 1271 M Jayakatwang salah seorang keturunan Krtajaya memerintah di Glang-Glang.

e. Singhasari

Pada masa akhir kerajaan Kadiri, daerah Tumapel merupakan suatu daerah yang dikepalai oleh seorang akuwu bernama Tunggul Ametung. Daerah Tumapel ini termasuk dalam daerah kekuasaan raja Krtajaya (Dandang Gendis) dari Daha (Kadiri). Kedudukan Tunggul Ametung menjadi akuwu Tumapel berakhir setelah dibunuh oleh Ken Angrok, dan jandanya yang bernama Kendedes dikawininya.

Ken Angrok kemudian menjadi penguasa baru di Tumapel. Ken Angrok pula yang kemudian menaklukkan Dandang Gendis dari Kadiri, dan kemudian menjadi Maharaja di Singhasari.

Munculnya tokoh Ken Angrok ini kemudian menandai lahirnya wangsa baru yaitu Rajasawangsa atau Girindrawangsa. Wangsa inilah yang berkuasa di Singhasari dan Majapahit. Ken Angrok memerintah Singhasari sejak 1222-1227 M dan tetap berkedudukan di Tumapel atau secara resmi disebut Kutaraja. Pemerintahan Rajasa berlangsung aman dan tentram.

Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Angrok memperoleh 4 orang anak, yaitu Mahesa Wonga Teleng, Panji Anabrang, Agnibhaya, dan Dewi Rimbu. Dari istrinya yang lain yaitu Ken Umang, Ken Angrok mempunyai 4 orang anak yaitu Tohjoyo, Sudahtu, Wregola, dan Dewi Rambi. Pada tahun 1227 M Ken Angrok dibunuh oleh seorang pengalasan dari Batil atas suruhan Anusapati, anak tirinya sebagai balas dendam terhadap pembunuhan ayahnya Tunggul Ametung. Dari kitab Pararaton diketahui bahwa Anusapati bukanlah anak dari Ken Dedes dan Ken Angrok, tetapi anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Ken Angrok kemudian dicandikan di Kagenengan sebagai Siwa. (Nagarakretagama, XXXVI:1-2) dan di Usana sebagai Budha (Sumadio, 1994).

Sepeninggal Ken Angrok, Anusapati menjadi raja. Ia memerintah tahun 1227-1248 M. Selama masa pemerintahannya itu tidak banyak yang diketahui. Tetapi juga Tohjaya hendak pula membalas dendam atas pembunuhan ayahnya, Ken Angrok oleh Anusapati. Akhirnya pada tahun 1248 Anusapati dapat dibunuh oleh Tohjaya. Anusapati kemudian didharmakan di candi Kidal (didharmakan atau dicandikan atau ridharma ring adalah usaha untuk menghormati seorang raja yang telah mangkat dan dibuatkan candi atau kuil pemujaan dengan menempatkan seorang dewa tertinggi sebagaimana dewa yang dipuja oleh raja tersebut. Candi ini dibuat oleh para penerusnya setelah melaksanakan upacara sraddha atau 12 tahun setelah kematiannya. Jadi candi bukan makan dari seorang raja dan biasanya seorang raja dapat memiliki candi pendharmaannya).

Dengan meninggalnya Anusapati, Tohjaya kemudian menggantikannya menjadi raja. Tohjaya hanya memerintah selama beberapa bulan dalam tahun 1248. Pada masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang

Rajasa dan Sinelir. Dalam penyerbuan itu Tohjaya luka parah dan diungsikan ke Katang Lumbang. Akhirnya ia meninggal dan dicandikan di Katang Lumbang.

Sepeninggal Tohjaya, pada tahun 1248 Ranggawuni dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sri Jayawisnuwardana. Dalam menjalankan pemerintahannya ia didampingi oleh Mahisa Campaka, anak Mahisa Wonga Teleng. Kedua orang itu memerintah bersama bagai Wisnu dan Indra atau bagaikan dua naga dalam satu liang. Pada tahun 1255 M Wisnuwarddhana mengeluarkan sebuah prasasti untuk mengukuhkan desa Mula dan Malurung menjadi Sima. Di dalam prasasti tersebut ia disebut dengan nama Narayya Smining Rat. Sebelumnya, dalam tahun 1254 Wisnuwarddhana menobatkan anaknya Kertanagara sebagai raja, tetapi ia sendiri tidak turun tahta tetapi memerintah terus untuk anaknya. Menurut Kakawin Nagarakertagama (LXXIII:3) Wisnuwarddhana meninggal pada tahun 1268, serta dicandikan di Weleri sebagai Siwa dan di Jajaghu sebagai Budha.

Sebelum tahun 1268, Kertanagara belum memerintah sendiri sebagai raja Singhasari Pada waktu itu ia masih memerintah di bawah bimbingan ayahnya, Raja Wisnuwarddhana sebagai rajamuda (Rajakumara) di Daha. Setelah memerintah, raja Kertanagara adalah seorang raja Singhasari yang sangat terkenal. Dalam bidang politik ia terkenal sebagai seorang raja yang mempunyai gagasan perluasan Cakrawala Mandala ke luar pulau Jawa. Di bidang keagamaan ia dikenal sebagai seorang penganut agama Budha Tantrayana.

Selama masa pemerintahannya, seluruh pulau Jawa tunduk dibawah kekuasaan raja Kertanagara. Bahkan pada tahun 1275 Kertanagara mengirim ekspedisi untuk menaklukan Malayu. Namun demikian raja Kertanagara juga menjaga hubungan politik yang baik dengan wilayah yang lain. Ia menjaga hubungan politik dengan Jayakatwang yaitu dengan jalan mengambil anaknya yang bernama Arddharaja sebagai menantunya dan memberikan anaknya yang bernama Turukbali menjadi istri raja Jayakatwang yang sebenarnya bertekad akan membalas dendam kematian leluhurnya oleh leluhur raja Kertanagara.

Menurut Pararaton bahwa dalam usaha meruntuhkan Kerajaan Singhasari itu, Jayakatwang mendapat bantuan dari Arya Wiraraja, Adipati Sumenep yang telah dijauhkan dari kraton oleh raja Kertanegara. Serangan Jayakatwang dilancarkan pada tahun 1292. kitab Pararaton menceritakan bahwa tentara Kadiri dibagi dua,

menyerang dari dua arah, pasukan yang menyerang dari arah utara ternyata hanya untuk menarik pasukan Singhasari dari arah kraton. Siasat itu berhasil setelah pasukan Singhasari dibawah pimpinan Raden Wijaya (anak Lembu Tal, cucu Mahisa Campaka) dan Arddharaja (anak Jayakatwang) menyerbu ke utara, maka pasukan Jayakatwang yang menyerang dari arah selatan menyerbu ke kraton, dan dapat membunuh raja Kertanegara. Dengan gugurnya raja pada tahun 1292, seluruh kerajaan Singhasari dikuasai oleh Jayakatwang. Raja Kertanegara kemudian didharmakan di candi Singosari sebagai Bhairawa, candi Jawi sebagai Siwa-Budha, dan di Sagala sebagai Jina (Soekmono, 1985).

### f. Majapahit

Setelah penguasa Singhasari terakhir (raja Kertanegara) gugur karena serangan Jayakatwang, Singhasari berada di bawah kekuasaan raja Kadiri Jayakatwang. Raden Wijaya yang juga menantu Raja Kertanegara kemudian berusaha untuk merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya dari tangan raja Jayakatwang dengan bantuan Adipati Wiraraja dari Madura, serta memanfaatkan kedatangan tentara Khubilai Khan yang sebenarnya dikirim untuk menyerang Singhasari dalam menyambut tantangan raja Kertanegara yang telah menganiaya utusannya Meng-Chi. Demikianlah maka dengan kedatangan tentara Khubilai Khan tercapailah apa yang dicita-citakan oleh Wijaya, yaitu runtuhnya Daha. Setelah Wijaya berhasil mengusir tentara Mongol, maka dirinya dinobatkan menjadi raja Majapahit pada tahun 1215 S (1293 M) dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Raja ini kemudian meninggal pada tahun 1309 M serta dicandikan di Antahpura sebagai Jina dan di Simping sebagai Siwa.

Sepeninggal Kertarajasa, putranya Jayanagara dinobatkan menjadi raja Majapahit. Pada masa pemerintahannya ia dirongrong oleh serentetan pemberontakan. Dalam pemberontakan Kuti tahun 1319 M muncul seorang tokoh yang kemudian akan memegang peranan penting dalam sejarah Majapahit yaitu Gajah Mada. Dalam Pararaton diceritakan bahwa pada tahun 1328 M Raja Jayanagara meninggal dibunuh seorang tabib bernama Tanca. Selanjutnya menurut Nagarakretagama (XLVIII:3) Raja Jayanagara dicandikan dalam pura di Sila Petak dan Bubat sebagai Wisnu, serta di Sukhalila sebagai Amoghasiddhi.

Raja Jayanagara tidak mempunyai keturunan, maka sepeninggalnya pada tahun 1328 M, ia digantikan oleh adik perempuannya yaitu Bhre Kahuripan. Ia dinobatkan menjadi raja Majapahit dengan gelar Tribuanottunggadewi Jayawisnuwardhani. Dari kakawin Nagarakretagama (XLIX:3) diketahui bahwa dalam masa pemerintahannya telah terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta pada tahun 1331 M. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada, setelah peristiwa Sadeng ini, kitab Pararaton menyebutkan sebuah peristiwa yang kemudian menjadi amat terkenal dalam sejarah yaitu Sumpah Palapa Gajah Mada. Pada tahun 1350 M Tribhuwana mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh anaknya Hayam Wuruk. Pada tahun 1372 M Tribhuwana meninggal dan didharmakan di Panggih (Sumadio, 1994).

Pada tahun 1350 M, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasanagara. Dalam menjalankan pemerintahannya ia didampingi oleh Gajah Mada yang menduduki jabatan patih Hamangkubhumi. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah kerajaan Majapahit mengalami puncak kebesarannya. Untuk menjalankan politik Indonesianya, satu demi satu daerah-daerah yang belum bernaung di bawah panji kekuasaan Majapahit ditundukkan dan dipersatukan oleh Hayam Wuruk. Akan tetapi politik Indonesia itu berakhir sampai tahun 1357 M dengan terjadinya peristiwa Bubat, yaitu perang antara orang Sunda dan Majapahit.

Dalam masa pemerintahannya, Hayam Wuruk sering mengadakan perjalanan keliling daerah-daerah kekuasaannya yang dilakukan secara berkala. Pada masa ini bidang kesusastraan sangat maju. Kitab Nagarakretagama yang merupakan kitab sejarah tentang Singhasari dan Majapahit berhasil dihimpun dalam tahun 1365 oleh Prapanca. Sedangkan pujangga Tantular berhasil mengubah cerita Arjunawiwaha dan Sutasoma.

Selanjutnya dalam kitab Pararaton (XXX:24) disebutkan bahwa pada tahun 1311 S (1389 M) Raja Hayam Wuruk meninggal, namun tempat pendharmaannya tidak diketahui. Sepeninggal Hayam Wuruk, tahta kerajaan Majapahit dipegang oleh Wikramawarddhana. Ia adalah menantu dan keponakan Raja Hayam Wuruk yang dikawinkan dengan putrinya bernama Kusumawarddhani. Wikramawarddhana mulai memerintah tahun 1389 M. Pada tahun 1400 M ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjadi seorang pendeta. Wikramawarddhana kemudian

mengangkat anaknya yang bernama Suhita untuk menggantikannya menjadi raja Majapahit.

Diangkatnya Suhita di atas tahta kerajaan Majapahit ternyata telah menimbulkan pangkal konflik di Majapahit, yaitu timbulnya pertentangan keluarga antara Wikramawarddhana dan Bhre Wirabhumis. Pada tahun 1404 M persengketaan itu makin memuncak, dan muncul huru-hara yang dikenal dengan nama Perang Paregreg. Dari Pararaton disebutkan bahwa dalam Perang Paregreg akhirnya Bhre Wirabhumis berhasil dibunuh Bhre Narapati. Walaupun Bhre Wirabhumis sudah meninggal, peristiwa pertentangan keluarga itu belum reda juga. Bahkan peristiwa terbunuhnya Bhre Wirabhumis telah menjadi benih balas dendam dan persengketaan keluarga itu menjadi berlarut-larut.

Masa pemerintahan Suhita berakhir dengan meninggalnya Suhita pada tahun 1447 M. Ia didharmakan di Singhajaya. Oleh karena Suhita tidak memiliki anak, maka tahta kerajaan diduduki oleh adiknya yang bernama Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya dengan gelar Prabu Brawijaya I. Ia tidak lama memerintah. Pada tahun 1451 M ia meninggal dan didharmakan di Kertawijaya pura.

Dengan meninggalnya Kertawijaya, Bhre Pamotan menggantikannya menjadi raja dengan gelar Sri Rajasawarddhana. Ia dikenal pula dengan sebutan Sang Sinagara atau Prabu Brawijaya II. Ia memerintah hampir 3 tahun lamanya. Pada tahun 1453 M ia meninggal dan didharmakan di Sepang. Menurut Pararaton sepeninggal Rajasawarddhana selama 3 tahun (1453-1456 M) Majapahit mengalami masa kekosongan tanpa raja (interregnum). Baru pada tahun 1456 M tampil Dyah Suryawikrama Girisawarddhana menduduki tahta dengan gelar Brawijaya III. Ia memerintah selama 10 tahun (1456-1466 M). Pada tahun 1466 M ia meninggal dan didharmakan di Puri (Soekmono, 1985).

Sebagai penggantinya kemudian Bhre Pandan Salas diangkat menjadi raja dengan gelar prabu Brawijaya IV. Setelah Bhre Pandan Salas meninggal, kedudukannya sebagai raja Majapahit digantikan oleh anaknya Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya. Sebelum menjadi raja Majapahit, Ranawijaya berkedudukan sebagai Bhattara i Kling. Pada masa pemerintahannya ia tidak berkedudukan di Majapahit, melainkan tetap di Kling karena Majapahit diduduki Bhre Kertabhumis yang bergelar Brawijaya V. Pada tahun 1478 M

Ranawijaya melancarkan serangan terhadap Bhre Kertabhumi. Dalam perang tersebut Ranawijaya berhasil merebut kembali kekuasaan Majapahit dari tangan Bhre Kertabhumi, dan Kertabhumi gugur di Kadaton (Djafar, 2009).

Mengenai masa akhir kekuasaan Majapahit dapat diketahui dari beberapa sumber sejarah yang ada. Serat Kanda dan Pararaton menyebutkan bahwa kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1400 S (1478 M). Saat keruntuhannya itu disimpulkan dalam candra sengkala "sirna-ilang-kertaning-bumi", dan disebutkan pula bahwa keruntuhannya itu dikarenakan serangan dari kerajaan Islam Demak. Berdasarkan bukti sejarah ternyata bahwa pada saat itu kerajaan Majapahit belum runtuh benar dan masih berdiri untuk beberapa waktu yang cukup lama lagi. Rajanya bernama Dyah Ranawijaya yang bergelar Girindrawarddhana. Bahkan berita Cina dari dinasti Ming (1368-1643 M) masih menyebutkan adanya hubungan diplomasi antara Majapahit dengan Cina pada tahun 1499 M.

Dari Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda diketahui bahwa antara 1518-1521 M di Majapahit telah terjadi suatu pergeseran politik, yaitu kekuasaan Majapahit telah beralih dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus (Pangeran Sabrang Lor) penguasa Islam dari Demak. Demikian Majapahit telah ditaklukkan dan dikuasai Pati Unus dari Demak (Graaf & Pigeaud, 1974). Penguasaan Majapahit oleh Demak itu dilakukan oleh Adipati Unus, anak Raden Patah sebagai tindakan balasan Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya yang telah mengalahkan kakeknya yaitu Prabu Brawijaya V atau Kertabhumi (Djafar, 2009).

#### **4. Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia**

Pada awal Abad ke-7 M, ketika Islam berkembang di Jazirah Arab Sriwijaya sedang dalam puncak kejayaannya. Dengan berdasar pada pendapat HAMKA bahwa sudah ada pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya, maka bukan tidak mungkin bahwa di antara para pedagang Arab sudah ada yang beragama Islam. Ini artinya bahwa Islam sudah hadir dan mulai di kenal di wilayah Indonesia pada abad ke-7 M. Hal ini diperkuat dengan pendapat Syed Naquid Al-Atas menyatakan bahwa orang-orang Muslim sejak abad ke-7 M telah memiliki perkampungan di Kanton (Kartodirdjo, Poesponegoro, Notosusanto, 1975). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pedagang-pedagang Arab memang telah memasuki perairan Indonesia.

Permasalahan kapan dan di mana Islam masuk ke Indonesia masih menjadi bahan kajian para ahli sejarah. HAMKA berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 M, alasan yang dikemukakan berdasar pada sumber yang berasal dari berita Cina dan berita Jepang. Kedua sumber menyebutkan bahwa pada abad ke-7 telah terdapat armada dagang yang dikenal dengan Ta-shih atau Tashih-kuo, istilah ta-shih atau tashih-kuo adalah perdagangan dari bangsa Arab atau Persia. Dalam berita itu juga disebutkan telah terdapat pemukiman orang-orang Arab di Sumatera Selatan (wilayah Sriwijaya). HAMKA (1981) mengutip pendapat Sir Arnold bahwa catatan dari Cina menyebutkan adanya koloni orang Arab di Sumatera Barat pada sekitar tahun 684 M, artinya bahwa karena sudah ada koloni maka waktu kedatangan orang Arab sebelum tahun 684.

Sebagian ahli sejarah yang lain berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13, hal ini dikaitkan dengan hancurnya Bagdad yang diserbu oleh Hulagu pada tahun 1258 M. Akibat hancurnya Bagdad maka banyak orang Islam yang menyebar ke luar dan berkelana mencari daerah baru, kelompok inilah yang sampai di Indonesia. Alasan lain yang dikemukakan adalah keterangan yang diperoleh dari catatan perjalanan Marcopolo dan Ibnu Batutah. Pada catatan keduanya menyebut adanya masyarakat Islam di Sumatera. Alasan yang lebih kuat adalah diketemukannya bukti fisik yang berupa Nisan Sultan Malikus Saleh di Aceh yang berangka tahun 1297 M.

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan kapan datangnya Islam di Indonesia adalah perlunya pemisahan konsep secara jelas tentang kedatangan, proses penyebaran, dan perkembangan Islam di Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa abad ke-7 M dapatlah disimpulkan sebagai waktu kedatangan Islam di Indonesia untuk pertama kali. Setidaknya mengacu pada jalur pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India atau Timur Tengah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Pada masa Sriwijaya berkuasa belum dapat dipastikan apakah pedagang-pedagang Arab telah memainkan peran ganda, yakni sebagai pedagang dan sebagai dai yang mendakwahkan ajaran Islam. Jarak yang cukup jauh (kurang lebih 5 Abad) antara proses kedatangan hingga terbentuknya masyarakat (kerajaan Islam) di Perlak, memang masih menjadi catatan para sejarawan.

Di manakah Islam pertama kali datang di kepulauan Indonesia? tentu saja jawaban pasti mengarah pada tempat-tempat (pelabuhan-pelabuhan) yang menjadi persinggahan kapal-kapal dagang. Aceh (1985) menjelaskan bahwa daerah Perlak merupakan tempat Islam pertama kali berkembang. Hal ini didasarkan atas catatan perjalanan Marcopolo. Dari bukti pelacakan arkeologis di samping Parlak juga disebutkan adanya tempat yang bernama Pase. Sehingga disimpulkan bahwa tempat kedatangan Islam pertama kali adalah Parlak dan Pase.

Menurut Harun (1995) ada dua jalur proses masuknya Islam ke Indonesia yakni jalur darat dan jalur laut. jalur darat dari Bagda menuju Kabul Afghanistan, terus ke Kasmir, India Utara, ke Kanton, ke Jeddah Laut Merah, ke Yaman, Oman Teluk Parsi (Irak), Iran, Pakistan, Pantai Malabar, Ceilon, pantai Koromandel, Bangladesh, Birma, dan masuk ke Indonesia. Jika yang digunakan sebagai dasar adalah dua jalur proses masuknya Islam tersebut maka, Perlak sebagai wilayah pertama kedatangan Islam dapat diterima.

Permasalahan kedua siapa yang membawa Islam datang di Indonesia. Permasalahan ini juga tidak kalah sulitnya dengan permasalahan tentang kapan datang di Indonesia. Para ahli sejarah tampak juga sulit untuk bersepakat. Satu hal yang sepatutnya diterima adalah bahwa para pedagang (saudagar) mesti punya andil atau terlibat dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Pertanyaan sederhana yang muncul, pedagang Islam yang datang ke Indonesia itu berasal dari mana. Snouck Hurgronje (Ahli Islam dari Belanda) sepakat bahwa pedagang Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Gujarat India.

Ada enam alasan yang dikemukakan:

- a. Pedagang-pedagang Indialah yang jauh sebelum Islam datang telah terbiasa menggunakan jalur laut Indonesia untuk menuju Cina, sehingga ketika Islam masuk India dan pedagang India menjadi Muslim maka Islam kemudian dibawa ke Indonesia;
- b. Gujarat adalah pelabuhan yang penting bagi kapal-kapal dagang atau jalur pelayaran dan perdagangan yang ramai di singgahi oleh para pedagang;
- b. Corak hiasan dan bentuk nisan makam orang Islam di Indonesia sejenis dengan yang ada di Guratan, sehingga di mungkinkan didatangkan dari Gujarat;

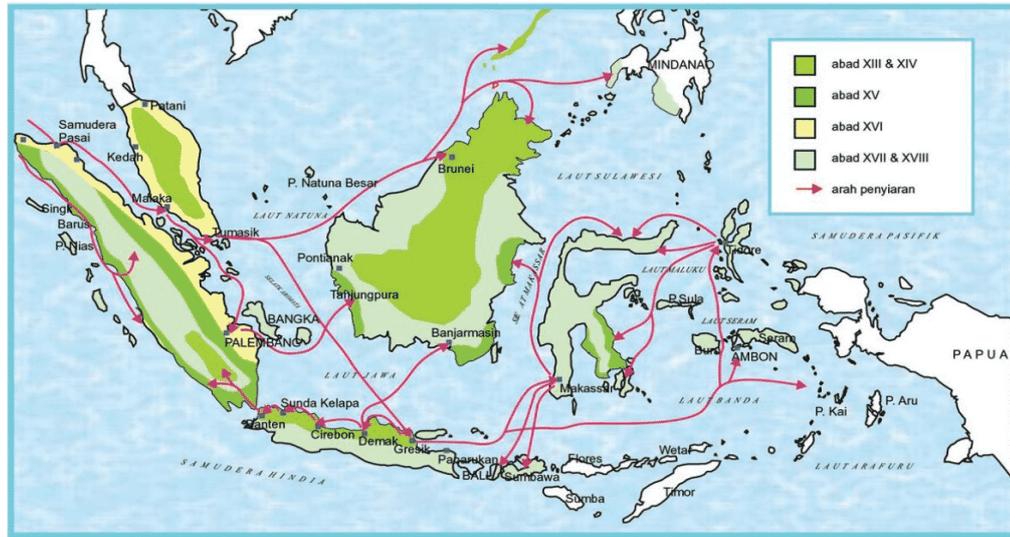
- c. Gelar yang dipakai oleh para raja Islam di Indonesia (sjah) adalah dari bahasa India atau Parsi;
- d. Terdapat kesesuaian beberapa adat-istiadat antara Indonesia dan India; dan
- e. Terdapatnya paham syiah dan wahdatul wujud pada pengikut Islam di Indonesia (Harun, 1995:4).

HAMKA (1984) dan Aceh (1985) berpendapat bahwa tidak hanya pedagang dari Gujarat tetapi juga pedagang dari Arab yang berperan mengislamkan Indonesia. Alasannya antara lain:

- a. Hubungan dagang melalui laut antara daerah Timur Tengah dengan Cina sudah berkembang sejak abad ke-7 M;
- b. Sudah terdapatnya pemukiman orang-orang Arab di Malabar India yang berasal dari Omat dan Hendramaut; dan
- c. Sejak zaman Sriwijaya sudah terdapat pedagang Islam yang berasal dari Arab yang bermukim di Sumatera Selatan.

Mengkaji tentang asal para pedagang Islam, memang pernah ada pendapat yang menyebutkan bahwa para pedagang Cina mungkin terkait dalam penyebaran Islam. Bahkan bangsa Cina tidak hanya para pedagangnya yang terkait dengan penyebaran Islam tetapi juga kelompok militer yang peninggalannya sampai sekarang masih dapat di jumpai di Semarang Jawa Tengah (Yuanshi, 2005).

Kartodirdjo (1975) menyebutkan bahwa tidak hanya dari kelompok pedagang yang menyebarkan Islam, tetapi juga dari kelompok Mubaligh. Mubaligh inilah yang dengan ilmunya membentuk kader-kader dai melalui berbagai cara, salah satu yang menonjol adalah melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren. Kelompok lain adalah para sufi yang menyebarkan tarekat di Indonesia. Satu hal yang perlu di catat bahwa bangsa Indonesia sendiri merupakan penyebar agama Islam, Karena sebenarnya dalam proses perkembangan Islam bangsa Indonesia tidak pasif, tetapi juga aktif. Contoh yang dikemukakan antara lain, pengislaman Kerajaan Banjar yang dilakukan oleh penghulu dari kerajaan Demak. Demikian juga dengan pengislaman Hitu dan Ternate yang dilakukan oleh santri dari Giri.



Gambar 11 Peta Penyebaran Islam Abad XIII-XVIII

Dari uraian tersebut jelas tampak bahwa saluran islamisasi yang pertama adalah melalui perdagangan. Hal ini berlangsung dengan intens antara abad ke-7-16 M, yang melibatkan para pedagang dari berbagai wilayah di Asia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan sangat cocok dengan ajaran Islam, karena dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara kegiatan berdagang dengan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Melalui saluran perdagangan Islam dapat masuk ke semua lapisan masyarakat dari raja hingga rakyat biasa. Raja atau kaum bangsawan pada masa tersebut juga merupakan pemilik modal dalam bidang perdagangan, sehingga banyak yang memiliki kapal-kapal dagang.

Prosesnya mula-mula para pedagang Islam berdagangan di pusat-pusat perdagangan dan kemudian di antaranya ada yang bertempat tinggal, baik hanya untuk sementara maupun untuk waktu yang cukup lama. Dalam perkembangannya para pedagang ini banyak kemudian yang menetap sehingga lama kelamaan menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan ini kemudian dikenal sebagai *Pekojan*, perkampungan orang Islam. Status mereka secara ekonomi relatif baik, sehingga banyak menarik masyarakat di sekitarnya untuk bekerja dengan para pendatang tersebut.

Saluran Islamisasi kedua adalah melalui perkawinan. Banyak pedagang muslim yang menetap tidak serta membawa keluarganya, sehingga kemudian mereka menikah dengan penduduk asli. Wanita yang akan dinikahi sebelumnya telah

masuk agama Islam, dengan demikian terbentuklah keluarga muslim. Jumlahnya lambat laun semakin banyak sehingga terciptalah masyarakat Islam. Saluran islamisasi melalui perkawinan ini sangat efektif jika yang melakukan perkawinan adalah saudagar Islam dengan anak kaum bangsawan atau Raja. Dari perkawinan ini akan mempercepat islamisasi karena pengaruh sosio politik kaum bangsawan dan para raja cukup besar di kalangan masyarakat.

Tasawuf juga merupakan saluran Islamisasi yang ketiga, bahkan dinilai para ahli merupakan saluran terpenting. Alasannya karena melalui tasawuf memudahkan penerimaan Islam oleh masyarakat yang belum memeluk agama Islam. Guru-guru Tasawuf dengan kebajikannya tetap memelihara unsur-unsur lama dalam masyarakat dengan diwarnai oleh ajaran islam. Nilai-nilai Islam yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia menunjukkan persamaan dengan alam pikiran yang telah di miliki oleh orang Indonesia. Hal ini dapat di buktikan pada islamisasi di Jawa dan Sumatera khususnya. Para guru Tasawuf mampu mengemas islam dalam bahasa yang dapat dimengerti dan disarankan oleh masyarakat Indonesia, sehingga relatif tidak menimbulkan pertentangan antara Islam dengan yang sudah ada sebelumnya.

Pendidikan juga merupakan saluran Islamisasi di Indonesia. Sudah disinggung sebelumnya bahwa banyak mubaligh yang kemudian menyiapkan kader melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren. Di pesantren itulah kader ulama penerus ulama disiapkan untuk mengembangkan Islam diseluruh pelosok Indonesia. Seorang santri yang telah tamat belajar di pesantren akan kembali ke daerahnya masing-masing dan menjadi guru agama dan tokoh keagamaan. Beberapa pesantren awal yang dikenal luas adalah Ampel dan Giri yang sudah muncul ketika Majapahit masih berdiri. Ampel dan Giri di kenal sebagai tempat pendidikan para mubaligh yang banyak mengislamkan wilayah Indonesia.

Saluran Islamisasi yang lain adalah melalui kesenian. Kesenian dengan berbagai bentuknya telah dimanfaatkan para mubaligh untuk memperkenalkan ajaran Islam. Bahkan penyebaran Islam di Jawa tidak dapat dilepaskan dari tembang-tembang Jawa yang digubah oleh para wali. Demikian juga dengan gamelan dan wayang sebagai puncak kesenian Jawa, telah dimanfaatkan Sunan Kalijaga untuk berdakwah.

## **5. Faktor-Faktor yang Memudahkan Islam Berkembang di Indonesia**

Kartodirdjo (1975: 109) menyatakan bahwa proses islamisasi di Indonesia berjalan mudah karena kedua belah pihak yakni orang-orang Muslim yang datang dan golongan masyarakat Indonesia dapat saling menerima. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara simultan telah memudahkan Islam berkembang dan diterima di Indonesia.

- a. Faktor politik berkembangnya Islam bersamaan dengan terjadinya pergolakan politik kerajaan Hindu Budha. Contoh kasus tentang faktor politik adalah islamisasi di Jawa Timur. Bersamaan dengan kegoncangan politik di Majapahit menjelang keruntuhannya, Islam muncul menjadi kekuatan alternatif yang sulit ditolak masyarakat.
- b. Faktor ekonomi antara lain munculnya kekuatan para pedagang Islam pada pelabuhan-pelabuhan strategis di kepulauan Indonesia menjadi daya tarik luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Pedagang-pedagang Muslim dapat menunjukkan sifat dan tingkah laku yang baik, dan pemahaman keagamaan yang tinggi sehingga patut untuk dicontoh dan diikuti. Ketika kemudian banyak pedagang dan bangsawan di daerah pelabuhan memeluk Islam maka masyarakat di sekitarnya kemudian mengikuti memeluk Islam.
- c. Faktor sosial dapat dijelaskan antara lain adalah penggunaan bahasa melayu oleh para Mubaligh, sehingga Islam dengan mudah dapat di pahami oleh penduduk Indonesia karena kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung (*lingua franca*). Aspek sosial lainnya adalah adanya pandangan Islam yang tidak mengenal strata, padahal sebelum kedatangan Islam masyarakat dipisahkan dalam kasta Islam dianggap sebagai nilai pembebasan dan menjunjung persamaan dalam masyarakat
- d. Faktor budaya yang ikut mendukung berkembang Islam di Indonesia yakni sebelum kedatangan Islam masyarakat Indonesia mempunyai sikap religius yang baik, sehingga kedatangan Islam yang menawarkan sebuah keyakinan bukan hal yang asing. Sikap masyarakat Indonesia yang terbuka menerima budaya asing telah memungkinkan terjadinya interaksi dengan budaya Islam, kemampuan para

mubaligh menggunakan sarana budaya untuk memperkenalkan Islam menjadi saluran Islamisasi yang efektif. Syarat yang mudah untuk menjadi muslim (hanya dengan membaca syahadat) dan ritual yang sederhana merupakan daya tarik yang cepat dapat diterima masyarakat Indonesia.

### 6. Bukti-Bukti Masuknya Pengaruh Islam di Indonesia

Perkembangan Islam di Indonesia mulai abad ke-13 menunjukkan intensitas yang tinggi, munculnya Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam di Indonesia telah menunjukkan bukti pengaruh Islam pada sistem kemasyarakatan secara konkrit, yang dalam konteks ini adalah sistem politik dan pemerintahan. Dipergunakan gelar *Sultan* untuk raja merupakan bukti adanya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan. Demikian juga dengan diperkenalkannya jabatan penghulu dalam struktur pemerintahan di Kraton Demak menunjukkan bahwa Islam telah mempengaruhi pola dan tatanan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia (Sjamsulhuda, 1987).

Di Sumatera Barat Islam memperkaya norma-norma adat, pepatah yang mengatakan bahwa “*adat bersendi sara, dan sara bersendikan kitabullah*” merupakan pengakuan masyarakat Sumatera Barat tentang perlunya norma-norma adat yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan Islam (Hamka, 1981). Di Jawa diadakan upacara grebeg Maulud yang memadukan antara upacara adat dengan dakwah Islam. Demikian pula di berbagai tempat di Indonesia, banyak upacara adat memiliki latar belakang terkait dengan paham tertentu dalam Islam. Misalnya *kenduri bubur sura, Asan-usen tabut, Kanji Asura*, dsb.

Di bidang keagamaan sebagaimana telah dibahas dalam uraian di atas bahwa tasawuf memiliki pengaruh yang cukup penting. Banyak ritual keagamaan masyarakat yang didasarkan atas ajaran tarekat, tokoh-tokoh tarekat seperti Hamsah Fansuri, Abdur Rauf Singkel, Nuruddin Ar Raniri menjadi rujukan masyarakat dalam menjalankan ritual keagamaan. Mereka adalah pengembang tarekat yang mendapat banyak pengikut di Sumatera. Di Jawa pada Wali menggunakan berbagai saluran kesenian untuk mengembangkan Islam, yang

sangat populer adalah Sunan Kalijaga yang mampu mempengaruhi pertunjukan wayang menjadi sarana dakwah yang efektif.

Bukti fisik tentang masuknya pengaruh Islam adalah pada bidang seni bangunan (arsitektur) dan seni sastra. Seni bangunan yang merupakan bukti adanya pengaruh Islam adalah Masjid, bangunan tempat shalat bagi umat Islam. Dalam bangunan Masjid jelas sekali adanya pengaruh Islam di dalamnya (Soekmono, 1985). Selain bangunan masjid, bentuk bangunan yang terpengaruh Islam adalah makam. Ragam hias dan bentuk nisan memberikan bukti adanya pengaruh Islam. Nisan Fatimah binti Maimun di Loran Gresik, makam Al Malikus Saleh, dan Troloyo menunjukkan bukti bahwa Islam berpengaruh dalam seni bangunan. Hasil seni ukir sebagaimana yang terdapat dalam relief di Masjid Mantingan, seni ukir kayu di Cirebon. Bukti pengaruh Islam pada seni sastra sangatlah banyak. Di Sumatera muncul karya sastra yang berbentuk hikayat, syair, tambo, dan silsilah. di Jawa muncul karya berbentuk Suluk, babad, tembang, dan kitab (Soekmono, 1985).

Dalam perilaku keagamaan ajaran tasawuf dapat diterima di Indonesia karena dapat menemukan titik temu dengan kepercayaan masyarakat terdahulu, sehingga dalam perkembangan Islam di masyarakat bentuk-bentuk ritual tasawuf sangat mewarnai perilaku keagamaan masyarakat. Beberapa tarekat berkembang di Indonesia dengan baik, antara lain tarekat Qodiriyah, Naqsabandiyah, Satariyah, Rifaiyah, Qodiriyah wa Naqsabandiyah, Syadziliyah, Khalwatiyah, dan Tijaniyah (Kartodirjo, Poesponegoro, Notosusanto, 1975). Beberapa tarekat bahkan sampai sekarang masih berkembang di tengah-tengah masyarakat.

## **7. Kerajaan-kerajaan Islam Awal di Indonesia**

### **a. Peurlak**

Masyarakat Islam di Indonesia mulai mampu menata sebuah pemerintahan berbentuk kerajaan pada abad ke-10 sebagaimana tampak pada munculnya kerajaan Peurlak. Raja pertama kerajaan Peurlak adalah Alaidin Sayyid Maulana Aziz Syah, akan tetapi masa kekuasaannya tidak banyak diketahui. Para penerus Sultan Alaidin yakni:

- 1) Sultan Alaidin Abdurrahim Syah
- 2) Sultan Alaidin Syaid Abbas Syah

- 3) Sultan Alaidin Mughayat Syah
- 4) Sultan Makhdum Alaidin Abdul Kadir Syah
- 5) Sultan Makhdum Alaidin Muhammad Amin Syah
- 6) Sultan Makhdum Abdul Malik Syah
- 7) Sultan Makhdum Malik Ibrahim (Aceh, 1985)

Kerajaan Peurlak sempat pecah menjadi dua. Satu berada di pedalaman dengan pusatnya di Tonang, dan satunya di daerah pesisir di Bandar Khalifah. Karena pecah menjadi dua maka kekuasaannya menjadi kecil dan bahkan tidak lagi disebut sebagai kerajaan. Perjalanan sejarah kerajaan Peurlak diwarnai dengan berbagai peperangan termasuk perang dengan Sriwijaya. Raja terakhir Muhammar Amir Syah mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh, Malikus Saleh kemudian mendirikan kerajaan Samudera Pasai (Harun, 1995). Kerajaan Peurlak masih eksis sampai tahun 1296 M.

### b. Samudera Pasai

Kerajaan Samudera Pasai didirikan oleh Malikus Saleh. Masa kekuasaannya diperkirakan tidak lama berdasarkan informasi dari tulisan di batu nisan makamnya, ia meninggal tahun 1297 M. Walaupun masa kekuasaannya pendek Malikus Saleh dikenal sebagai Sultan yang bijaksana. Setelah Malikus Saleh wafat, kerajaan Samudera Pasai dipegang oleh Malik Az-Zahir I yang berkuasa pada 1297-1326 M. Pada masa pemerintahannya tidak banyak yang diungkapkan karena kelangkaan sumber. Malik Az-Zahir I kemudian diganti dengan Al Malik Az-Zahir II.

Catatan perjalanan dari Ibnu Batutah menjelaskan bahwa Az-Zahir II merupakan orang yang taat dengan agama Islam dan bermazhab Syafii. Az-Zahir II juga sangat giat untuk mengislamkan daerah sekitarnya, sehingga Ibnu Batutah menjelaskan bahwa Az-Zahir II adalah seorang ulama yang menjadi Raja (Hamka, 1981). Samudera Pasai menjadi salah satu pusat perkembangan mazhab Syafii.

Az-Zahir II wafat dan digantikan oleh putranya yang masih kecil bernama Zainal Abidin. Pada masa kekuasaan Zainal Abidin, Pasai mendapat serangan dua kali yakni dari Siam dan Majapahit, sehingga kerajaan Samudera Pasai sangat lemah.

Dalam kondisi demikian datanglah laksamana Cheng Ho yang meminta agar Samudera Pasai mengakui perlindungan Tiongkok, dengan demikian Samudera Pasai akan dibela bila diserang oleh negara lain. Sepeninggal Zainal Abidin kondisi Samudera Pasai semakin lemah, di sisi lain Malaka mulai berkembang menjadi bandar yang besar. Kapal-kapal dagang lebih memilih bersandar ke Malaka daripada ke Samudera Pasai, sehingga Samudera Pasai lambat laut tenggelam dengan sendirinya.

c. Aceh Darussalam

Kerajaan Aceh Darussalam adalah kelanjutan dari Samudera Pasai yang bersatu dengan daerah sekitarnya, kerajaan ini berdiri pada awal abad ke-16 bersamaan dengan datangnya armada Portugis ke Malaka. Raja yang pertama adalah Alaudin Ali Mughayat Syah dengan ibukota Banda Aceh. Banda Aceh saat itu tidak sekedar pusat kegiatan politik, tetapi ilmu pengetahuan dan bandar transit di Asia Tenggara. Perkembangan kerajaan ini tidak dapat dijelaskan karena kekurangan dan ketiadaan sumber yang dapat digunakan.

d. Ternate dan Tidore

Wilayah kepulauan Maluku sebelum berkembangnya agama Islam terdiri atas empat kerajaan yakni Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Maluku sebagai pusat rempah-rempah dipastikan menjadi tujuan para pedagang yang berlayar antarpulau di kepulauan Indonesia. Dengan demikian Islam berkembang di Maluku melalui saluran perdagangan, dan diperkirakan terjadi pada abad ke-15 M. Hamka dengan menggunakan sumber Portugis menjelaskan bahwa di antara empat kerajaan yang ada, Ternate yang mula-mula memeluk agama Islam.

Dari sumber lisan disebutkan tokoh yang mengislamkan Ternate bernama Datuk Maulana Husin. Raja pertama yang memeluk agama Islam bernama Gapi Baguna, setelah memeluk Islam bernama Marhum dengan gelar Sultan. Sultan Marhum berkuasa dari tahun 1465 sampai wafatnya tahun 1486. Berdasar pada tahun dan saluran yang dipergunakan dalam islamisasi di Maluku maka dapat diketahui

bahwa pembawa agama Islam di Maluku adalah orang Melayu, Parsi, dan Arab. Berdasar pada sumber lisan maka penyebaran agama Islam di Maluku juga dilakukan oleh para mubaligh.

Sultan Marhum digantikan putranya yang bernama Zainal Abidin pada tahun 1495. Sultan Zainal Abidin sempat memperdalam agama Islam di Giri Jawa Timur. Hal ini telah meningkatkan hubungan antara Jawa (Giri, Gresik) dengan Hitu Ambon. Pada masa kepemimpinan Sultan Zainal Abidin, Portugis juga telah sampai di Maluku. Dengan berbagai siasat Portugis berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku, hal ini menyebabkan kalangan rakyat Ternate menjadi tertekan. Sultan Ternate kemudian mengadakan perlawanan terhadap Portugis, perlawanan berlangsung dipimpin oleh:

- 1) Sultan Zainal Abidin
- 2) Sultan Sirullah
- 3) Sultan Khairun
- 4) Sultan Baabullah

Sultan Baabullah akhirnya berhasil mengusir Portugis dari Ternate, tetapi belum berhasil mengusir Portugis dari seluruh kepulauan Maluku. Di Tidore raja yang pertama memeluk Islam adalah Kolano Cirililiati yang diislamkan oleh seorang mubaligh Arab yang datang ke Tidore bernama Syech Mansyur (Hamka, 1981:218). Setelah masuk Islam Kolano Cirililiati berganti nama Sultan Jamaluddin.

Sumber Portugis memberikan informasi bahwa Islam datang ke Tidore kurang lebih 30 tahun sebelum Ternate. Informasi dari sumber Spanyol menyatakan bahwa ketika Spanyol sampai di Maluku, Islam telah ada di Tidore kurang 50 tahun sebelumnya. Sultan Jamaluddin digant oleh putranya bernama Sultan Mansyur, tetapi perkembangan kerajaan Islam Tidore tidak banyak membantu Ternate untuk melawan Portugis. Tidore dan Ternate pada abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17 menjadi daerah konflik, baik antara penguasa lokal maupun Kolonial Portugis, Spanyol, dan Belanda. Belanda akhirnya keluar sebagai pemenang.

e. Demak

Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, seorang putra Majapahit dari istri seorang putri Cina hadiah dari Raja Palembang. Raden Patah mulai berkuasa tahun 1478 dengan pusat pemerintahan di Demak Bintoro, pesisir utara Jawa Tengah. Dalam menjalankan pemerintahannya Raden Patah didampingi dewan wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Wali Songo inilah yang nantinya berjasa mengislamkan Jawa sampai daerah pedalaman. Wali Songo yang terkenal yaitu:

- 1) Maulana Malik Ibrahim
- 2) Sunan Ampel
- 3) Sunan Giri
- 4) Sunan Bonang
- 5) Sunan Drajat
- 6) Sunan Kudus
- 7) Sunan Muria
- 8) Sunan Kalijogo
- 9) Sunan Gunungjati

Demak berhasil menggantikan posisi Majapahit sebagai kerajaan yang berpengaruh di Jawa, karena Majapahit hancur setelah terjadi peperangan antara Kertabumi dan Girindrawardana. Perkembangan Islam di Jawa secara intensif terjadi pada masa kerajaan Demak.

Raden Patah digantikan putranya yakni Adipati Unus yang dikenal juga dengan nama Pangeran Sabrang Lor. Adipati Unus pernah membawa ekspedisi ke utara untuk menyerang Portugis di Malaka, tetapi usahanya gagal. Adipati Unus hanya berkuasa dalam masa yang pendek dari tahun 1518 M sampai tahun 1521 M. Adinya yang bernama Trenggono kemudian menggantikan Adipati Unus, karena Adipati Unus tidak punya anak. Sultan Trenggono kemudian meneruskan jejak pendahulunya untuk mengislamkan tanah Jawa.

Sultan Trenggono mengutus Syarif Hidayatullah untuk mengislamkan wilayah Jawa bagian Barat, maka ditundukkanlah Pajajaran, Cirebon, Banten, dan juga Sunda Kelapa (kemudian diubah menjadi Jayakarta). Beberapa putrinya dikawinkan dengan beberapa Adipati, sehingga wilayah kedaulatan Demak semakin luas. Hanya wilayah Jawa Timur bagian Timur yang belum berhasil diislamkan, maka Sultan Trenggono sendiri yang memimpin ekspedisi tersebut,

akan tetapi ekspedisi ini gagal dan Sultan Trenggono meninggal. Terjadi kekacauan politik di Demak siapa yang menggantikan Sultan Trenggono, akhirnya putra menantu Sultan Trenggono yang bernama Hadiwijaya memenangkan pertarungan politik dan memindahkan pusat kerajaan ke Pajang, masuk pedalaman Jawa Tengah.

f. Pajang dan Mataram

Pindahnya pusat kerajaan dari daerah pesisir ke pedalaman Jawa Tengah membawa pengaruh pada perkembangan Islam di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Contohnya adalah paham *wahdatul wujud* mendapatkan tempat yang cukup luas karena inti ajaran tasawuf itu lebih mudah diterima masyarakat. Hadiwijaya berusaha untuk tetap menegakkan pengaruh Demak di berbagai wilayah, termasuk daerah yang dipegang oleh para menantu Sultan Trenggono. Hadiwijaya tampaknya berhasil untuk tetap menyatukan pengaruh Demak, termasuk ketika menghadapi Arya Penangsang yang berusaha merebut tahta Demak. Namun ketika Mataram yang selama ini diserahkan putra angkatnya memberontak, Sultan Hadiwijaya kalah sehingga pusat pemerintahan dipindah ke Mataram. Hadiwijaya tewas tahun 1582 M, sementara itu putra mahkota bernama Pangeran Benawa dijadikan Bupati Demak. Putra angkat Hadiwijaya adalah Sutawijaya, bersama ki Pemanahan diberi hadiah tanah Mataram yang dulunya berwujud Hutan, berubah menjadi wilayah yang menjanjikan sehingga dapat berkembang dengan pesat. Pada akhirnya wilayah ini menjadi pusat kerajaan Mataram.

Mataram dipimpin oleh Sutawijaya dengan memakai gelar *Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo*. *Senopati Ing Alogo* sebagai penerus penguasa Pajang berusaha mempertahankan kedaulatan penguasa sebelumnya, sehingga terjadi beberapa kali peperangan. Namun akhirnya Jawa Tengah dan Jawa Timur berhasil dikuasai, bahkan kemudian bergerak ke arah Jawa Barat. Pada tahun 1595 Masehi, Galuh di Jawa Barat berhasil dipaksa mengakui Mataram.

Perkembangan Islam sangat pesat ketika Mataram di bawah Sultan Agung, usaha Sultan Agung tampak jelas ketika banyak ulama yang diberi hak untuk mengolah tanah perdikan. Tanah perdikan adalah sebuah wilayah dengan luas tertentu yang dibebaskan membayar pajak kepada kerajaan. Sultan Agung dikenal sebagai raja

yang bijaksana, dan dikenal juga sebagai pujangga. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram pernah menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Masjid Agung kota dibangun bersamaan dengan pembangunan kompleks kraton.

Bersamaan dengan perluasan pengaruh Mataram ke seluruh Jawa maka Islam juga tersebar luas di seluruh Jawa, tapi Amangkurat I pengganti Sultan Agung tidak meneruskan kebijakannya. Pada masa Amangkurat I perkembangan Islam di Jawa seakan surut karena kebijakan Amangkurat I yang cenderung meninggalkan ulama dan bahkan memusuhinya. Yahya Harun (1995) menyebut kebijakan Amangkurat I sebagai *menjawakan Islam*, artinya memaksakan kesesuaian antara Islam dan nilai-nilai Jawa. Kebijakan Amangkurat I yang banyak merugikan Mataram melahirkan banyak pemberontakan yang pada akhirnya Mataram terpecah belah menjadi 4 wilayah kekuasaan sebagaimana terlihat sampai sekarang.

g. Banten dan Cirebon

Banten dan Cirebon sebelum muncul Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, sudah merupakan bandar atau pelabuhan ramai dikunjungi para pedagang dari luar pulau Jawa. Hadirnya seorang Mubaligh dari Arab yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati (Syarif Hidayatullah) mengabdikan diri ke Demak, berhasil melaksanakan misi Demak untuk mengislamkan Jawa Barat.

Banten adalah kerajaan kecil yang mengakui kedaulatan Pakuan Pajajaran, sebuah kerajaan Hindu yang menguasai wilayah Pasundan Jawa Barat. Demak menilai bahwa Banten sebagai wilayah yang strategis harus dikuasai, maka Demak kemudian mengirim Syarif Hidayatullah untuk menaklukkan Banten. Banten berhasil dikuasai Syarif Hidayatullah yang kemudian menyebarkan Islam ke Sumatera Selatan. Dari Banten, Demak kemudian mengincar Sunda Kelapa, pelabuhan Pakuan Pajajaran sekaligus tempat Portugis melakukan transaksi perdagangan. Sunda Kelapa berhasil dikuasai oleh Syarif Hidayatullah tahun 1572, kemudian namanya diubah menjadi Jayakarta. Dari Sunda Kelapa Syarif Hidayatullah kemudian meneruskan menaklukkan Cirebon, kota pelabuhan yang

juga mengakui kedaulatan Pakuan Pajajaran. Cirebon akhirnya juga jatuh ke tangan Syarif Hidayatullah, sehingga Pakuan Pajajaran tidak lagi memiliki kota pelabuhan yang strategis.

Syarif Hidayatullah pada tahun 1552 M menyerahkan daerah kekuasaannya kepada putranya yakni Pangeran Hasanuddin untuk Banten, dan Pangeran Pasareyan untuk Cirebon. Syarif Hidayatullah kemudian mendirikan lembaga pendidikan di daerah Gunung Jati, hingga wafatnya pada tahun 1570 sehingga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati.

Banten kemudian berkembang semakin pesat, Pangeran Hasanuddin dapat mengembangkan Banten sebagai kota dagang yang mensejahterakan rakyat. Setelah berkuasa 18 tahun Pangeran Hasanuddin yang bergelar Maulana Hasanuddin wafat dan dimakamkan di Sabakiking. Pengganti Hasanuddin adalah putra tertuanya yakni Pangeran Yusuf. Pangeran Yusuf berjasa menaklukkan raja Pakuan Pajajaran, dengan demikian seluruh Jawa Barat berhasil diislamkan.

Ketika terjadi huru-hara politik di Demak, berlanjut dengan perpindahan pusat pemerintahan Islam ke pedalaman yakni di Pajang, Cirebon kemudian berdiri sendiri sebagai kerajaan, dan Pangeran Pasareyan menjadi raja pertama. Cirebon berkembang menjadi kerajaan Islam yang disegani, tetapi pada akhirnya Cirebon pecah menjadi dua yakni Kasepuhan dan Kanoman (Sulendraningrat, 1985).

### 8. Gowa – Sulawesi Selatan

Di daerah Sulawesi Selatan Islam berkembang pada awal abad ke-17 M, yaitu ketika kerajaan Gowa dan Tallo menyatakan masuk Islam (Soekmono, 1985). Raja Tallo yang bernama Karaeng Matoaya yang juga merangkap jabatan Mangkubumi di Kerajaan Gowa menyatakan masuk Islam dan berganti nama dengan Sultan Abdullah. Raja Gowa yang bernama Daeng Manrabria juga menyatakan masuk Islam dan berganti nama dengan Sultan Alaudin. Dua tokoh inilah yang kemudian menyebarkan Islam di seluruh daerah kekuasaannya. Bahkan perkembangan Islam dapat dirasakan sampai di daerah Nusa Tenggara.

Sultan Alaudin mempunyai sikap tegas terhadap Belanda, sehingga membantu Maluku ketika Belanda memaksakan monopoli perdagangan. Sampai wafatnya sikap menentang terhadap Belanda terus dilakukan. Sikap Sultan Alaudin

diteruskan oleh keturunannya yakni Sultan Muhammad Said, dan Sultan Hasanuddin. Belanda mempertimbangkan pentingnya Gowa dalam jalur perdagangan maka kemudian memanfaatkan pemberontakan Arung Palaka untuk menghancurkan Gowa. Akhirnya setelah terjadi beberapa kali peperangan Gowa harus mengakui kekalahan sehingga diadakan perjanjian Bongaya pada tahun 1667 M. Beberapa waktu setelah perjanjian itu Gowa sempat mencoba mengangkat senjata lagi, akan tetapi kemudian ditumpas oleh Belanda sehingga Gowa hancur.

#### **D. Rangkuman**

1. Teori pertama yang dilontarkan adalah teori Kstaria, dimana para pengikutnya berpendapat bahwa agama Hindu dan Budha disebarluaskan melalui kolonisasi oleh para Ksatriya. Teori yang kedua adalah teori Waisya dimana perdagangan dan perkawinan adalah salurannya, sedangkan teori yang ketiga adalah teori Brahmana dimana mengemukakan peran para Brahmana dalam menyebarkan agama karena sifatnya yang rahasia. Sebuah teori menarik dikemukakan oleh van Leur yang menyatakan bahwa telah terjadi usaha oleh para Brahmana lokal mempelajari agama ini di India dan kemudian pulang untuk menyebarkannya, teori ini dikenal sebagai Teori Arus Balik. Ada satu teori yaitu teori Sudra yang menganggap bahwa para sudra yang tinggal di Indonesia menjadi pelopor penyebaran agama ini. Teori arus balik segera mendapat tempat di hati para pakar sejarah kuna karena bersifat Indonesiasentris dan didukung dari beberapa intepretasi prasasti dan naskah.
2. Beberapa bentuk kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia antara lain adalah, Kutai dan Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram Hindu, Kadiri dan Jenggala, Singhasari, dan Majapahit.
3. Masuk, perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia memiliki waktu yang berbeda, berdasarkan peninggalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Abad 7 M sebagai abad kedatangan Islam di Indonesia, hal ini mengacu pada jalur pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India atau Timur Tengah. Berdasarkan berita kronik Cina, abad ke-7 M sudah ada pengaruh Islam di Indonesia dengan adanya pedagang muslim yang singgah di wilayah Sriwijaya dan perkampungan muslim di Kanton. Menurut kisah perjalanan

Marcopolo dan Ibn Batutah, bukti adanya pengaruh Islam abad 13 M dengan temuan nisan Sultan Malik As Saleh berangkat tahun 1297 M.

4. Saluran islamisasi; perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian.
5. Bukti-bukti pengaruh Islam di Indonesia; politik dan pemerintahan (gelar sultan dan jabatan penghulu), sosial (norma), agama (tasawuf, tarekat), arsitektur, seni sastra, seni ukir, seni bangunan (masjid, makam, ragam hias, bentuk nisan, hikayat, syair, tambo, suluk, babad, tembang, kitab)
6. Beberapa kerajaan Islam awal di Indonesia antara lain adalah; Peurlak, Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Ternate dan Tidore, Demak, Pajang dan Mataram, Banten, Cirebon dan Gowa.

## **Pembelajaran 3. Kolonialisme Bangsa Eropa dan Pergerakan Nasional Indonesia**

### **A. Kompetensi**

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 3. Kolonialisme Bangsa Eropa dan pergerakan Nasional Indonesia yang akan dicapai pada pembelajaran ini, adalah guru P3K mampu menganalisis kolonialisme bangsa Eropa dan pergerakan nasional Indonesia

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 3. Kolonialisme Bangsa Eropa adalah sebagai berikut;

1. Menjelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme
2. Menganalisis latar belakang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia
3. Menganalisis Indonesia Masa Portugis, Spanyol, dan VOC
4. Menganalisis Indonesia masa Penjajahan Inggris dan Belanda
5. Menganalisis Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Pemerintah Kolonial
6. Menganalisis Masa Pergerakan Nasional Indonesia

### **C. Uraian Materi**

#### **1. Kolonialisme dan Imperialisme**

Kolonialisme sebenarnya berasal dari nama seorang petani romawi yang bernama colonus, dalam perjalanannya colonus pergi jauh untuk mencari tanah yang subur untuk dikerjakan dan ditempati. Lama kelamaan tindakan colonus tersebut diikuti oleh petani yang lain dan mereka bersama-sama menetap disuatu tempat yang bernama colonia. Jadi colonia sendiri dapat diartikan sebagai tanah pemukiman. Didalam lembaran sejarah kita banyak sekali kita temukan serombongan orang

yang meninggalkan tempat asalnya untuk mencari suatu daerah baru, misalnya dari Inggris ke Australia, atau dari Cina ke Asia Tenggara. Mereka datang dengan berbagai macam tujuan antara lain; karena alasan politik dinegerinya, atau karena ingin mencari sumber-sumber bahan perdagangan (logam mulia, rempah-rempah, kayu cendana). Untuk tujuan yang terakhir ini mereka mendirikan kantor perdagangan yang pada akhirnya menjadi pusat koloni untuk menjajah. Kolonialisme diartikan sebagai suatu sistem pemukiman yang berada diluar negara induk (penjajah).

Kolonialisme adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal, istilah ini juga menunjuk kepada suatu himpunan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasi atau mempromosikan sistem ini, terutama kepercayaan bahwa moral dari pengkoloni lebih hebat ketimbang yang dikolonikan.

Perkataan imperialisme berasal dari kata Latin "imperare" yang artinya "memerintah". Hak untuk memerintah (imperare) disebut "imperium". Orang yang diberi hak itu (diberi imperium) disebut "imperator". Yang lazimnya diberi imperium itu ialah raja, dan karena itu lambat-laun raja disebut imperator dan kerajaannya (ialah daerah dimana imperiumnya berlaku) disebut imperium. Pada zaman dahulu kebesaran seorang raja diukur menurut luas daerahnya, maka raja suatu negara ingin selalu memperluas kerajaannya dengan merebut negaranegara lain. Tindakan raja inilah yang disebut imperialisme oleh orang-orang sekarang, dan kemudian ditambah dengan pengertian-pengertian lain hingga perkataan imperialisme mendapat arti-kata yang kita kenal sekarang ini hingga kata imperialisme ini bisa digunakan untuk dan menetap dimana saja.

Dasar imperialisme awalnya bertujuan untuk menyebarkan ide-ide dan kebudayaan Barat ke seluruh dunia. Oleh karena itulah, imperialisme bukan hanya dilihat sebagai penindasan terhadap tanah jajahan tetapi sebaliknya dapat menjadi dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah, keperluan untuk mendapatkan bahan mentah adalah dampak dari terjadinya Revolusi Industri di Inggris. Pemahaman ini diartikan sebagai Imperialisme Kuno (*Ancient Imperialism*). Inti dari imperialisme kuno adalah semboyan *gold, gospel, and glory* (kekayaan, penyebaran agama dan kejayaan). Suatu negara merebut negara lain untuk menyebarkan agama, mendapatkan kekayaan dan menambah

kejayaannya. Imperialisme kuno berlangsung sejak penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugis pada abad XV-XVI. Mereka bertujuan mencari kekayaan berupa emas, menyebarkan agama Nasrani, dan berjuang demi kejayaan negara atau raja. Semakin luas wilayah yang dikuasai, semakin kuat dan termasyhurlah negara beserta rajanya. Sedangkan, imperialisme modern bermula di Inggris tahun 1870-an. Hal yang menjadi faktor pendorongnya adalah adanya kelebihan modal dan Barang di negara-negara Barat. Inti dari imperialisme modern adalah kemajuan ekonomi dan bertumpu pada industrialisasi. Selepas tahun 1870-an, negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari daerah jajahan di wilayah Asia, Amerika dan Afrika. Mereka mencari wilayah jajahan sebagai wilayah penyuplai bahan baku dan juga sebagai daerah pemasaran hasil industri mereka. Dasar Imperialisme ini dilaksanakan demi agama, mereka menganggap bahwa menjadi tugas suci agama untuk menyelamatkan manusia dari segala macam penindasan dan ketidakadilan terutama di negara-negara yang dianggap terbelakang seperti para misionaris Kristen yang menganggap misi penyelamat ini sebagai *The White Man Burden*.

Sebab-sebab munculnya Imperialisme:

- a. Keinginan untuk menjadi jaya, menjadi bangsa yang terbesar di seluruh dunia (*ambition, eertzucht*).
- b. Perasaan sesuatu bangsa, bahwa bangsa itu adalah bangsa istimewa di dunia ini (*racial superiority*).
- c. Hasrat untuk menyebarkan agama atau ideologi
- d. Letak suatu negara yang dianggap geografis tidak menguntungkan.
- e. Sebab-sebab ekonomi

## **2. Latar Belakang Penjajahan Bangsa Eropa di Indonesia**

Para pedagang dari Eropa membawa barang dagangan berupa rempah-rempah dan sutera dari Laut Tengah. Komoditas tersebut dibawa ke Venesia atau Genoa melalui para pedagang Portugis dan Spanyol yang aktif berdagang di Laut Tengah. Rempah-rempah dan sutera itu kemudian dibawa ke pasaran Eropa Barat, seperti Lisabon. Dari Lisabon rempah-rempah dibawa ke Eropa Utara oleh para pedagang Inggris dan Belanda. Rempahnya perdagangan di Laut Tengah, terganggu selama dan setelah berlangsungnya Perang Salib (1096-1291). Dengan jatuhnya kota

Konstantinopel (Byzantium) pada tahun 1453 ke tangan Turki Usmani, aktivitas perdagangan antara orang Eropa dan Asia terputus. Sultan Mahmud II, penguasa Turki menjalankan politik yang mempersulit pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya. Bangsa Barat menghadapi kendala krisis perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu bangsa Barat berusaha keras mencari sumber daya baru dengan melakukan penjelajahan samudera.

Ada beberapa faktor yang mendorong penjelajahan samudra/dilakukannya kolonialisme dan imperialisme oleh Bangsa Eropa, antara lain:

- a. Semangat *reconquista*, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam di mana pun yang dijumpainya sebagai tindak lanjut dari Perang Salib.
- b. Semangat *gospel*, yaitu semangat untuk menyebarkan agama Nasrani.
- c. Semangat *glory*, yaitu semangat memperoleh kejayaan atau daerah jajahan.
- d. Semangat *gold*, yaitu semangat untuk mencari kekayaan/emas.
- e. Perkembangan teknologi kemaritiman yang memungkinkan pelayaran dan perdagangan yang lebih luas, termasuk menyeberangi Samudra Atlantik.
- f. Adanya buku *Imago Mundi* yang menceritakan perjalanan Marco Polo ke Dunia Timur (1271-1292).
- g. Perjalanan Ordoric da Pardenone menuju Campa yang sempat singgah di Jawa pada abad ke-14. Ordoric melaporkan sekilas mengenai kebesaran Majapahit.
- h. Penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat seperti bola, matahari merupakan pusat dari seluruh benda-benda antariksa. Bumi dan benda-benda antariksa lainnya beredar mengelilingi matahari (teori Heliosentris).
- i. Kemajuan teknologi pada saat itu juga mendorong bangsa barat untuk melakukan penjelajahan yang pada akhirnya menemukan bumi Nusantara, penemuan seperti kompas, navigasi dan mesiu juga menjadi hal yang sangat penting. Hal itu dibuktikan dengan diketemukannya benua Amerika oleh Colombus.

Negara-negara yang memelopori penjelajahan samudera adalah Portugis dan Spanyol, menyusul Inggris, Belanda, Prancis, Denmark, dan lainnya. Untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tanggal 7 Juni

1494 lahirlah Perjanjian Tordesillas. Paus membagi daerah kekuasaan di dunia non-Kristiani menjadi dua bagian dengan batas garis demarkasi/khayal yang membentang dari kutub Utara ke kutub Selatan (Kartodirdjo, 1987). Daerah sebelah Timur garis khayal adalah jalur/kekuasaan Portugis, sedangkan daerah sebelah Barat garis khayal adalah jalur Spanyol. Pembagian garis ini dimaksudkan untuk memudahkan pelayaran dan mensukseskan misi yang mereka bawa ke Dunia Timur.



Gambar 12 Rute Kedatangan Bangsa Barat di Nusantara

Sumber: <https://belajarbaru1.blogspot.com/2017/07/rute-kedatangan-bangsa-barat-ke.html>

### 3. Indonesia Masa Portugis, Spanyol, dan VOC

#### a. Penjelajahan samudera oleh bangsa Portugis

Dari Lisbon, Portugis pada tahun 1486 Bartolomeo Diaz melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke Hindia Timur, namun gagal. Ia sampai di Afrika Selatan yang disebut Tanjung Harapan. Usaha Bartolomeus Diaz dilanjutkan oleh Vasco Da Gama yang menyusuri Pantai Timur Afrika dan pada 1498 ia berhasil sampai di Calicut India.

Perjalanan selanjutnya Portugis mencapai Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso d'Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka, dan pada tahun 1512 bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku (Ternate).

b. Penjelajahan samudera oleh bangsa Spanyol

Christopher Columbus mencoba mencari tanah Hindia dan informasi pusat rempah-rempah yang ramai dicari pada waktu itu tetapi sampai di kepulauan Bahama Amerika yang disangkanya adalah tanah Hindia pada 1492. Keberhasilan Columbus mendorong Magelhaens dan Del Cano untuk berlayar dalam rombongan besar, dan sampai di wilayah Maluku pada 1521. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku mengakibatkan perselisihan dengan Portugis yang sebelumnya sudah sampai di wilayah tersebut, sehingga pada 1534 perselisihan tersebut berakhir dengan adanya Perjanjian Saragosa.

c. Penjelajahan Bangsa Belanda

Lisbon sebagai ibukota Portugis dan pusat perdagangan rempah-rempah saat itu menimbulkan banyak perselisihan antar pedagang, salah satunya keputusan Belanda untuk melakukan pencarian sumber rempah-rempah ke daerah asalnya. Pada 1595, Cornelis de Houtman berangkat dan sampai di wilayah Banten. Kedatangan Belanda di Banten yang awalnya diterima baik oleh masyarakat setempat kemudian menimbulkan persaingan dan ketidaksenangan masyarakat Banten dan Belanda diusir dari wilayah tersebut.

Pada 1598 dibawah pimpinan Jacob Van Neck dan Van Waerwijck Belanda datang untuk kedua kalinya di Banten. Kali ini mereka diterima baik oleh penguasa Banten, karena pada saat itu hubungan Banten dengan bangsa Portugis sedang memburuk. Kedatangan orang-orang Belanda di Pelabuhan Tuban dan Maluku juga mendapat sambutan baik dari penguasa-penguasa setempat. Dengan sikapnya yang baik orang-orang Belanda mendapatkan suatu keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah. Hal ini mendorong orang-orang Belanda yang lain datang ke Indonesia, dengan semakin banyaknya orang-orang belanda ini menimbulkan persaingan diantara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Akibatnya mereka tidak lagi memperdulikan tinggi rendahnya harga rempah-rempah. Jelas ini sangat merugikan pedagang-pedagang Belanda itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini dibentuklah serikat dagang yang disebut VOC (*Vereenigde Oost Indische Campagnie*) atas usulan salah satu pembesar Belanda yang bernama Johan Van Olden Borneveld.

Adapun tujuan dibentuknya VOC di Indonesia adalah:

- a. Menjalankan politik monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia.
- b. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa maupun Bangsa-bangsa Asia.
- c. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda, sehingga dapat diperoleh keuntungan yang besar.
- d. Untuk melaksanakan politik kekuasaan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Dalam usaha-usaha untuk mencapai cita-cita tersebut maka satu persatu pelabuhan penting segera direbut dari penguasa setempat maupun bangsa Eropa yang lainnya. Setelah berhasil Belanda juga menerapkan politik *Divide Et Impera* (memecah dan menguasai) atau yang lebih dikenal dengan politik adu domba untuk menaklukkan satu persatu kerajaan di Indonesia. Setelah kerajaan itu takluk maka diterapkanlah sistem monopoli terutama untuk perdagangan rempah-rempah. Agar VOC dapat mempertahankan wilayahnya maka pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewanya, antara lain:

- a. Boleh membentuk tentara dan mendirikan benteng sendiri.
- b. Boleh membuat mata uang sendiri.
- c. Boleh mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai sendiri dari pangkat rendah sampai Gubernur Jendral
- d. Boleh berperang, berdamai, dan mengadakan perjanjian dengann raja-raja di negeri asing.
- e. Mendapat hak monopoli.

Untuk memperkuat kedudukannya maka diangkatlah seorang pmimpin yang disebut Gubernur Jendral. Gubernur Jendral yang pertama adalah Pieter Both (1610-1614). Kemudian yang kedua adalah John Pieterzoon Coen (1619). Para Gubernur tersebut ditempatkan di daerah Ambon sebagai pangkalan dagang yang paling kuat. Karena letak Ambon yang kurang strategis maka VOC berkeinginan untuk menguasai daerah Banten untuk dijadikan pangkalan dagang yang paling kuat. Namun VOC mengalami kesulitan menghancurkan kota Banten, Maka JP. Coen mendirikan kantor dagang didaerah muara sungai Ciliwung didaerah Jayakarta. Akibatnya terjadi persaingan antara VOC dengan EIC yang lebih dahulu mendirikan kantor dagang disana. Persaingan ini menimbulkan perang teluk di

Jayakarta. Ketika J.P Coen meminta bantuan pasukan ke Ambon, di Jayakarta terjadi perselisihan antara orang-orang Inggris dengan penguasa Banten. Orang-orang Inggris berhasil diusir dari Jayakarta. Waktu J.P Coen kembali Inggris sudah tidak ada. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk menduduki Jayakarta. Pada tahun 1619 kota Jayakarta berhasil dikuasai oleh Belanda dan namanya diubah menjadi *Batavia*, sesuai dengan nama nenek moyang bangsa Belanda yang bernama Bangsa *Bataf*. Dengan berdirinya Batavia sebagai pusat kompeni, maka kedudukan VOC semakin semakin kuat. Usaha VOC untuk menguasai perdagangan semakin menjadi lebih mudah. Sejak J.P. Coen berkuasa ia menjalankan politik monopoli dengan kekerasan melebihi dari pelaksanaan praktek monopoli yang dilakukan bangsa Portugis. Untuk melaksanakan peraturan ini, penguasa belanda melaksanakan *Pelayaran Hongi* (*Hongi* adalah armada perahu dagang besar yang dipersenjatai yang disebut kora-kora) yaitu pelayaran keliling yang dilakukan oleh Belanda untuk mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran peraturan yang dibuat oleh VOC.

Akhir dari VOC menurut J. C. van Leur dan W. Coolhaas bukan hanya diakibatkan adanya korupsi sebagai faktor utama dalam kemunduran dan jatuhnya VOC, mereka ingin menekankan bahwa EIC, yang didalamnya juga memiliki masalah yang sama yaitu korupsi, memiliki masalah lain seperti penyelewengan, patronase dan main pengaruh, dianggap sebagai kenyataan hidup dalam rezim lama dan tidak punah sampai saat ini. Sikap badan-badan pengurus kedua maskapai dagang tersebut (EIC dan VOC), sejak semula ditandai oleh kecurigaan terus-menerus terhadap ketidakjujuran para abdi mereka. Para pemilik kuasa menyadari bahwa korupsi tidak dapat dihindarkan jika dilihat dari rendahnya upah dari sebagian besar para pegawainya. Pada pertengahan abad 18 VOC bubar. Sebab-sebabnya bubarnya VOC adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakjujuran para abdi VOC, karena kesejahteraan abdi VOC tidak setara dengan gaji yang mereka terima;
- b. Kemunduran dinas militer VOC karena mutu korps perwiranya;
- c. Perang untuk menaklukkan daerahdaerah yang melakukan perlawanan yang dipimpin oleh pimpinan local setempat maupun ulama; dan
- d. Konfrontasi dengan Perancis di Eropa mempengaruhi runtuhnya VOC.

#### 4. Indonesia masa Penjajahan Inggris dan Belanda

##### a. Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda

Abad ke-19 merupakan suatu periode baru bagi imperialisme Belanda yang ditandai oleh politik kolonial yang berbeda sekali dengan politik colonial yang telah dijalankan sebelumnya. Kepentingan-kepentingan Belanda semula terbatas pada perdagangan, maka dalam periode ini Belanda mulai mengutamakan kepentingan politik.

Pada akhir abad ke-18 VOC bangkrut dan pada tahun 1800 kekayaan diambil alih kerajaan. Pemerintahan Belanda melanjutkan politik tradisional Kumpeni dengan tujuan memperoleh penghasilan sebagai upeti dan laba perdagangan, semuanya demi keuntungan kerajaan. Berdasarkan *Grundwet* (konstitusi Kerajaan Belanda) 1815, kekuasaan tertinggi atas wilayah jajahan berada di tangan raja. Demikian pula dengan kekuasaan undang-undang. *Staten Generaal* (parlemen) sama sekali tidak diikutsertakan di dalamnya. Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang *Commissaris Generaal*, yaitu C.Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, dan A.A. Buyskes, untuk mengambil alih jajahan Belanda di Asia dari tangan Inggris. Mereka diberikan kekuasaan besar mewakili Pemerintahan Agung (Raja). Sejak masa *Commissaris Generaal* inilah, sebutan *Oost Indië*, atau Hindia Timur, berganti menjadi *Nederlandsch Oost Indië* (Hindia Belanda Timur). Akan tetapi tidak lama kemudian nama tersebut berubah kembali menjadi *Nederlandsch Indië* (Hindia Belanda), seperti terlihat dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1816. Tugas pokok yang dibebankan kepada van der Capellen dan kawan-kawan adalah membangun kembali sistem pemerintahan yang baik di Hindia. Tujuannya agar daerah koloni ini segera dapat

memberikan keuntungan kepada negeri induknya, yang sudah banyak terlibat utang, termasuk utang-utang VOC. Akan tetapi kondisi politik di Hindia Belanda yang belum sepenuhnya aman sejak ditinggalkan Daendels.

Adapun yang menjadi landasan operasional di Hindia Belanda diatur berdasarkan *Regeering Reglement* (Peraturan Pemerintah, disingkat RR). Menurut peraturan ini, dalam menjalankan tugasnya gubernur jenderal (anggota *Commissaris Generaal*) didampingi oleh *Raad van Indië* yang beranggotakan empat orang. Gubernur jenderal bersama *Raad van Indië* inilah yang disebut sebagai Pemerintahan Agung di Hindia Belanda. Sejak tahun 1816, ada dua instansi yang

membantu pekerjaan Pemerintahan Agung di Batavia ini, yaitu *Generale Secretarie* (sekretaris umum) untuk membantu *Commisaris General dan Gouvernement Secretarie* (sekretaris pemerintahan) untuk membantu Gubernur Jenderal. Namun kedua lembaga itu berumur pendek dan dihapuskan pada tahun 1819. Kedudukannya kemudian digantikan oleh *Algemene Secretarie*, yang bertugas membantu gubernur jenderal (terutama memberikan pertimbangan keputusan).

Dalam tata pemerintahan kolonial, Gubernur Jenderal didampingi oleh Direksi atau departemen-departemen, yang namanya kemudian menjadi *Departementen van Algemeen Bestuur*. Dalam perkembangannya, lembaga ini seringkali mengalami perubahan, baik dalam susunannya maupun hierarkinya, akibat keadaan di Hindia Belanda sendiri maupun di Eropa (termasuk Negeri Belanda). Salah satu peristiwa yang membawa dampak cukup besar pada tata pemerintahan Hindia Belanda adalah revolusi yang terjadi di Eropa pada tahun 1848.

Sejak revolusi itu, dapat dikatakan bahwa di Eropa Barat tidak ada lagi raja yang berkuasa mutlak. Sebaliknya, para penguasa itu kini dibatasi oleh konstitusi. Dalam kasus raja Belanda, kekuasaannya dibatasi oleh *Grondswet* (konstitusi) tahun 1848. Meskipun ada upaya untuk melakukan modernisasi struktur birokrasi pemerintahan Hindia Belanda, namun dalam batas-batas tertentu struktur politik sebelumnya masih tetap dipertahankan, demi mempertahankan loyalitas, khususnya loyalitas para elit pribumi. Hal ini terlihat jelas dari struktur dan jabatan dalam organisasi pemerintahannya.

Jabatan-jabatan teritorial di atas tingkat kabupaten tetap dipegang oleh orang-orang Eropa/Belanda. Jabatan tertinggi yang dipegang oleh orang pribumi adalah kepala kabupaten, yaitu bupati. Bupati ini dibantu oleh seorang patih. Di bawah tingkat kabupaten terdapat kewedanaan yang dijabat oleh seorang wedana. Kecamatan, yang dikepalai seorang camat, merupakan wilayah di bawah kewedanaan. Sedangkan jabatan kepala desa pada dasarnya tidak termasuk dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial sehingga bukan merupakan anggota korp pegawai dalam negeri Hindia Belanda. Korps pegawai dalam negeri Hindia Belanda (*Departemen van Binnenland Bestuur*), terdiri atas pegawai bangsa Eropa dan pribumi. Korp pegawai Eropa disebut *Eropees bestuur* sementara korps pegawai negeri pribumi disebut *inland bestuur*. Kedua korp pegawai ini secara umum disebut *binnenland bestuur* (BB). Dalam bahasa pribumi BB ini disebut

*Pangreh Praja* (Pemangku Kerajaan). Para pejabat pribumi inilah yang disebut kaum priyayi, suatu istilah yang sebelumnya dipakai di kerajaan Jawa.

Selama masa *Interregnum* Inggris tahun 1811-1816, Raffles mengadakan suatu sistem administrasi yang sejajar dengan doktrin-doktrin liberal, yaitu persamaan hukum dan kebebasan ekonomi. Salah satu hal yang khas dari zaman pemerintahannya adalah hal pajak tanah (*landrente*). Yang diutamakan oleh Inggris adalah kepentingan perdagangan di tanah-tanah jajahan. Mereka menjual hasil-hasil industri di pasar Asia, dan untuk tujuan itu tanam wajib harus dihapus dan diganti dengan suatu sistem pajak, sehingga ekonomi uang itu dapat menciptakan suatu syarat pokok bagi pemasaran barang-barang produksi Inggris. Di samping aspek material, politik Raffles juga mempertunjukkan aspek ideal yaitu usaha mempraktekkan beberapa prinsip humaniter. Rakyat harus dibebaskan dari pemerasan para penguasanya dan harus pula dijamin keamanan, keadilan, dan pendidikannya. Ide-ide ini mengharuskan suatu perubahan total terhadap sistem lama, yaitu sistem pemerintahan tidak langsung. Sebagian besar dari perubahan-perubahan di dalam sistem politik kolonial yang dibuat oleh Raffles tersebut, akhirnya kandas atau dihapus oleh Belanda sebelum waktu berlakunya habis.

b. Sistem Tanam Paksa dan Politik Pintu Terbuka

1) Sistem Tanam Paksa

Peperangan yang dihadapi VOC maupun kerajaan Belanda tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Eropa, sebagai dampak adanya Revolusi Perancis. Akibatnya kas negara defisit, sebab peperangan itu memerlukan biaya sangat besar. Untuk itu pemerintah jajahan melaksanakan *Cultur Stelsel* (Sistem Tanaman) pada periode 1830-1870. Munculnya sistem *Batig Slot*, atau *Saldo plus*. Artinya upaya memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dengan modal yang sedikit atau tanpa modal. Disebut tanpa modal uang tetapi modal kekuasaan di tanah jajahan. Dengan kata lain sistem tanaman itu dilakukan dengan paksa karena itu *Cultur Stelsel* disebut juga Tanam Paksa.

*Culturstelsel* di Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatif seseorang yang berpengalaman dalam urusan tersebut yaitu Van Den Bosch. Tujuan Van Den Bosch dengan sistem *culturstelsel* di Jawa itu adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasaran dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut Bosch menganjurkan pembudidayaan berbagai produk seperti

kopi, gula, indigo (nila), tembakau, teh, lada, kayumanis, jarak, dan lain sebagainya. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani dipaksakan oleh pemerintah kolonial untuk memproduksinya dan sebab itu tidak dilakukan secara voluter (Fasseur, 1992: 239).

Dari pelaksanaan tanam paksa, terdapat beberapa dampak yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Dampak negatif tanam paksa antara lain adalah;

- a) Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor seringkali mengganggu kegiatan penanaman padi.
- b) Persiapan lahan untuk tanaman kopi biasanya berbenturan dengan penanaman padi.
- c) Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang sangat besar sehingga memberatkan petani.
- d) Budidaya tebu dan nila menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi.
- e) Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melipatgandakan kebutuhan akan hewan
- f) Ternak petani, tidak hanya untuk pekerjaan di ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan.
- g) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit dimana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis.
- h) Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843). Demak (1849), dan Grobongan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Di samping itu, juga terjadi penyakit busung lapar (hongorudim) dimana-mana (Ricklefs M.C, 2008),  
Sedangkan dampak positif dari pelaksanaan sistem tanam paksa antara lain adalah:
  - a) Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru
  - b) Meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan.
  - c) Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pabrikan di pedesaan.

d) Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa, seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik dan Gudang untuk hasil budidayanya. (Ricklefs M.C, 2008),

2) Politik Pintu Terbuka

Politik pintu terbuka (*Open Door Policy*) mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1870. Ini merupakan salah satu politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, dimana golongan liberal Belanda berpendapat bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta, sementara pemerintah cukup berperan mengawasi saja. Diawalnya liberalisme di Hindia-Belanda ditandai dengan penetapan kebijakan Undang-undang Agraria pada tahun 1870. Kebijakan tersebut meliputi;

a) *Agrarische Wet*, yaitu kebijakan mengenai pertanahan.

b) *Suiker Wet*, yaitu Undang-undang membebaskan para pengusaha dalam menguasai perusahaan gula yang dimonopoli oleh pemerintah.

c) *Agrarische Besluit*, *Agrarische Besluit* merupakan peraturan yang ditetapkan oleh raja Belanda, undang-undang ini diatur guna menjelaskan hal yang lebih spesifik terhadap *Agrarische Wet*.

d) *Koelie Ordonantie* atau kontrak kerja yang dilakukan oleh pemerintah

e) *Poenalie Sanctie* merupakan aturan yang diberlakukan dalam *Koelie Ordonantie*, yaitu berupa bermacam sistem penyiksaan yang diberlakukan terhadap para pekerja yang melanggar aturan

Perubahan arah politik di negeri Belanda mulai berubah setelah pemilihan umum tahun 1901. Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip dasar kebijakan baru tersebut: edukasi, emigrasi, dan irigasi (pendidikan, perpindahan penduduk, dan pengairan). Kemudian awal abad ke-20 ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Dengan adanya perubahan di dalam tata pemerintahan yang dimulai pada tahun 1903 maka system desentralisasi mulai dilaksanakan, yang konsesinya di satu pihak memberi otonomi lebih banyak kepada pemerintah daerah dan di lain pihak mendirikan badan-badan perwakilan.

Dibentuknya dewan-dewan rakyat (*Volksraad*), lembaga-lembaga tersebut menjadi wadah tempat latihan politik bagi banyak elit Indonesia dan juga dapat

mendekatkan orang-orang Indonesia ini dengan cara-cara, aspirasi, dan pola-pola pemikiran Barat. Penekanannya adalah individu dan mendasarkan soal-soal keanggotaan, kekuasaan, dan hak-hak menurut ukuran Barat. Volksraad merupakan sumber kecaman dan pertentangan terhadap pemerintah kolonial. Volksraad juga tidak mempunyai pertanggungjawaban dan tidak memiliki hak-hak parlemen. Bagi orang Indonesia, dengan didirikannya Volksraad, maka keinginan-keinginan politik secara resmi dapat disalurkan kepada pemerintah kolonial.

### **5. Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Pemerintah Kolonial**

- a. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan Portugis
  - 1) Kedatangan bangsa Portugis tahun 1511 di Malaka mendapat penolakan dari rakyat Malaka. Setelah pertempuran sengit, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Dinasti Ming merupakan sekutu dari kerajaan Malaka, sehingga mereka membantu menyerang Portugis.
  - 2) Demikian pula kekuasaan Portugis di Aceh mendapat penolakan dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1528). Pada 1568, Aceh mendapat bantuan dari Turki untuk menyerang Portugis, tetapi serangan tersebut mengalami kekalahan. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, Kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1639) armada kekuatan Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka.
  - 3) Akibat kekuasaan Portugis di Malaka, aktivitas perdagangan di Pelabuhan Malaka menjadi terganggu. Sultan Demak Raden Patah mengutus Adipati Unus menyerang Portugis di Malaka pada 1512 dan 1513 kemudian baru berhasil mengusir Portugis 1527 di Sunda Kelapa ketika dipimpin oleh Fatahillah.
  - 4) Berdasarkan Perjanjian Saragosa, Portugis tetap menguasai daerah-daerah di Maluku. Sejak itu pengaruh Portugis di Maluku semakin besar. Portugis berhasil memaksakan monopoli perdagangannya, sehingga rakyat Maluku melakukan penyerangan terhadap Portugis. Perlawanan Rakyat Ternate dipimpin

oleh Sultan Hairun dan berakhir dengan perjanjian pada tahun 1570. Perjuangan dilanjutkan oleh Sultan Baabullah.

b. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan Spanyol

Periode pertama Spanyol di Minahasa ada di masa 1520-1562, dan periode kedua 1580-1694. Di tahun 1562, Spanyol digusur Portugis dari perairan Maluku dan Sulawesi. Peristiwa itu terjadi terutama karena perjanjian Saragosa antara kedua bangsa. Karena itu Spanyol kemudian memusatkan kekuasaannya di Manila Filipina. Perlawanan terhadap kekuasaan Spanyol dilakukan oleh rakyat Sulawesi

c. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kekuasaan Belanda

Pada tahun 1605, VOC berhasil merebut Maluku dari Portugis. Sikap sewenang-wenang

Belanda dan upayanya untuk memaksakan monopoli perdagangan kepada rakyat, menimbulkan perlawanan rakyat di berbagai tempat, antara lain Mataram yang dipelopori oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613 – 1645), Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin (1654-1669), Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1650-1682), rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura (1817), Minangkabau diawali oleh Datuk Bandaro dan dilanjutkan oleh Imam Bonjol (1821-1837), Perang Diponegoro (1825-1830), rakyat Banjar (1859-1863) salah satunya oleh Pangeran Antasari, rakyat Bali (1846-1868), perang Sisingamaraja XII (1870-1907), dan perang Aceh (1873-1906).

d. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Inggris.

- 1) Perlawanan Kraton Yogyakarta terhadap Penjajahan Bangsa Inggris
- 2) Perlawanan Rakyat Palembang terhadap Penjajahan Bangsa Inggris

## **6. Masa Pergerakan Nasional Indonesia**

a. Pengertian Pergerakan Nasional

Pergerakan Nasional merupakan sebuah babak baru dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme yang telah lama membelenggu Sebagian besar masyarakatnya. Pada masa ini strategi perlawanan bangsa Indonesia berubah, dari sebelumnya strategi perlawanan lebih banyak menggunakan kontak fisik atau peperangan, maka pada masa Pergerakan Nasional intelektualitas menjadi senjata paling ampuh untuk melawan penjajahan.

Terminologi pergerakan berarti segala hal yang dilakukan oleh para agan dalam organisasi modern untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Oleh Sebab itu Pergerakan Nasional adalah sebuah bentuk perlawanan terhadap penjajah yang tanpa menggunakan kekuatan senjata, namun menggunakan intelektualitas yang tertuang lewat berbagai organisasi baik dibidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Masa Pergerakan Nasional Indonesia adalah ketika lahirnya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan berakhir ketika Pemerintah Kolonial Belanda takluk kepada Pemerintah Pendudukan Jepang tahun 1942.

### b. Faktor Penyebab Munculnya Pergerakan Nasional di Indonesia

Pada periode tanam paksa dan politik pintu terbuka, trilogy van deventer (irigasi, migrasi dan Pendidikan) memberikan ruang yang cukup bagi bangsa Indonesia untuk merubah pola perjuangan sejak awal abad 20. Terdapat beberapa factor munculnya pergerakan nasional di Indonesia .

Faktor Internal meliputi:

- 1) Kekejaman Pemerintah Kolonial Belanda yang melakukan penindasan pada masyarakat Indonesia.
- 2) Ingatan kejayaan masa lalu.
- 3) Munculnya golongan terpelajar.
- 4) Berkembangnya Pers di Indonesia.
- 5) Semakin populernya penggunaan Bahasa Melayu.

Faktor eksternal meliputi;

- 1) Munculnya Paham-paham baru di dunia seperti Nasionalisme, Liberalisme, Demokrasi, Sosialisme, Komunisme, Pan Islamisme, dan lain-lain.
- 2) Munculnya Nasionalisme di negara-negara Asia-Afrika yang dipelopori oleh tokoh-tokoh terkenal dari negara itu seperti Mahatma Gandhi (India), Sun Yat Sen (Cina), Ho Chi Minh (Vietnam), Mustafa Kemal Pasha (Turki), Jose Rizal (Filipina), Arabi Pasha (Mesir), dan lain-lain.
- 3) Kemenangan Jepang atas Rusia, kemenangan Jepang ini dianggap sebagai kemenangan Bangsa Asia terhadap Bangsa Kulit Putih yang sejak dahulu dianggap mendominasi Asia. Kemenangan ini memunculkan optimisme bagi negara-negara yang masih terjajah di Asia dan Afrika untuk lebih berani melawan.

### c. Organisasi Pergerakan Nasional di Indonesia

1) Budi Utomo

Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini dianggap sebagai organisasi yang memulai era Pergerakan Nasional karena dianggap sebagai organisasi modern pada masanya. Dr. Wahidin Sudirohusodo menjadi inspirator dari lahirnya organisasi ini. dia berhasil meyakinkan beberapa mahasiswa STOVIA, salah satunya adalah Sutomo untuk membentuk sebuah organisasi yang berguna untuk memajukan kebudayaan Jawa. Sutomo dan beberapa temannya yang lain akhirnya menjadi penggagas awal dari organisasi ini. Budi Utomo berasal dari kata Budi (Boedi) yang berarti perangai atau sifat dan Utomo (Oetomo) yang berarti baik atau luhur. Maka dari itu organisasi ini dibuat dengan maksud agar bisa mencapai suatu keluhuran budi. Pada masa awal berdirinya organisasi ini juga sebenarnya juga cukup sulit dalam masalah keuangan. Namun berkat sumbangan-sumbangan dari anggotanya maka konferensi pertama bisa didanai. Adapun tujuan Budi Utomo untuk kali pertama itu memang belum menunjukkan sifatnya yang terlalu nasional. Pada awalnya pembentukan organisasi ini memang untuk mengakomodir kebudayaan Jawa. Selain itu keanggotaan dari organisasi juga terbatas pada mereka dari pulau Jawa dan Madura, serta terbatas hanya untuk golongan tertentu terutama priyayi. Tujuan perkumpulan tersebut pada mulanya adalah mencapai kemakmuran yang harmonis untuk nusa dan bangsa Jawa dan Madura.

Organisasi Budi Utomo adalah organisasi yang bersifat kooperatif, artinya organisasi ini memaperaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu. Hal ini merupakan strategi agar organisasi ini bisa bertahan lama. Kongres pertama dari organisasi ini diselenggarakan pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Adapun hasil dari kongres tersebut disepakati beberapa hal, yaitu:

- a) Boedi Oetomo tidak terlibat dalam urusan politik,
- b) Fokus utama dari organisasi ini adalah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan
- c) Ruang gerak organisasi ini hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura (kemudian ditambah Bali dengan alasan memiliki budaya yang sama) (Pols,2019).

2) Sarekat Islam

Organisasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang diprakarsai oleh H. Samanhudi dan RM. Tirta Adhi Suryo.

Berubah menjadi Sarekat Islam dan diketuai oleh HOS Cokroaminoto. Salah satu tujuan awal dari dibentuknya organisasi ini adalah untuk melawan dominasi pedagang Tiong hoa dalam perdagangan batik. Secara spesifik organisasi Sarekat Islam berlandaskan nasionalisme ekonomi, tidak bersifat politik. Tujuannya adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonominya agar dapat menghadapi bangsa Asing dengan mendirikan perkumpulan koperasi.

Pada perkembangan selanjutnya organisasi ini kemudian terutama antara tahun 1915-1917, SI mulai disusupi oleh unsur-unsur komunis. Tokoh awal komunis di Indonesia yaitu Hendrik Sneevliet mencoba untuk memasukan beberapa kadernya dalam tubuh SI, terutama SI cabang Semarang. Tokoh-tokoh SI Semarang yang dimaksud seperti Semaun, Darsono, dan lain-lain. Mereka mengubah garis perjuangan SI yang menjadikan organisasi ini cukup militant terhadap pemerintah dengan banyaknya protes yang mereka sampaikan pada Pemerintah Kolonial Belanda. Sarekat Islam kemudia terpecah menjadi dua yaitu SI Putih dan SI Merah, SI Putih adalah kubu HOS. Cokroaminoto dan H. Agus Salim serta SI Merah adalah kubu Semaun dan Darsono.

SI kemudian berganti nama menjadi Partai Sarekat. Hal ini sejalan dengan sifatnya organisasi ini yang semakin terus terang menentang pemerintah Kolonial Belanda. Kemudian pada kongres yang dilangsungkan pada tahun 1927 partai ini menegaskan tujuannya bahwa tujuannya adalah mencapai kemerdekaan nasional atas dasar agama Islam. Perubahan nama kembali terjadi pada Partai Sarekat Islam dimana ada penambahan kata Indonesia menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perubahan tersebut karena pengaruh golongan intelektual yang baru saja pulang dari negeri Belanda seperti Dr. Sukiman.

### 3) *Indische Partij*

*Indische Partij* (IP) merupakan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bercorak politik. Organisasi ini didirikan oleh tiga orang yaitu Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (Danudirdjo Setiabudi), Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 dan merupakan organisasi campuran indo dengan bumiputera. Organisasi ini juga mengkampanyekan untuk tidak terlalu melekatkan identitas lokal, namun lebih mengarah pada identitas nasional sebagai masyarakat Hindia.

### 4) Perhimpunan Indonesia

Pada awalnya organisasi ini bernama Indische Vereeniging (IV) atau Perhimpunan Hindia pada tahun 1908 di Belanda, ditahun yang sama ketika berdirinya Budi Utomo di Indonesia, keduanya merupakan organisasi yang moderat. Organisasi ini juga pada awalnya merupakan wadah para siswa-siswa asal Indonesia yang bersekolah di Belanda. Namun setelah mendapatkan pengaruh dari tokoh Indische Partij yaitu tiga serangkai yang diasingkan ke Belanda, organisasi ini mulai berkembang menjadi organisasi yang nonkooperatif pada pemerintah.

Semakin kedepan Organisasi ini jadi semakin mengarah pada organisasi politis, terutama ketika dimasuki oleh para mahasiswa kritis seperti Mohammad Hatta, Nazir Datuk Pamuntjak, Iwa Kusuma Sumantri, dan lain-lain. Pada tahun 1923 Iwa Kusuma Sumantri selaku ketua baru memberikan penjelasan adanya tiga asas pokok Indische Vereeniging yakni: (1) Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri, (2) agar dapat menentukan nasibnya sendiri bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan serta kemampuan sendiri, dan (3) dengan tujuan melawan Belanda, maka bangsa Indonesia harus bersatu. Dan untuk mencapai ketiga tujuan tersebut cara yang paling efektif adalah dengan mempersatukan kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya kata Indische digantikan dengan Indonesische, kemudian barulah berubah menjadi Perhimpunan Indonesia.

Perhimpunan Indonesia dipandang sebagai salah satu organisasi terkemuka baik dilihat dari Indonesia, maupun sepek terjangnya diluar negeri. Disamping itu banyak kalangan yang menilai organisasi ini juga menggambarkan dengan jelas tujuan kemerdekaan Indonesia lewat Manifesto Politik. Adapun Manifesto Politik yang dicetuskan dalam organisasi PI ada tiga poin, yaitu:

- a) Rakyat Indonesia sewajarnya diperintah oleh pemerintah yang dipilih mereka sendiri:
- b) Dalam memperjuangkan pemerintahan sendiri itu tidak diperlukan bantuan dari pihak mana pun dan;
- c) Tanpa persatuan kukuh dari pelbagai unsur rakyat tujuan perjuangan itu sulit dicapai.

##### 5) Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912. Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi yang

bertujuan melakukan pembaharuan agama Islam yang bersifat reformis dan modernis. Organisasi ini juga bertujuan mengembalikan Kembali ajaran murni Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Muhammadiyah tidak hanya bergerak pada bidang dakwah keagamaan namun juga terjun ke ranah sosial, diantaranya adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah keagamaan atau sekolah Muhammadiyah, rumah untuk anak yatim piatu, balai pengobatan serta rumah sakit

### 6) Nahdhatul Ulama (NU)

NU adalah sebuah organisasi Islam didirikan pada 13 Januari 1926. Sama halnya dengan Muhammadiyah, NU juga tidak hanya bergerak pada bidang dakwah Islam namun juga memperluas cakupannya dengan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasinya ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

### 7) Partai Komunis Indonesia

Partai merupakan kelanjutan dari organisasi Indische Sociaal Democratische Vereeninging (ISDV), sebuah organisasi sosial komunis yang didirikan oleh Hendrik Sneevliet. Partai ini didirikan pada di Semarang pada tahun 1922 dengan nama Partai Komunis Hindia (PKH), dan pada tahun 1924 berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) (Mcvey, 2010). PKI dengan mudah bisa menggandeng massa dari golongan buruh, petani, dan pekerja lainnya. Hal ini disebabkan karena propaganda PKI dianggap sejalan dengan nasib yang dialami golongan-golongan tersebut

### 8) Partai Nasional Indonesia

Partai ini berawal dari kelompok Studi Bandung (Algemene Studi Club) serta kelompok Studi Surabaya. Kemudian para anggotanya, termasuk diantaranya adalah Ir. Soekarno mendirikan partai yang kemudian diberi nama Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927.

PNI memiliki tiga prinsip, yaitu: kesadaran nasional, kemauan nasional serta perbuatan nasional. Sedangkan asas perjuangan PNI ada tiga, yaitu:

- a) Self-Help, yaitu bekerja dengan kemampuan sendiri.
- b) Non-Kooperatif, yaitu tidak bekerja sama dengan Belanda.
- c) Dan Sosio-Demokrasi (Marhaenisme) yaitu pencerahan rakyat.

Sedangkan tujuan dari partai ini sendiri adalah Indonesia merdeka. Partai ini dimasukkan kedalam partai yang radikal sehingga diawasi oleh pemerintah (Ricklefs, 2010).

#### **D. Rangkuman**

1. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia adalah sistem yang direk (langsung) maupun dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, ada hirarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani pribumi dan layanan sipil Eropa.
2. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 dan menjelang tahun 1840 sistem ini telah berjalan di Jawa dan di luar Jawa. Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak *in natura*, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka.
3. Pelaksanaan sistem tanam paksa mengakibatkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Indonesia.
4. Latar belakang diterapkannya sistem pintu terbuka di Indonesia pada tahun 1870 antara lain adalah berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari Revolusi Perancis dan Revolusi Industri sehingga sistem tanam paksa tidak sesuai lagi untuk diteruskan.,
5. Politik pintu terbuka adalah pelaksanaan politik kolonial liberal di Indonesia, dimana kegiatan ekonomi di Indonesia ditangani oleh pihak swasta, sementara

## **Pembelajaran 4. Pendudukan Jepang, Proklamasi, dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan**

### **A. Kompetensi**

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 4. Pendudukan Jepang, Proklamasi, dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan yang akan dicapai pada pembelajaran ini, adalah guru P3K mampu;

1. Menganalisis pelaksanaan pemerintahan militer Jepang di Indonesia
2. Menganalisis kondisi sosial masyarakat dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia
3. Menganalisis persiapan dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
4. Menganalisis perang dan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 4. Pendudukan Jepang, Proklamasi, dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan latar belakang pemerintahan militer Jepang di Indonesia.
2. Menganalisis strategi pergerakan nasional pada masa Pemerintahan Militer Jepang.
3. Menganalisis aspek perubahan-perubahan akibat pemerintahan militer Jepang
4. Mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat pada masa Pendudukan Jepang di Indonesia.
5. Menganalisis dampak pendudukan Jepang terhadap masyarakat Indonesia.
6. Menjelaskan persiapan menuju kemerdekaan Indonesia.

7. Mengidentifikasi perbedaan pendapat antar kelompok menjelang proklamasi kemerdekaan RI
8. Menganalisis pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
9. Mengidentifikasi perjuangan fisik dan konfrontasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI.
10. Mengidentifikasi perjuangan diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI.
11. Menganalisis pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Pengakuan Kedaulatan

### **C. Uraian Materi**

#### **1. Pemerintah Militer Jepang di Indonesia**

##### **a. Latar Belakang Pemerintahan Militer Jepang di Indonesia**

Kedatangannya di Indonesia merupakan bagian dalam usahanya untuk membangun suatu imperium di Asia (Marwati, 1984). Munculnya imperialisme Jepang ini didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang penting ialah keberhasilan Restorasi Meiji di Jepang yang berdampak pada proses modernisasi di berbagai bidang kehidupan. Sebagai akibat dari kemajuan industri yang pesat di Jepang, ditempuhlah strategi ekspansi untuk mencari bahan mentah dan daerah pemasaran baru, yang dalam prakteknya juga sebagai sumber bahan pangan.

Imperialisme Jepang didorong pula oleh filsafat Hakko Ichiu, yaitu ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Jepang sebagai negara yang telah maju, mempunyai kewajiban untuk "mempersatukan bangsa-bangsa di dunia dan memajukannya" (Moedjanto, 1992). Cita-cita Jepang untuk membangun Kawasan Persemakmuran Bersama Asia Timur Raya di bawah naungannya, dicoba direalisasikan dengan mencetuskan Perang Asia Timur Raya yang picunya dimulai dengan penyerangan mendadaknya atas pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1941. Philipina pada bulan Januari 1942 diduduki dan segera disusul dengan pendudukan Singapura pada bulan Februari 1942, dan selanjutnya giliran Indonesia pada bulan Maret 1942.

Jepang tidak hanya ingin mengenyahkan kekuasaan politik bangsa Barat di kawasan Asia Pasifik, melainkan sebagaimana yang dicita-citakannya juga ingin menjadi "Tuan Besar" di Asia Pasifik. Invasi militer atau perang yang dikobarkan oleh Jepang tersebut bagi bangsa Asia Tenggara – khususnya Indonesia – dirasakan sebagai suatu malapetaka baru atau paling tidak dirasakan sebagai suatu penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia; yang peran tersebut selama ini telah dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas: pertama, menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia, dan kedua, memobilisasikan rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Awal kedatangan Jepang di Indonesia secara umum diterima dan tanggap dengan baik oleh masyarakat. Hal ini disebabkan disamping propaganda yang dilakukan secara intensif sebelum mereka tiba, yang dikoordinir melalui bagian propaganda (*Sendenbu*), juga dipengaruhi oleh sikap pemerintah kolonial Belanda yang selalu mempertahankan prinsip ketenangan dan keteraturan (*rust en orde*) dengan tindakan-tindakannya yang mengecewakan kaum pergerakan. Disamping itu bagi masyarakat pedesaan di Jawa terdapat kebanggaan terhadap bangsa Jepang yang dapat mengalahkan Sekutu, yang dengan demikian itu membawa pengharapan pulihnya saat-saat normal yang dinanti-nantikannya.

Sikap masyarakat pedesaan Jawa juga dipengaruhi oleh ramalan Jayabaya, yang secara tidak langsung telah mengarahkan pandangan masyarakat untuk menyambut kedatangan "*wong kuntet kuning saka lor*" yang hanya akan berkuasa di Indonesia "*seumur jagung*". Kata-kata ini dipahami sebagai suatu keadaan baru akibat perginya Belanda dan datangnya Jepang, dan Jepang akan memerintah dalam waktu yang tidak lama, sesudah itu bangsa Indonesia akan "merdeka". Pemahaman yang berkembang seperti ini telah memberikan harapan akan hari kemudian yang lebih baik. Sartono Kartodirjo (1985) menyebutnya sebagai motivasi spekulatif teoritis masyarakat Jawa terhadap datangnya masa kebahagiaan.

Kekuasaan fasisme Jepang di Indonesia disusun dengan tiga kekuasaan yakni:

- 1) Tentara Ke-16 di pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.
- 2) Tentara Ke-25 dipulau Sumatera dengan pusatnya di Bukittinggi.

- 3) Armada Selatan Ke-2 di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat dengan pusatnya di Makasar.

**b. Strategi Pergerakan Nasional pada Masa Pemerintahan Militer Jepang**

Pemerintahan Militer Jepang pada mulanya menunjukkan kelunakan karena berbagai kepentingan. Tetapi hal ini tidak lama, karena Jendral Imamura sebagai penguasa tertinggi (*Gunsireikan* kemudian *Seiko Sikikan*) Pemerintahan Militer Jepang di Jawa mulai mengubah politik lunaknya dengan mengeluarkan maklumatnya tertanggal 20 Maret 1942 yang berisi tentang larangan terhadap segala macam pembicaraan, pergerakan dan anjuran atau propaganda dan juga pengibaran sang Saka Merah Putih serta menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang sudah diijinkan sebelumnya (Mudjanto, 1992).

Dalam kerangka perjuangan dimasa Pemerintahan Militer Jepang yang bersituasi semacam itu, tokoh-tokoh nasionalis mulai mengambil sikap dalam kerangka strategi perjuangannya. Hatta dan Syahrir yang telah bersahabat lama, memutuskan untuk memakai strategi-strategi yang bersifat saling melengkapi dalam situasi baru kekuasaan Jepang (Rose, 1987). Hatta akan bekerjasama dengan Jepang dan berusaha mengurangi kekerasan pemerintahan mereka serta memanipulasi perkembangan-perkembangan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Syahrir akan tetap menjauhkan diri dan membentuk suatu jaringan "bawah tanah" yang terutama didukung oleh para mantan anggota PNI Baru. Soekarno yang telah dibebaskan oleh Jepang dari Sumatra segera bergabung dengan Hatta, yang kemudian segera mendesak kepada Jepang untuk membentuk suatu organisasi politik massa di bawah pimpinan mereka (Ricklefs, 1992).

Awal tahun 1943 usaha kearah mobilisasi dari pemerintah pendudukan mulai memberi prioritas tinggi terhadap gerakan-gerakan pemuda. Korps Pemuda yang bersifat semi militer (*Seinendan*) dibentuk pada bulan April 1943. Korps ini mempunyai cabang- cabang sampai ke desa-desa. Kemudian disusul dengan pembentukan Korps Kewaspadaan (*Keibodan*) sebagai organisasi polisi. Demikian juga dibentuk Pasukan Pembantu (Heiho) sebagai bagian dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang di Indonesia.

Kemudian dibentuk Jawa Hokokai (kebangkitan Rakyat Jawa) pada 1 maret 1944. Pimpinan tertinggi adalah Gunseikan. Jawa Hokokai merupakan hasil peleburan

dari Fujinkai (perkumpulan Kaum Wanita), Masyumi (Majelis Sura Muslim Indonesia), Kakyō Sokai (Perhimpunan Cina); *Taiku Kai* (Perkumpulan Oleh Raga); Keimin Bunka Syidosyo (Himpunan Kebudayaan), dan sebagainya.

Propaganda Pemerintahan Militer Jepang dilancarkan terus; Misalnya Gerakan Tiga A: Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dibawah pimpinan Mr. Syamsudin. Semboyan: Jepang dan Indonesia sama-sama; Asia untuk bangsa Asia; kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan sebagainya bertujuan menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang menyelesaikan perang Asia Timur Raya. Disamping itu pula dibentuk Pemuda Asia Raya dibawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto. Pemuda Asia Raya ini kemudian diganti namanya menjadi Seinendan, pada tanggal 29 April 1942. Organisasi ini bekerjasama dengan Putera dibawah pimpinan Empat Serangkai Indonesia.

Dalam bidang kebudayaan, siasat Jepang untuk memainkan dan menanamkan kebudayaan Jepang di Indonesia, dilakukan bersama -sama dengan menggiatkan kebudayaan Indonesia untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Guna mempergiat semangat belajar bahasa Jepang, diberikan tunjangan-tunjangan istimewa kepada mereka yang telah menunjukkan kecakapannya berbahasa Jepang dalam tingkatan *dai-tji* (dasar), *dai-ni* (menengah), *dai-san* (atas), *dai-jon* (tinggi), dan *dai-go* (lanjut).

Perkembangan Perang Dunia II di Eropa di mana sekutu Jepang seperti Jerman dan Italia mulai mengalami kekalahan diberbagai front pertempuran juga dialami Jepang sendiri dalam berbagai front di Asia.. Jepang sangat membutuhkan bantuan dari daerah-daerah yang didudukinya. Untuk itu perlu dibentuk berisan semi-militer dan militer di Indonesia dikenal dengan Pembela Tanah Air (Peta) (Boei Giyugun). Disamping Peta, juga penduduk diikutsertakan membantu perang. Tanggal 8 Januari 1944 diperkenalkan tonarigumi (rukun Tetangga). Disamping Peta, Jepang juga membentuk Heiho (Pembantu tentera). bila Peta bertugas membela daerahnya masing-masing, maka Heiho bertugas membantu Jepang apabila diperlukan.

Pada bulan Maret 1943 Gerakan Tiga A dihapuskan dan digantikan dengan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Meski demikian, tidak sedikit perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Misalnya Di Tasikmalaya, Indramayu, Singapura, Banten, dan sebagainya. Pemberontakan terhebat terjadi pada 14 Pebruari 1945 yang

dilakukan oleh anggota-anggota Peta dibawah pimpinan Supriyadi. Namun semua pemberontakan itu dapat ditindas dengan kejam oleh Jepang.

Sementara itu kemenangan Sekutu di Eropa maupun di pasifik seperti di Sailan, Gauam, Marina, megakibatkan perubahan politik Jepang. Kabinet Tojo jatuh pada 18 Juli 1944 dan digantikan dengan kabinet Kaiso pada 22 Juli 1944. Supaya mendapatkan bantuan sepenuhnya dari rakyat Indonesia, Kabinet Kaiso menjanjikan Dokutitzu (kemerdekaan) kepada Indonesia di kemudian hari.

**c. Aspek Perubahan-Perubahan Akibat Pemerintahan Militer Jepang**

Pendudukan Jepang telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar pada masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya di Jawa.

• **Perubahan dalam Aspek Politik Pemerintahan di Indonesia**

Adanya kekuasaan pemerintahan militer Jepang dengan adanya hierarki struktur pemerintahan daerah di Jawa sebagai berikut:

Lembaga	Pimpinan
Syu (Karesidenan)	Syuchu
Si (Kotamadya)	Sicho
Ken (Kabupaten)	Kencho
Gun (Kawedanan)	Guncho
Son (Kecamatan)	Soncho
Ku (Desa/Kelurahan)	Kuncho

Dalam tatanan kehidupan politik tradisional di tingkat pedesaan, pemerintah Jepang dengan orientasi ekonominya telah melanggar batas-batas otonomi pemerintahan desa. Kepala desa bagi masyarakat merupakan simbol pengayom yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan ketentuan dan kriteria tertentu secara demokratis. Tetapi pada masa pendudukan Jepang, proses pemilihan dan pengangkatan kepala desa dilakukan melalui serang-kaian prosedur seleksi dan tes yang dibuat oleh pemerintah Jepang. Hal itu dimaksudkan untuk memilih kepala desa yang mengerti administrasi pemerintahan dan sekaligus untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak menyukai pemerintahan Jepang. Dengan demikian pada masa itu kepala desa dilibatkan langsung dalam struktur

pemerintahan administrasi Jepang dengan aturan-aturan yang dipaksakan.

- **Perubahan Sosial Ekonomi**

Bentuk eksploitasi ekonomi yang berimplikasi terhadap perubahan sosial ekonomi secara mendasar pada masa pendudukan Jepang di Jawa ialah diberlakukannya politik penyerahan padi secara paksa. Logika politik ekonomi ini didasarkan pada kebutuhan bahan pangan yang makin meningkat bagi tentara Jepang di front-front pertempuran. Proses eksploitasi ekonomi tersebut terlihat akibatnya secara mendasar pada kehidupan masyarakat pedesaan. Padahal dipahami bahwa perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani Jawa menurut James C. Scott (1989:4- 20) ialah petani yang subsisten, yaitu ia sekaligus merupakan satu unit produksi dan konsumsi. Sehingga masalah yang dihadapi oleh petani ialah bagaimana dapat menghasilkan beras untuk makan sekeluarga, untuk membeli barang kebutuhan dan untuk memenuhi tagihan-tagihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dari pihak luar. Implikasi dari penyerahan wajib tersebut ialah meningkatnya angka kematian dan menurunnya derajat kesehatan masyarakat.

- **Perubahan Mentalitas Masyarakat**

Praktek-praktek romusha merupakan bentuk yang sangat nyata dari praktek eksploitasi tenaga kerja dan manusia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Hal itu sekaligus merupakan suatu bentuk pemiskinan mentalitas masyarakat Indonesia. Dengan demikian telah terjadi perubahan mentalitas masyarakat di Indonesia yang sangat mendasar pada masa pendudukan Jepang sebagai akibat penetrasi dan sistem pendudukan yang bersifat militer tersebut.

Barangkali tidak ada yang dapat diambil keuntungan dari kasus-kasus romusha bagi masyarakat pedesaan Jawa waktu itu. Secara kongkrit tampak adalah proses penetrasi dan eksploitasi sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja. Dengan kondisi seperti itu dapat dipahami seberapa tinggi kualitas sumberdaya manusia pedesaan Jawa waktu itu.

## **2. Kondisi Sosial Masyarakat dan Dampak Pendudukan Jepang di Indonesia**

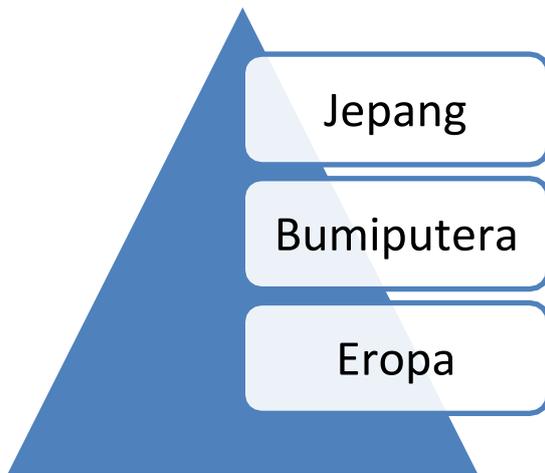
Kedatangan Jepang di Indonesia disambut dengan suka cita oleh penduduk Indonesia secara umum. Selain dianggap membebaskan bangsa Indonesia secara nyata dari penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda, Pemerintah Militer

Jepang juga dianggap sebagai jawaban dari ramalan Jayabaya yang cukup terkenal pada waktu itu. ramalan itu sendiri berisi mengenai akan ada bangsa kulit kuning bermata sipit yang akan membebaskan rakyat Nusantara dari kekuasaan bangsa kulit putih. Selain hal-hal yang berbaur mitos tersebut, ada juga alasan lain mengapa Jepang dengan mudah diterima di Indonesia, menurut Mohammad Hatta dalam bukunya *Sekitar Proklamasi*, setidaknya ada 6 alasan mengapa Jepang dengan mudah diterima di Indonesia yaitu:

- ✓ kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang dianggap sebagai simbolisasi kemenangan Asia atas Eropa,
- ✓ penolakan terhadap Petisi Sutarjo oleh parlemen Belanda sebelum Jepang masuk Indonesia yang membuat rakyat Indonesia kecewa terhadap pemerintah Belanda,
- ✓ Tentara Jepang mendapatkan dukungan kaum terpelajar terutama mereka yang mengetahui mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) negara Jepang,
- ✓ pelibatan masyarakat Indonesia pada beberapa jabatan tertentu diawal pemerintahan baik dalam pemerintahan lokal maupun pada badan-badan pemerintahan bentukan Jepang,
- ✓ sikap tokoh nasionalis yang tidak melawan pendudukan Jepang karena sebelumnya Jepang berjanji untuk tidak mengeksploitasi kekayaan Indonesia hanya untuk Jepang saja (Hatta, 1979: 41).

- **Gambaran Kehidupan Masyarakat Indonesia Secara Umum Pada Masa Pendudukan Jepang**

Pemerintah Pendudukan Jepang mengubah struktur masyarakat Indonesia yang berlaku pada masa sebelumnya. Jika sebelumnya masyarakat kulit putih Eropa berada pada tatanan teratas dalam struktur masyarakat di Indonesia, maka pada masa Pendudukan Jepang mereka berada paling bawah. Sedangkan masyarakat Indonesia yang tadinya berada paling bawah berubah posisi pada masa Pendudukan Jepang yaitu berada pada posisi pertengahan, satu tingkat diatas masyarakat Eropa. Sedangkan orang-orang Jepang sendiri berada pada posisi teratas dalam struktur tersebut (Kahin, 1980).



Gambar 13 Struktur Masyarakat Masa Pendudukan Jepang di Indonesia

Pada awal pemerintahan Jepang di Indonesia, Jepang cukup lunak dan bersahabat dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan bertujuan agar masyarakat Indonesia mendukung Jepang terutama dalam Perang Pasifik yang sedang berlangsung melawan Amerika Serikat. Oleh sebab itu ada cukup banyak hal yang dilarang pada masa Belanda, diperbolehkan pada masa awal pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia. Beberapa hal yang diperbolehkan pada masa Jepang, yaitu:

- ✓ Mengibarkan Bendera Merah Putih, namun harus berdampingan dengan Bendera Jepang,
- ✓ Menyanyikan lagu Indonesia raya, namun setelah menyanyikan lagu kebangsaan Jepang,
- ✓ Menggunakan Bahasa Indonesia, walaupun Bahasa utama tetap Bahasa Jepang terutama di lembaga pemerintahan.

Golongan umat Islam juga dimobilisasi dan dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang. Jepang menganggap bahwa Islam bukanlah ancaman dan musuh yang harus dihadapi seperti pada masa Kolonial Belanda. Justru pemerintah Jepang berusaha mengakomodir kepentingan orang-orang Islam dengan membuat organisasi keagamaan. Pada masa awal Pendudukan Jepang, mereka membentuk organisasi yang meleburkan beberapa organisasi Islam yang telah ada pada masa Belanda menjadi Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). MIAI kemudian dibubarkan dan digantikan dengan pembentukan organisasi Islam yang baru yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada tanggal 24 Oktober 1943. Organisasi

ini sendiri dipimpin oleh tokoh kharismatik Nadlatul Ulama (NU) yaitu KH. Hasyim Asyari. Selain itu dalam bidang semi-militer, para santri-santri juga diajarkan hal-hal yang berkenaan dengan militer. Pemerintah Pendudukan Jepang kemudian membentuk sebuah organisasi semi militer untuk para santri bernama Hizbullah (Tentara Allah). Namun lambat laun, pergerakan Islam mulai dianggap berbahaya dan dibatasi oleh Pemerintah Pendudukan Jepang. Pada akhirnya Masyumi lebih sulit bergerak jika dibandingkan dengan MIAI, dimana Jepang mulai menerapkan aturan yang ketat sejak pembentukan awal Masyumi (Benda, 1985: 183).

- **Dampak Pendudukan Jepang Terhadap Masyarakat Indonesia.**

Pendudukan Jepang di Indonesia sangat membawa dampak yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Walaupun hanya menguasai Indonesia dalam waktu yang singkat, namun beberapa kebijakan pemerintah Pendudukan Jepang cukup memberikan dampak positif dan negatif ke berbagai bidang dan memiliki pengaruh hingga masa setelahnya. Dampak pada kehidupan masyarakat di Indonesia pada masa Pendudukan Jepang adalah.

### **1). Dampak Bidang Sosial**

Kebijakan dalam bidang sosial ini juga dianggap memiliki sisi yang kelam karena banyaknya korban yang jatuh. Tetapi ada juga kebijakan yang dianggap memberikan dampak baik yang juga bisa dirasakan hingga sekarang. Adapun beberapa dampak pendudukan Jepang dalam bidang sosial dapat tercermin pada kebijakan-kebijakan berikut:

- **Kerja Paksa (Romusha)**

Romusha merupakan sebuah kebijakan pada masa Jepang dengan mempekerjakan secara paksa masyarakat Indonesia ke proyek-proyek pembangunan Pemerintah Jepang. Mereka awalnya diambil di tiap-tiap desa di Indonesia dengan cara paksa. Dampak yang terjadi jelas bahwa mereka yang menjadi Romusha akan mengalami siksaan fisik jika tidak bekerja sesuai dengan target, mengalami kelaparan, hingga meninggal dunia. Namun tidak itu saja, dampak penerapan Romusha juga meluas ke berbagai hal misalnya penurunan angka produksi tanaman, mengingat bahwa sebagian romusha juga merupakan

petani. Kehilangan para petani ini mengurangi pekerja dalam sebuah lahan yang berimbang pada penurunan produksi dalam komoditas tertentu. Dampak lainnya yang bisa dirasakan adalah mengenai persoalan kemiskinan yang melanda keluarga-keluarga para romusha. Sebagian romusha yang diambil juga merupakan pencari nafkah keluarganya.

- **Jugun lanfu**

Jugun lanfu merupakan wanita-wanita yang dipekerjakan secara paksa untuk menjadi pemuas nafsu tentara-tentara Jepang di Indonesia. Sama seperti Romusha, para Jugun lanfu ini diambil dari gadis-gadis yang telah cukup usia (terutama usia matang secara seksual).

- **Tonarigumi**

Kebijakan lain pada masa pemerintahan Jepang yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia adalah Tonarigumi. Kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang mirip dengan sistem Rukun Tetangga (RT) yang kita kenal sekarang. Tonarigumi merupakan sebuah struktur masyarakat yang dibuat oleh Jepang yang membatasi jumlah penduduk pada sebuah wilayah kecil. Tonarigumi pertamakali diperkenalkan pada tahun 1944 dan dibawahkendali dari Rikugun atau angkatan darat Jepang yang kemudian menyebar ke Kaigun (angkatan laut) karena sistem yang serupa juga diadopsi di wilayah timur Indonesia, wilayah kekuasaan kaigun (Oktorino, 2013).

Ketika Pemerintah Pendudukan Jepang berakhir di Indonesia sistem ini dihapuskan. Namun oleh pemerintah Indonesia sistem ini diadopsi dan dirubah namanya seperti yang kita ketahui sekarang dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Hanya saja perbedaannya jika pada masa Jepang, sistem ini lebih banyak digunakan untuk urusan kerja paksa dan militer. Namun pemerintah Indonesia mengadopsinya untuk urusan administrasi sipil.

## 2). Dampak Bidang Ekonomi

Dampak di bidang perekonomian pada masa Jepang juga cukup terasa oleh masyarakat Indonesia. Penerapan sistem ekonomi autharki yang ketat membuat kehidupan masyarakat Indonesia ketika itu cukup sulit. Tetapi diluar itu ada beberapa kebijakan pemerintah Jepang terkait dengan masalah ekonomi yang

memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu:

- **Pertanian dan Perkebunan**

Pada masa pendudukan Jepang orientasi pertanian dan perkebunan berbeda dengan yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa orientasi Jepang lebih mengarah pada ekonomi perang sedangkan Belanda pada profit atau keuntungan. Sehingga ini berpengaruh pada berbagai sektor pendapatan termasuk dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan pada masa Belanda lebih ditekankan pada penanaman produk yang laku dipasaran dunia seperti kopi, gula, teh, dan lain-lain. Maka Jepang lebih mengutamakan pada produk-produk yang berguna untuk menunjang peperangan yang sedang mereka jalani yaitu perkebunan jarak dan pertanian padi (Kurasawa, 1993).

Tanaman padi merupakan logistik pangan yang utama baik bagi tentara Jepang maupun untuk masyarakat Indonesia secara umum dibagian barat. Makanan ini merupakan makanan pokok yang penting namun cukup langka dikalangan masyarakat Indonesia sendiri. Pemerintah Jepang mewajibkan masyarakat yang memiliki lahan untuk menanam padi (Lucas, 1989).

Penanaman buah jarak di Indonesia pada masa Jepang benar-benar sangat diperhatikan. Pemerintah Jepang mencoba untuk meningkatkan produksi tanaman ini, tujuannya sudah jelas karena tanaman ini mengandung minyak yang berguna sebagai pelumas dan bahan bakar mesin-mesin perang Jepang (Kurasawa, 1993).

- **Keuangan.**

Pemerintahan Pendudukan Jepang di Indonesia juga memiliki serangkaian kebijakan terkait dengan masalah keuangan dan moneter. Mata uang yang berlaku pada masa ini adalah mata uang Jepang dan Rupiah, sedangkan mata uang Belanda tidak berlaku pada masa ini. Namun apa yang dilakukan oleh Jepang dengan memberlakukan mata uang baru ini justru membawa masalah moneter yang baru di Indonesia. Pada masa Jepang, tingkat inflasi naik akibat terlalu banyaknya uang yang tersebar di masyarakat (Ricklefs: 2010: 425). Salah satu upaya diambil oleh pemerintah Jepang adalah selain mengurangi jumlah peredaran uang, pemerintah juga mengkampanyekan aksi Gerakan Menabung.

### **3) Dampak Bidang Budaya.**

Dalam bidang budaya pendudukan Jepang juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Indonesia. Beberapa hal terkait dengan masalah budaya yang diterapkan pada masa Jepang adalah hal yang dilarang pada masa Kolonial Belanda. Adapun beberapa hal yang terkait dengan bidang budaya yang memberikan dampak pada masyarakat Indonesia pada masa Pendudukan Jepang, yaitu:

- **Pendidikan**

Pada umumnya sistem pendidikan yang dianut hampir mirip dengan masa sekarang jika mengacu pada jenjang sekolah misalnya: pendidikan dasar (Gokumin Gakko) yang dilaksanakan selama 6 tahun, kemudian meneruskan ke pendidikan lanjutan (Shoto Chu Gakko) selama 3 tahun, kemudian diteruskan kembali ke pendidikan menengah (Kogyo Gakko) dan pendidikan kejuruan selama 3 tahun.

- **Penggunaan Simbol-simbol Indonesia.**

Pada masa Pendudukan Jepang, penggunaan simbol-simbol Indonesia cukup longgar dan tidak seketat pada masa Kolonial Belanda. Simbol-simbol yang dimaksud di sini seperti penggunaan Bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pengibaran bendera merah putih. Pada masa Belanda jelas hal-hal ini merupakan sesuatu yang dilarang dan bisa diperkarakan secara kriminal dan dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun pada masa Pendudukan Jepang hal-hal semacam tidak lagi dilarang, terutama pada masa awal masuknya Jepang. Pada bagian awal telah disinggung bahwa Jepang memperbolehkan penggunaan pemakaian simbol-simbol ini karena mereka membutuhkan simpati dari masyarakat Indonesia.. Namun lagu kebangsaan Indonesia akhirnya dilarang karena dianggap justru lebih meningkatkan nasionalisme sebagai seorang Indonesia dari pada Jepang. Hingga akhirnya lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan adalah lagu Kimigayo saja (Pringgodigdo, 1952: 13)

- **Pengaruh Budaya Jepang di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang (Seikerei dan Tarikh Sumera)**

Pada masa ini pendudukan Jepang beberapa budaya Jepang dipopulerkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia. Salah satu yang dipakai adalah

kalender Jepang atau Tarikh Sumera. Kalender ini mulai di pakai di Indonesia sejak Jepang menguasai Indonesia tahun 1942. Pada waktu itu tahun 1942 diubah menjadi tahun 2602 sesuai dengan penanggalan Tarikh Sumera. Salah satu implikasi langsung dari penggunaan kalender ini adalah masyarakat Indonesia diwajibkan untuk merayakan hari Tenchosetsu atau hari kelahiran Kaisar Hirohito (Hermokusumo, 1984: 8)

Selanjutnya ada budaya lain yang berhubungan dengan masalah religius yang diperkenalkan di Indonesia yaitu Seikerei. Seikerei adalah prosesi melakukan penghormatan kepada matahari terbit dengan cara membungkukkan badan kearah matahari tersebut.

### **3. Persiapan dan Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan**

#### **a. Persiapan Menuju Kemerdekaan**

Memasuki tahun 1944 kekuatan bala tentara Jepang dalam perang dengan Sekutu mulai nampak kemundurannya dan posisinya semakin terjepit. Salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh Koiso dalam rangka tetap mempertahankan pengaruh Jepang di daerah-daerah yang didudukinya adalah mengeluarkan pernyataan tentang "janji kemerdekaan di kemudian hari". Dengan cara demikian pemerintah Jepang berharap bahwa rakyat di daerah pendudukan akan dengan senang hati mempertahankan negerinya itu jika kelak Sekutu datang. Indonesia sebagai daerah pendudukan kemudian diberi janji kemerdekaan di kelak kemudian hari pada tanggal 7 September 1944.

Pada tahun 1944 itu pula, dengan jatuhnya Pulau Saipan dan dipukul mundurnya tentara Jepang oleh angkatan perang Sekutu yang datang dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshal, maka seluruh garis pertahanan angkatan perang Jepang di Pasifik mulai runtuh. Ini berarti kekalahan Jepang dalam perang besar itu sudah diambang pintu. Di wilayah Indonesia angkatan perang Jepang juga sudah mulai kewalahan ketika menghadapi serangan-serangan Sekutu.

Menghadapi situasi yang sangat kritis tersebut, maka pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada mencoba merealisasikan janji kemerdekaan di kemudian hari dengan mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Junbi Cosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan setelahnya dibentuk Dokuritsu Junbi linkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Indonesia.

Pada Agustus 1945, 2 bom atom dijatuhkan ke dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat. Ini menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus. Pada 15 Agustus Jepang menyerah kepada Sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda.

b. Perbedaan Pendapat antar Kelompok.

Dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia dikotomi antara kedua kelompok muncul ke permukaan hingga sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Ketegangan itu muncul sebagai akibat perbedaan pandangan tentang saat diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketegangan tersebut bermula dari berita tentang menyerahnya Jepang pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu tanpa syarat (*unconditional surrender*). Hal ini diumumkan oleh Tenno Heika melalui radio. Kejadian itu jelas mengakibatkan pemerintah Jepang tidak dapat meneruskan janji atau usahanya mengenai kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu soal terus atau tidaknya usaha mengenai kemerdekaan Indonesia tergantung sepenuhnya kepada para pemimpin bangsa Indonesia.

Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan oleh Sukarno-Hatta tanpa harus menunggu janji Jepang. Itulah sebabnya ketika mendengar kepulangan Bung Karno, Bung Hatta dan Dr. Radjiman Wedyodiningrat dari Dalat (Saigon), maka ia segera datang ke rumah Bung Hatta. Adapun maksud kedatangannya adalah meminta kepada Bung Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tanpa harus menunggu

dari pemerintahan Jepang karena Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Namun Bung Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sutan Sjahrir dan untuk tidak mengecewakan, maka diajaknya ke rumah Bung Karno. Oleh Bung Hatta dijelaskan maksud kedatangan Sutan Sjahrir, namun Bung Karno belum dapat menerima maksud Sutan Sjahrir dengan alasan bahwa Bung Karno hanya bersedia melaksanakan proklamasi, jika telah diadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI yang lain.

Sikap Bung Karno dan Bung Hatta tersebut memang cukup beralasan karena jika proklamasi dilaksanakan di luar PPKI, maka Negara Indonesia Merdeka ini harus dipertahankan terhadap Sekutu (NICA) yang akan mendarat di Indonesia dan sekaligus tentara Jepang yang ingin mempertahankan jajahannya atas Indonesia, untuk menjaga *status quo* sebelum kedatangan Sekutu. Jadi dengan demikian Negara Indonesia Merdeka harus dipertahankan terhadap dua lawan sekaligus. Hal itu akan berlainan, jika proklamasi dilaksanakan di dalam konteks PPKI, karena Jepang tidak akan memusuhinya.

Golongan muda ini kemudian mengadakan rapat dengan menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan, hubungan dan janji kemerdekaan harus diputus dan sebaliknya perlu mengadakan rundingan dengan Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi ( Djonet, 1984: 80).

Setelah rapat dan mengadakan musyawarah, maka diambil keputusan untuk mendesak Bung Karno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya sehingga lepas dari Jepang. Peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok tua dengan kelompok muda yang memiliki sifat, karakter, cara bergerak, dan dunianya sendiri-sendiri. Perbedaan pendapat itu tidak hanya berhenti pada adu argumentasi, tetapi juga sudah mengarah pada tindakan pemaksaan dari golongan muda terhadap golongan tua. Tentu saja semua itu demi kemerdekaan Indonesia.

Dalam rangka menjauhkan atau "mengamankan" Ir Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dari segala pengaruh Jepang, maka penculikan Sukarno Hatta itu akhirnya dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 waktu Jawa jaman Jepang atau jam 06.00 waktu Jepang atau pukul 04.00 Waktu Indonesia Bagian

Barat (WIB). Kedua tokoh ini kemudian diamankan dengan dibawa ke Rengasdengklok. Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Sukarno-Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota Peta Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil (Marwati, 1984).

Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua, yakni Ahkmad Subardjo dengan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan itu mereka menuju ke Rengasdengklok untuk menjemput Sukarno. Akhmad Subardjo memberi jaminan bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya Sukarno dan Hatta dapat kembali ke Jakarta.

c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pemuda-pemuda Indonesia dan golongan tua berkumpul menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi itu dirumuskan oleh tiga orang pimpinan golongan tua yaitu Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Achmad Subardjo yang disaksikan oleh tiga orang pemuda yaitu Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiro serta beberapa orang Jepang. Penulis klad naskah proklamasi itu ialah Ir. Soekarno, sedangkan Drs. Moh. Hatta dan Mr. Achmad Subardjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah naskah proklamasi itu selesai ditulis dalam klad, maka kemudian Ir. Soekarno membacakannya di hadapan mereka yang hadir pada rapat di rumah Laksamana Maeda itu.

Sekarang timbulah masalah siapakah yang menandatangani naskah proklamasi itu. Ir. Soekarno menyarankan agar semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku "Wakil-wakil Bangsa Indonesia". Saran itu mendapat tantangan dari para pemuda. Kemudian Sukarni selaku salah seorang pimpinan pemuda mengusulkan, agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Usul itu diterima dengan suara bulat.

Selanjutnya Ir. Soekarno minta kepada Sayuti Melik untuk mengetik klad itu, dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada tiga perubahan, yakni kata "tempoh" diganti menjadi "tempo", sedangkan bagian akhir "Wakil-wakil bangsa Indonesia" diganti dengan "Atas nama bangsa Indonesia". Cara menulis tanggal diubah sedikit menjadi "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05". Naskah yang sudah

selesai diketik itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di rumah itu juga.

#### **4. Perang dan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan.**

##### **a. Perjuangan Fisik dan Konfrontasi**

- Kedatangan Sekutu di Indonesia.

Sekutu datang ke Indonesia pada 29 September 1945 dianggap relatif terlambat, apabila dilihat dari penyerahan Jepang, yaitu 14 Agustus 1945. Namun demikian, tidak dinilai terlambat apabila dilihat dari waktu penandatanganan piagam penyerahan Jepang kepada Sekutu pada 12 September 1945. Ada dua hal yang menyebabkan Sekutu terlambat datang ke Indonesia, *pertama*, Sekutu harus melakukan koordinasi di antara negara-negara anggota Sekutu, yang *kedua*, Sekutu harus mengirim dan menunggu informasi tentang keadaan di Indonesia dari pasukan mata-mata .

Sejak memenangkan Perang Dunia II, Sekutu menguasai wilayah yang sangat luas, di Eropa, Afrika, dan Asia. Pada waktu yang relatif sama, Sekutu dalam hal ini Inggris yang sudah membentuk satuan komando bernama SEAC mengirim pasukan mata-mata untuk mengetahui kondisi di Indonesia sejak diserahkan oleh Jepang. Ternyata Sekutu datang ke Indonesia diboncengi NICA (Nederlands Indies Civil Administration), yaitu suatu pemerintahan sipil Belanda yang bertujuan untuk kembali menguasai Indonesia. Inggris sebagai Sekutu yang ditugaskan ke Indonesia, ternyata telah mengadakan perjanjian rahasia dengan Belanda, yang disebut Civil Affair Agreement pada 24 Agustus 1945. Isi perjanjian itu adalah Tentara Pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama Pemerintah Belanda, dalam melaksanakan tugas pemerintahan sipil akan dilaksanakan oleh NICA dibawah tanggungjawab Komando Inggris, kekuasaan itu kemudian akan dikembalikan kepada Pemerintah Belanda.

- Pertempuran Surabaya

Kedatangan tentara Inggris di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Mallaby. Pada tanggal 27 Oktober 1945 tentara Inggris mulai menduduki gedung pemerintahan, yang dipertahankan oleh rakyat dan pemuda Indonesia sehingga terjadi pertempuran. Tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan Letnan Jenderal Christison, Presiden Soekarno

terbang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Usaha Bung Karno berhasil dengan tercapainya gencatan senjata. Pada tanggal 31 Oktober 1945 tersiarlah berita bahwa Brigadir Jendral Mallaby hilang kemudian ternyata terbunuh. Karena tidak dapat menangkap pembunuhnya, maka pada tanggal 9 November 1945 Mayor Jenderal Manserg dengan surat sebaran menyampaikan ultimatum.

Sampai tanggal 10 November 1945, jam 06.00 pagi tidak ada seorang pun dari bangsa Indonesia yang datang menyerahkan diri. Saat itu jugalah mengguntur dentuman meriam-meriam Inggris yang dimuntahkan pelurunya di kota Surabaya. Rakyat dan pemuda Surabaya masih juga mencoba mempertahankan kotanya, namun senjata ringan dan bambu runcing tak berdaya menghadapi meriam-meriam berat dan tank-tank Inggris sehingga terpaksa pasukan bersenjata Indonesia mengundurkan diri ke jurusan Mojokerto.

- Perang Aceh

Pasukan-pasukan Aceh dari Divisi Gajah I ditempatkan satu resimen di Medan Area (RIMA). Batalyon I dan II menduduki Medan Tengah dan Selatan. Divisi Gajah II akan menduduki Medan Barat, Panglima Divisi Gajah II Kolonel Simbolon. Divisi Gajah I menduduki Kota Medan. Batalyon Meriam Kapten Nukum Sanami, berada di Medan Timur, Batalyon NIP Xarim, Batalyon Bejo dan Batalyon Laskar Rakyat lainnya membantu Divisi Gajah II. Pada hari H yang telah ditentukan Gajah I dan Gajah II, tidak berhasil menduduki Kota Medan. Kompi Gajah I berhasil masuk di jalan raya Medan-Belawan, Tandem Hilir.

Namun setelah dua hari mundur kembali, karena Jalan Medan Belawan dapat diduduki Belanda kembali. Pada Clash ke I, 21 April 1947, Belanda dapat menguasai daerah Medan Area dan mundur dari Medan Area. Yakin Belanda akan meneruskan serangannya menduduki Pangkalan Berandan daerah minyak, pasukan RI membumi-hanguskan Pangkalan Belanda. Selanjutnya, pasukan mundur ke Tanjung Pura, setelah tiga hari di Tanjung Pura terpaksa pasukan RI meninggalkannya karena Belanda langsung merebut Tanjung Pura. Pasukan RI bertahan di tepian Sungai Tanjung Pura, setelah tiga hari, bertahan di tepi sungai, Belanda menguasai seluruh Sungai Tanjung Pura dan pasukan RI mundur ke Gebang, Gebang perbatasan daerah Aceh Sumatera Timur. Pasukan baru didatangkan dari daratan Aceh, satu resimen untuk bertahan di Gebang

(Poesponegoro, 1993).

- Perang Ambarawa

Gerakan maju Tentera Inggris ke Ambarawa dan Magelang pada tanggal 14 Desember 1945 akhirnya dapat dipukul mundur yang dalam peristiwa sejarah dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Pada akhir September 1946, tentera Belanda mengambil alih posisi dan wilayah pendudukan dari tentera Sekutu (Inggris) sesudah mendatangkan bala bantuan dari negeri Belanda yang dikenal dengan "Divisi 7 Desember". Hingga bulan Oktober 1946, Belanda telah dapat menghimpun kekuatan militernya sebanyak 3 divisi di Jawa dan 3 Brigade di Sumatera. Tentera Inggris menyerahkan secara resmi tugas pendudukannya kepada Tentera Belanda pada tanggal 30 November 1946. Dari segi perimbangan kekuatan militer pada masa itu, pihak Belanda telah merasa cukup kuat untuk menegakkan kembali kekuasaan dan kedaulatannya di Indonesia, dengan memaksakan keinginannya terhadap rakyat dan pemerintah Republik Indonesia (Marwoto, 2008).

- Perang Bandung Lautan Api

Pasukan Sekutu Inggris memasuki kota Bandung sejak pertengahan Oktober 1945. Menjelang November 1945, pasukan NICA melakukan aksi teror Bandung. Meskipun pihak Indonesia telah mengosongkan Bandung utara, tapi sekutu menuntut pengosongan sejauh 11 km. Hal itu menyebabkan rakyat Bandung marah. Mereka kemudian melakukan aksi pertempuran dengan membumihanguskan segenap penjuru Bandung selatan. Bandung terbakar hebat dari atas batas timur Cicadas sampai batas barat Andir. Satu juta jiwa penduduknya mengungsi ke luar kota pada tanggal 23 dan 24 Maret 1946 meninggalkan Bandung yang telah menjadi lautan api (Badrikan, 2006).

- Pertempuran Medan Area

Keangkuhan dan provokasi Belanda semakin meningkat sejak pendaratan Sekutu. Di Medan titip api pergolakan ada di Pension Wilhelmina di seberang Pasar Sentral Jalan Bali, yang dijadikan asrama dan markas serdadu Ambon bekas KNIL yang dipimpin Westerling. Pada Sabtu pagi, tanggal 13 Oktober 1945 serombongan orang sudah berkumpul di luar markas tersebut, karena tersiar berita bahwa

seorang pengawal dari Suku Ambon telah merenggut dan menginjak-injak lambang/emblem merah putih yang dipakai seorang anak Indonesia. Terjadilah pergolakan, beberapa orang luka-luka. Di tengah baku hantam itu, dua orang Belanda yang berada di atas kendaraan melepaskan tembakan-tembakan ke arah rombongan masyarakat, satu orang tewas. Pasukan Jepang bersama dengan barisan bekas militer BPI pimpinan Ahmad Tahir yang akan beralih menjadi TKR datang untuk meredakan pertempuran. Akhirnya pihak Sekutu berjanji untuk memindahkan orang Ambon dari Pension Wilhelmina. Sementara itu, serdadu Jepang mengambil senjata-senjata dari gedung itu dan menempatkan pengawalnya di pintu pagar. Masyarakat Medan membubarkan diri pukul 13.30 dengan meninggalkan dua orang Indonesia dan seorang wanita Ambon yang meninggal dunia (Reid, 1987).

- **Agresi Militer Belanda I**

Latar belakangnya adalah adanya penolakan pihak Republik Indonesia terhadap tuntutan Belanda yang berisi tentang keharusan RI untuk mengirim beras dan penyelenggaraan *gendarmie* (keamanan dan ketertiban bersama). Serangan ini dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan sasaran kota besar di Jawa, daerah perkebunan dan pertambangan. Tujuan Belanda melakukan serangan atas RI ialah penghancuran RI. Untuk melakukan itu Belanda tidak dapat melakukan sekaligus, oleh karena itu pada fase pertama Belanda harus mencapai sasaran (Moedjanto, 1989).

Tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar agenda Dewan Keamanan PBB. itu diterima dan dimasukkan sebagai agenda dalam pembicaraan sidang Dewan Keamanan PBB. India membela RI karena solidaritas Asia terutama sesudah konferensi internasional di New Delhi pada Maret 1947 di mana Indonesia ikutserta. Lagipula hubungan RI-India baik sekali karena politik beras Syahrir (antara 1946-1947), yaitu Indonesia membantu India yang sedang dilanda kelaparan dengan mengirim beras sebanyak 700.000 ton. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Komisi Konsuler menyatakan bahwa 30 Juli 1947-4 Agustus 1947 pasukan Belanda masih melakukan gerakan militer. Setelah beberapa minggu tidak ada keputusan, akhirnya pada 25 Agustus 1947 usul AS diterima sebagai keputusan DK PBB. Usul AS adalah pembentukan *Committee of*

*Good Officer* (Komisi Jasa-Jasa Baik) untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan pertikaian. Atas dasar putusan DK PBB tersebut, pada 18 September 1947 Belanda memilih Belgia, RI memilih Australia, dan kedua negara memilih negara ketiga yaitu AS. Komisi jasa-jasa baik, selanjutnya disebut KTN (Komisi Tiga Negara), yang beranggotakan Dr. Frank Graham (AS), Paul Van Zeelan (Belgia), dan Richard Kirby (Australia). Sebelum KTN terbentuk dan belum datang ke Indonesia, Belanda terus melakukan langkah-langkah yang merugikan RI. KTN mampu memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia, yaitu Perundingan Linggarjati (Romadi, 2001: 14).

- **Agresi Militer II.**

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan keduanya terhadap Indonesia. Latar belakangnya adalah adanya pengingkaran Belanda atas hasil perjanjian Renville di mana Belanda tidak mau lagi terikat dengan perjanjian Renville. Serangan diawali penerjunan pasukan payung di pangkalan udara Maguwo dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memutuskan tetap tinggal di Ibukota. Namun Sukarno Hatta beserta sejumlah menteri dan S. Suryadarma ditawan Belanda. Sebelum pihak Belanda sampai di Istana, Soekarno telah mengirim radiogram yang berisi perintah kepada Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang sedang berkunjung ke Sumatra untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) (Supriatna, 2002).

Dalam satu bulan, pasukan TNI telah berhasil melakukan konsolidasi dan melakukan pukulan-pukulan secara teratur kepada musuh. Serangan umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan oleh pasukan TNI dan yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta dipimpin oleh Letkol Suharto. Dalam masa perjuangan itu para pelajar membentuk tentara-tentara pelajar. Para pelajar di Jawa Timur membentuk Tentara Pelajar Republik Indonesia (TPRI) dan Tentara Genie Pelajar (TGP) yang terdiri dari pelajar sekolah teknik (Notosusanto, 1971).

- **Indonesia Menghadapi Agresi Militer Belanda II**

**Langkah Politik/Diplomasi.** Pada pukul 23.30 tanggal 18 Desember 1948,

Cochran mendapat surat dari delegasi Belanda di Jakarta untuk disampaikan kepada KTN di Yogyakarta. Isi surat tersebut adalah Belanda tidak terikat lagi dengan isi perjanjian Reville. Dengan alasan bahwa PM Hatta menolak intervensi Belanda di wilayah RI dan menganggap penolakan tersebut dari Indonesia melanggar ketentuan, dan Belanda mantap untuk menyerang Yogyakarta secara mendadak. Mendengar berita penyerbuan tentara Belanda secara mendadak, Kabinet RI pun bersidang. Sampai tahun 1949, Belanda sudah memasukkan 145.000 pasukan ke Indonesia, namun hanya berhasil menguasai kota-kota dan jalan raya, sedangkan pemerintahan RI tetap berjalan wajar di desa-desa. TNI secara gerilya tetap melawan Belanda. Rakyat dan pemerinhan sipil melakukan politik non cooperasi dan ikut bergerilya pula (Poesponegoro, 1993).

**Langkah Militer/Konfrontasi.** Sebelum Belanda melancarkan serangan terhadap Kota Yogyakarta 19 Desember 1948, Panglima Besar Jenderal Sudirman pada 9 November 1948 telah mengeluarkan perintah perubahan siasat pertahanan, yang terkenal dengan Perintah Siasat Nomor 1. Dalam perintah siasat tersebut intinya merupakan penjabaran dari Pertahanan Rakyat Semesta (Poesponegoro, 1983).

*Wehrkreise* istilah bahasa Jerman yang berarti lingkaran pertahanan. Sistem *wehrkreise* artinya pertahanan dalam lingkaran-lingkaran pertahanan yang dapat berdiri sendiri, namun dapat juga saling membantu dan mendukung dengan lingkaran pertahanan yang lain. Prajurit yang sudah mundur dari garis pertahanan pertama dapat menggabungkan diri dengan daerah pertahanan berikutnya. Dengan demikian, maka gerak musuh dapat dihambat.

- **Reaksi Dunia Terhadap Agresi Militer Belanda II**

**Negara Asia dan Afrika.** Tanggal 20-23 Januari 1949, atas prakarsa Perdana Menteri India dan Birma, diselenggarakan Konferensi Asia untuk membahas masalah Indonesia. Konferensi Asia mengeluarkan tiga resolusi untuk penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda, yang isinya antara lain berupa kecaman keras terhadap agresi militer Belanda di Indonesia. Di antara resolusi-resolusi yang diterima oleh konferensi, sebuah berisi rekomendasi kepada Dewan Keamanan. Teks resolusi ini telah dikawatkan kepada Dewan Keamanan. Teks

resolusi ini disusun dengan mengakui sepenuhnya wewenang Dewan Keamanan, terutama dalam hasrat hendak membantu memecahkan masalah Indonesia (Supriatna, 2002).

**Perubahan Sikap Amerika Serikat.** Amerika Serikat sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya selalu mendukung Belanda. Berdasarkan analisis dari berbagai sumber, Dr. Baskara T. Wardaya (2006), menyampaikan bahwa Amerika Serikat selalu mendukung Belanda untuk menduduki kembali Indonesia. Ada sejumlah alasan bagi Amerika Serikat untuk menempatkan pada posisi demikian (Kahin, 2013). Pertama, ketakutan akan komunisme. Kedua, pentingnya Indonesia bagi kepentingan ekonomi Belanda. Indonesia yang kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti minyak, emas, karet, bauxite, kopra dan lain-lain telah menjadi sumber utama ekonomi Belanda selama masa penjajahan. Ketiga, kepentingan ekonomi Amerika.

**PBB.** Dewan Keamanan PBB segera bersidang pada tanggal 24 Januari 1949 sebagai reaksi terhadap Agresi Militer Belanda II sekaligus tanggapan terhadap desakan negara-negara Asia dan Afrika dalam pertemuan di New Delhi (India). Pada tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi (Kahin, 2013).

## **b. Perjuangan Diplomasi**

### **• Perjanjian Linggar Jati**

Untuk menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda maka pada 10 November 1946 diadakan perundingan di Linggar Jati. Pihak Indonesia dipimpin oleh dr. Sudarsono, Jenderal Sudirman, dan Jenderal Oerip Soemohardjo. Inggris mengirim Lord Killearn sebagai penengah setelah komisi gencatan senjata terbentuk. Pihak Belanda diwakili oleh Prof. S. Schermerhorn dan Dr. Hj. Van Mook. Isi persetujuan Linggar Jati. Setelah naskah perjanjian ditandatangani, muncul pro dan kontra dimasyarakat mengenai hasil perundingan tersebut. Tanggal 25 Maret 1947 pihak Indonesia menyetujui perjanjian Linggar Jati (Bahar, 1991).

### **• Perundingan Renville**

Berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda No. 51 tanggal 15 Desember 1947,

wakil-wakil pemerintah Belanda yang hadir dalam perundingan Renville dengan penuh kehati-hatian menghindari kata “delegasi” (Agung, 1991). Ini untuk menjelaskan bahwa persoalan Indonesia adalah masalah dalam negeri. Oleh karena itu, Keputusan Kerajaan Belanda menyebut “penunjukkan suatu komisi untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan sesuai Resolusi DK PBB tanggal 25 Agustus 1947.

- **Perjanjian Roem Royen**

Pada bulan pertama tahun 1949 karena didesak oleh Dewan Keamanan PBB, Belanda mengadakan pendekatan-pendekatan politis dengan Indonesia. Perdana Menteri Belanda Dr. Willem Drees mengundang Prof. Dr. Supomo untuk berunding. Undangan itu diterima dan merupakan pertemuan pertama antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda sejak tanggal 19 Desember 1948. Pertemuan antara Perdana Menteri Dr. Willem Drees dengan Prof. Dr. Supomo tidak diumumkan kepada masyarakat sehingga bersifat informal. Pertemuan lainnya yang bersifat informal adalah antara utusan BFO yaitu Mr. Djumhana dan Dr. Ateng dengan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 21 Januari 1949. Hasil pembicaraan secara mendetil dari pertemuan-pertemuan itu tidak pernah diumumkan secara resmi, kecuali diberitakan oleh harian Merdeka pada 19 Januari 1949 dan 24 Januari 1949. Namun demikian dari pertemuan informal tersebut dicapai kesepakatan antara RI dengan BFO yang disampaikan oleh Mr. Moh. Roem bahwa RI bersedia berunding dengan BFO di bawah pengawasan Komisi PBB dalam suatu perundingan formal (Ricklefs, 1998). Pada tanggal 13 Februari 1949 Wakil Presiden Mohammad Hatta secara resmi menyatakan pendapatnya bahwa perundingan dapat saja dilakukan dengan syarat dikembalikannya pemerintah RI ke Yogyakarta dan pengunduran pasukan Belanda dari wilayah RI sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB tanggal 24 Januari 1949. Pendirian Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian disetujui dan didukung oleh delegasi BFO (Pujianti, 2011).

Berdasarkan kenyataan dan penjajagan politis yang dilakukan oleh Belanda terhadap para pemimpin Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya bersedia berunding. Oleh karena itu, Belanda pada tanggal 26 Pebruari 1949 mengumumkan akan mengadakan Konferensi Meja Bundar pada tanggal 12 Maret 1949. KMB akan diadakan dengan diikuti oleh Belanda, Indonesia dan negara-

negara bentukan Belanda guna membicarakan masalah Indonesia seperti syarat-syarat penyerahan kedaulatan dan pembentukan Uni Indonesia Belanda (Reid, 1987).

Pemerintah Belanda mengutus Dr. Koets sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda pada tanggal 28 Pebruari 1949 untuk menemui Ir. Sukarno beserta beberapa pemimpin RI yang masih ditawan di Pulau Bangka untuk menyampaikan rencana KMB. Pada tanggal 3 Maret 1949 Presiden Sukarno mengadakan pembicaraan dengan penghubung BFO tentang perlunya pengembalian kedudukan pemerintah RI sebagai syarat diadakannya perundinagn sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Maret 1949 Presiden Sukarno membalas undangan Wakil Tinggi Mahkota Belanda (Suhartono, 2001).

Undangan menghadiri KMB yang dimaksud oleh Dr. Koets tentu saja bukan undangan pribadi kepada Ir. Sukarno, melainkan undangan untuk pemerintah Indonesia. Oleh karena itu Presiden Sukarno menyampaikan bahwa RI tidak mungkin berunding tanpa pengembalian pemerintahan ke Yogyakarta. Dengan demikian maka sebelum perundingan dimulai, secara tidak langsung Belanda harus sudah mengakui bahwa RI masih tegak berdiri. Sementara itu pihak BFO juga mengeluarkan surat pernyataan yang berisi pemberitahuan bahwa BFO tetap dalam pendirian semula. Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 23 Maret 1949 memberitahukan kepada Belanda bahwa Komisi PBB telah bekerja sesuai dengan resolusi Dewan Keamnaan PBB tanggal 28 Januari 1949 dan tidak merugikan tuntutan kedua belah pihak (Suryanegara, 2010).

Delegasi Republik dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sebagai Ketua dan Mr. Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketua. Anggota-anggotanya adalah : Dr. J. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Dr. Supomo, Mr. Latuharhary disertai lima orang penasehat. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J.H. Van Royen, dengan anggota-anggotanya Mr. N.S. Blom, Mr. A.S. Jacob, Dr. J.J. Van der Velde dan empat orang penasehat. Perundingan dimulai pada 14 April 1949 yang dilakukan oleh Mr. Moh. Roem (Indonesia) dengan Dr. Van Roijen (Belanda) dengan mediator Merle Cochran (anggota UNCI dari AS). Perundingan ini dilakukan di Hotel Des Indes (Hotel Duta Merlin Jakarta, sekarang) (Supriatna, 2002).

Perundingan berlarut-larut dan sempat terhenti sampai 1 Mei 1949 karena terjadinya perbedaan pendapat yang tajam. Pemerintah Belanda menghendaki agar RI menghentikan gerakan gerilya oleh pejuangnya, bersedia menghadiri

KMB dan bersedia bekerjasama menciptakan keamanan dan ketertiban, barulah pemerintahan dan pemimpin RI yang ditahan Belanda dibebaskan (Bahar, 1991). Karena perundingan berjalan sangat lambat, bahkan hampir mengalami jalan buntu, pada tanggal 24 April 1949 Drs. Mohammad Hatta datang ke Jakarta. Pihak RI menempuh cara lain yakni mengadakan perundingan informal dan langsung dengan pihak Belanda disaksikan Merle Cochran. Pada tanggal 25 April 1949 diadakan pertemuan informal pertama antara Drs. Moh. Hatta dengan ketua delegasi Belanda Dr. Van Royen. Hasil pertemuan ini tidak diumumkan, namun Wakil Presiden Moh. Hatta menyatakan bahwa pertemuan informal itu untuk membantu memberikan penjelasan kepada delegasi Belanda (Suryanegara, 2010).

Anggota UNCI dari AS Merle Cochran mendesak Indonesia agar dapat menerima usulan Belanda dengan kompensasi bantuan ekonomi setelah pengakuan kedaulatan, tetapi sebaliknya mengancam untuk tidak memberi bantuan apapun kepada Indonesia apabila pihak RI tidak bisa melanjutkan perundingan. Selanjutnya masing-masing pihak mengeluarkan pernyataan. Persetujuan ini sebenarnya hanya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang masing-masing menyetujui pernyataan pihak lainnya. Isi pernyataan ini ditanda tangani pada 7 Mei 1949 oleh ketua perwakilan kedua negara yaitu Mr. Moh. Roem dan Dr. Van Royen, oleh karena itu terkenal dengan sebutan Roem Royen Statemens (Ricklefs, 1998).

Turut serta pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat, yang tidak bersyarat. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta akan berusaha mendesak supaya politik demikian diterima oleh pemerintah Republik Indonesia selekas-lekasnya setelah dipulihkan di Yogyakarta. Bunyi statement Roem-Royen (Pujianti, 2011):

✓ Sesuai dengan resolusi DK PBB, Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan perang gerilya.

✓ bekerjasama mengembalikan dan menjaga keamanan dan ketertiban.

✓ Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh-

sungguh dengan tidak bersyarat.

- **Statement Delegasi Belanda (Diucapkan oleh Dr. Van Royen).**

Delegasi Belanda diberi kuasa menyatakan bahwa, berhubungan dengan kesanggupan yang baru saja diucapkan oleh Mr. Roem, ia menyetujui kembalinya Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Sebagai tindak lanjut dari persetujuan Roem-Royen, pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara RI, BFO dan Belanda di bawah pengawasan komisi PBB, dipimpin oleh Critchley (Australia). Hasil perundingan itu adalah:

- ✓ Pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949. Karesidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda pada tanggal 1 Juli 1949 dan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya daerah itu.
- ✓ Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta.
- ✓ Konferensi Meja Bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag (Ricklefs, 1998).

Setelah para pemimpin RI berkumpul kembali di Yogyakarta, maka pada tanggal 13 Juli 1949 jam 20.30, diadakan sidang Kabinet RI yang pertama. Pada kesempatan itu, Mr. Sjafrudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Wakil Presiden/Perdana Menteri Moh. Hatta. Sedangkan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mendukung pemerintah RI dengan syarat (Nasution, 1987). Pada tanggal 6 Juli 1949, pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta, yang sudah ditinggalkan oleh pasukan-pasukan Belanda pada akhir bulan juni. Soedirman dan pimpinan-pimpinan tentara lainnya enggan mengakui kekuasaan sipil yang mereka anggap telah meninggalkan Republik. Pada tanggal 1 Agustus, diumumkanlah genjatan senjata yang akan mulai berlaku di Jawa pada tanggal 11 Agustus dan Sumatera pada tanggal 15 Agustus (Poesponegoro, 1993).

Dengan disepakatinya prinsip-prinsip Roem-Royen tersebut, pemerintah darurat RI di Sumatra memerintahkan kepada Sultan Hamengkubowono IX untuk mengambillalih pemerintahan di Yogyakarta apabila Belanda mulai mundur dari Yogyakarta. Partai politik yang pertama kali menyatakan setuju dan menerima baik tercapainya persetujuan Roem-Royen adalah Masyumi. Dr. Sukiman selaku ketua

umum Masyumi menyatakan bahwa sikap yang diambil oleh delegasi RI adalah dengan melihat posisi RI di dunia internasional dan di dalam negeri sendiri, apalagi dengan adanya sikap BFO yang semakin menyatakan hasratnya untuk bekerjasama dengan RI. Sedangkan Mr. Surjono Hadinoto, ketua umum PNI menyatakan bahwa Persetujuan Roem-Royen merupakan satu langkah ke arah tercapainya penyelesaian dari masalah-masalah Indonesia (Reid, 1987).

### c. **Konferensi Meja Bundar (KMB) dan Pengakuan Kedaulatan**

Pimpinan TNI Kembali ke Kota Yogyakarta. Masuknya TNI dan para pemimpin yang kembali dari pengasingan ke Yogyakarta diperingati sebagai Hari Yogya Kembali, yang akhirnya juga diabadikan dengan Monumen Yogya Kembali. Itu berarti Monumen Yogya Kembali bukan hanya untuk mengabadikan kembalinya TNI ke Yogyakarta, tetapi juga kembalinya pemimpin bangsa. Dari fakta sejarah justru nampak bahwa pembangunan monumen ini tidak langsung berkaitan dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Suharto. Selama ini kita selalu berpendapat bahwa pembangunan Monumen Yogya Kembali untuk memperingati Serangan Fajar yang berhasil merebut Kota Yogyakarta selama 6 jam (Sumarmo, 1985).

- **Konferensi Inter Indonesia**

Hubungan antara pemimpin-pemimpin BFO dan Republik Indonesia, pertama kali dijalin pada 1949 ditempat pengasingan di Bangka.waktu itu, pembentukan negara federal Indonesia Serikat masih kabur kerana syarat mutlak pembebasan para pemimpin Republik Indonesia belum dilaksanakan. Pemimpin-pemimpin BFO masih ragu-ragu terhadap kekuatan perlawanan gerilyawan terhadap tentara Belanda yang dianggapnya akan mengalami kegagalan. Untuk menyelamatkan kedudukan sebagai pemimpin di negaranya masing-masing pemimpin-pemimpin BFO mengadakan siasat yang dapat memberi jaminan negara-negara BFO yang akan menjadi negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat. Mereka yakin bahwa perundingan Konferensi Meja Bundar akan menghasilkan pembentukan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat penuh atas pertimbangan faktor-faktor. Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman serta menyatukan langkah menghadapi Belanda dalam KMB, negara-negara bagian dan RI mengadakan konferensi bersama. Konferensi ini diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19-22

Juli 1949 dan dilanjutkan di Jakarta pada 30 Juli-2 Agustus 1949. Pemilihan kedua kota ini atas pertimbangan bahwa Yogyakarta merupakan wilayah negara RI sedangkan Jakarta termasuk daerah negara bagian. Dengan demikian tercipta sikap saling menghargai dan sejajar (Moedjanto, 1989).

Delegasi BFO untuk menghadiri Konferensi Antar Indonesia tahap pertama yang diselenggarakan di istana negara Yogyakarta, dipimpin oleh Sultan Hamdi Algdrie dari Pontianak. Kedatangan mereka disambut sangat gembira oleh masyarakat Yogyakarta sehingga timbul kesan bahwa kecurigaan sudah musnah sama sekali. Konferensi tahap pertama membahas ketatanegaraan Indonesia bertalian dengan maksud mendirikan Negara Indonesia Serikat. Keputusan Konferensi Inter Indonesia adalah :

- ✓ Agustus ditetapkan sebagai Hari Nasional Negara RIS
- ✓ Bendera Merah Putih sebagai bendera RIS
- ✓ Lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya
- ✓ Bahasa Nasional RIS yaitu Bahasa Indonesia (Mulyana, 2008).

- Detik-Detik Menjelang dan Pelaksanaan Konferensi Meja Bundar  
Tindak lanjut mempersiapkan penyelenggaraan konferensi meja bundar (KMB) di den haag, negeri Belanda, perdana menteri NIT, ide Anak Agung Gde Agung, yang merangkap sebagai wakil ketua pertemuan musyawarah federal (PMF, yang lebih dikenal BFO) menyarankan agar sebelum diselenggarakan KMB, terlebih dahulu diadakan suatu konferensi antara BFO dan RI. Maksudnya ialah, untuk membentuk suatu rekonsiliasi antara pemimpin-pemimpin RI dan wakil- wakil negara bagian dan daerah-daerah di luar wilayah kekuasaan RI, karena adanya perselisihan paham dan jurang pemisah antara mereka akibat politik memecah belah pemerintah Belanda. Selain itu, agar tercapai kerjasama dan kekompakan menghadapi Belanda selama pembicaraan pada sidang KMB (Ricklefs, 2005).

Dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949, konferensi Meja Bundar diselenggarakan di Den Haag. Hatta mendominasi pihak Indonesia selama berlangsungnya perundingan-perundingan dan semua peserta mengaguminya. Suatu uni yang longgar antara negeri Belanda dan RIS disepakati dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan simbolis. Soekarno akan menjadi presiden RIS dan Hatta sebagai perdana menteri (1949-1950) merangkap wakil presiden. Pada

tanggal 27 Desember 1949, negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia, tidak termasuk Papua, kepada RIS, sebuah Negara federal yang hanya bertahan secara utuh selama beberapa minggu saja (Wirawan, 2012).

Pada tanggal 31 Oktober 1949 delegasi RI dan BFO menerima usul yang bersifat kompromi dari UNCI tentang status Irian Barat. Semula soal ini sangat pelik dan hampir buntu dari penyelesaian, akhirnya bersedia menerima usulan UNCI walaupun lebih merugikan Indonesia. Usulan UNCI adalah masalah Irian Barat (Nieuw Guineo) akan diselesaikan setahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan antara RIS dengan Kerajaan Belanda. Setelah masalah Irian disetujui RI dan BFO maka pada 2 Nopember 1949 KMB ditutup oleh Ratu Juliana (Suryanegara, 2012).

- Pengesahan Hasil KMB

Berdasarkan hasil KMB maka daerah-daerah bekas jajahan Hindia Belanda yang sejak 17 Agustus 1945 diproklamasikan sebagai Republik Indonesia dengan bentuk kesatuan, sejak 17 Desember 1949 berubah menjadi negara federal dengan nama Republik Indonesia Serikat. Sementara itu, RI hanya merupakan negara bagian dari RIS dengan wilayah Yogyakarta. Republik Indonesia Serikat adalah sebuah Negara federal tergabung di dalamnya 15 negara bagian yang telah didirikan Belanda selama 3 tahun sebelumnya di wilayah yang didudukinya, sebagai taktik *divide et impera* untuk melawan Republik Indonesia. Dengan dibentuknya RIS, disahkanlah Konstitusi RIS 1949 di Gedung Proklamasi, Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta pada 14 Desember 1949. Selanjutnya pada 16 Desember 1949 di Yogyakarta dilakukan pemilihan Presiden RIS. Terpilihlah Presiden Sukarno yang dilantik pada 18 Desember 1949, dan Bung Hatta menjadi Perdana Menteri yang kemudian membentuk zaken kabinet RIS .

Hasil-hasil persetujuan yang tercapai dalam perundingan antara delegasi Indonesia dan Belanda di Den Haag, walaupun tidak memuaskan sepenuhnya, dan masih banyak mengandung kekecewaan terutama mengenai soal Irian dan ekonomi/keuangan tak dapat dikatakan memenuhi syarat yang penting untuk meneruskan perjuangan rakyat mencapai cita-citanya, dengan adanya pengakuan kedaulatan *de facto* dan *de jure* bukan saja oleh negeri Belanda, melainkan sekarang nyatanya juga oleh beberapa negara besar dan kecil.

Persetujuan KMB menimbulkan pro dan kontra, hal ini sangat lumrah karena satu persetujuan mesti ada segi-segi kompromi. Presiden Sukarno memberi persetujuan tetapi menyesalkan mengapa Irian Barat dibiarkan belum masuk, dengan begitu wilayah Negara Proklamasi masih belum lengkap. Walaupun menimbulkan banyak ketidakpuasan, KMB menurut pemerintah merupakan hasil perjuangan diplomasi maksimal yang dapat dicapai pada waktu itu. Oleh karena itu agar hasil KMB bisa dilaksanakan maka memerlukan persetujuan dari wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Komite Nasional Indonesia Pusat.

Sekembalinya ke tanah air, Perdana Menteri Hatta memberikan laporan kepada kabinet hasil perundingan Konferensi Meja Bundar. Selanjutnya KNIP mengadakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden RIS. Terpilihlah Ir. Sukarno sebagai Presiden RIS dengan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta. Presiden Sukarno yang pada tanggal 17 Desember 1949 dilantik sebagai presiden RI yang pertama, pada tanggal 28 Desember 1949 pindah dari Yogyakarta ke Jakarta, diikuti oleh pemerintah seluruhnya. Pada tanggal 19 Desember 1949, Kabinet RIS yang pertama dibentuk Mohamad Yamin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri. Pada tanggal 27 Desember 1949 di Jogjakarta Mr. Assaat disumpah sebagai pemangku jabatan sementara jabatan Presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu segala perlengkapan dan aparatur negara RIS dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Pada 27 Desember 1949 pemerintah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia tidak termasuk Irian Barat kepada pemerintah RIS dan membebaskan seluruh tahanan politik yang berjumlah sekitar 12.000 orang (Soebagijo. 1981).

#### **D. Rangkuman**

Perang Dunia II di Asia di mulai pada tanggal 8 Desember 1941 saat tentara Jepang (Dai Nippon) secara mendadak menyerang Pearl Harbor di kepulauan Hawaii yang merupakan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang yang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat, menuju ke selatan termasuk ke Indonesia. Sesaat setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer mengumumkan perang dengan Jepang.

Pasukan Jepang sejak awal berusaha dapat menguasai Indonesia sejak pecahnya perang Pasifik. Alasannya Angkatan Perang Jepang (Dai Nippon) membutuhkan minyak bumi dan bahan mentah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan angkatan perangnya.

Pada awalnya, pasukan Pendudukan Jepang disambut dengan suka cita oleh sebagian rakyat Indonesia, karena kedatangannya dianggap pembebas bangsa Asia dari kolonialisme Eropa. Bahkan sebagian masyarakat Jawa percaya pada Ramalan Jayabaya bahwa kehadiran pendudukan Jepang hanya seumur jagung. Meski demikian, penderitaan rakyat Indonesia akibat pendudukan Jepang sangat luar biasa.

Pelbagai bentuk strategi diterapkan elemen bangsa, terutama kaum muda dalam menghadapi pemerintahan pendudukan. Dalam bentuk kooperatif, nonkooperatif, gerakan bawah tanah dan berbagai bentuk lainnya. Selama melakukan praktek pendudukan, pemerintah pendudukan Jepang melakukan berbagai perubahan dalam berbagai aspek di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini berdampak juga terhadap kondisi sosial masyarakat.

Ketika Perang Dunia II berakhir dengan kekalahan Jepang di Asia, maka momentum ini digunakan para elemen bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Dalam persiapan ini, muncul peristiwa Rengas Dengklok, sebagai sebuah perpedaan pandangan kaum tua dan muda dalam upaya menuju kemerdekaan bangsa. Namun perbedaan tersebut dapat diatasi dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Setelah kemerdekaan bangsa, bukan akhir dari konflik antara bangsa Indonesia dengan Belanda. Hal ini karena pihak imperialis berusaha dengan berbagai cara untuk kembali menguasai tanah yang pernah dikuasainya. Dengan adanya pasang surut perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi akhirnya pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar.

## **Pembelajaran 5. Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin**

### **A. Kompetensi**

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 5. Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin yang akan dicapai pada pembelajaran ini, adalah guru P3K mampu;

1. Menjelaskan proses kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menganalisis berbagai dimensi saat Indonesia masa Demokrasi Liberal.
3. Menganalisis berbagai dimensi saat Indonesia masa Demokrasi Terpimpin.
4. Menganalisis berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan usaha penyelesaiannya.

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 5. Indonesia Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Konferensi Meja Bundar (KMB).
2. Menganalisis munculnya Republik Indonesia Serikat (RIS)
3. Menganalisis proses kembalinya ke Republik Indonesia.
4. Menjelaskan perkembangan sistem kepartaian pemerintahan parlementer.
5. Mengidentifikasi kabinet-kabinet sistem pemerintahan parlementer.
6. Menganalisis kehidupan ekonomi Demokrasi Liberal
7. Menganalisis kehidupan politik era Demokrasi Liberal
8. Menganalisis kehidupan ekonomi era Demokrasi Liberal
9. Menganalisis akhir dari Demokrasi Liberal di Indonesia.

10. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada Konstituante dan munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
11. Menganalisis kebijakan politik dan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin.
12. Menganalisis permasalahan pembebasan Irian Barat pada masa Demokrasi Terpimpin.
13. Menganalisis permasalahan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada masa Demokrasi Terpimpin.
14. Menjelaskan peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun.
15. Menjelaskan peristiwa Pemberontakan DI/TII.
16. Menjelaskan peristiwa Pemberontakan APRA.
17. Menjelaskan peristiwa Pemberontakan Andi Azis
18. Menjelaskan peristiwa Pemberontakan RMS
19. Menjelaskan peristiwa Pemberontakan PRRI-Permesta.
20. Menjelaskan peristiwa Pemberontakan G30S/PKI

## C. Uraian Materi

### 1. Kembali ke NKRI

#### a. KMB

Hal yang melatarbelakangi terjadinya KMB adalah kegagalan Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan karena adanya kecaman dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk melakukan penyelesaian secara diplomasi. Konferensi Meja Bundar diselenggarakan di kota Den Haag, Belanda. Waktu pelaksanaannya diadakan mulai tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949.

Ada tiga pihak yang terlibat dalam konferensi Meja Bundar, yakni pihak Indonesia, pihak Belanda yang diwakili BFO dan pihak UNCI (United Nations Commissioner for Indonesia) selaku penengah.

#### 1. Pihak Indonesia

Pihak Indonesia diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta dan terdiri dari 12 delegasi secara keseluruhan: Drs. Mohammad Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leitnena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, Mr. Muwardi

2. Pihak Belanda

Dalam KMB, pihak Belanda diwakili oleh BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia. Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen dan UNCI diwakili Chritchley.

3. Pihak UNCI

Pihak UNCI atau United Nations Commissioner for Indonesia bertindak sebagai penengah jalannya konferensi antara Indonesia dan Belanda. Pembentukan UNCI dilakukan sebagai penengah dan mediator perdamaian perselisihan Indonesia dan Belanda.

Ada beberapa poin kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Berikut merupakan isi dan hasil Konferensi Meja Bundar selengkapnya.

- 1) Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka.
- 2) Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
- 3) Status Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu setahun setelah pengakuan kedaulatan.
- 4) Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda untuk mengadakan kerjasama antara RIS dan Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
- 5) Republik Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda.
- 6) Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.
- 7) Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
- 8) Tentara Kerajaan Belanda akan ditarik mundur, sedangkan Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Penyerahan kedaulatan Belanda terhadap Indonesia akhirnya disahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam upacara penyerahan kedaulatan pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees dan Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Di waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH. J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda ini maka Indonesia berubah bentuk negaranya berubah menjadi negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyerahan kedaulatan menandai pengakuan Belanda atas berdirinya Republik Indonesia Serikat dan wilayahnya mencakup semua bekas wilayah jajahan Hindia-Belanda secara formal kecuali wilayah Irian Barat. Irian barat diserahkan oleh Belanda setahun kemudian.

### **b. Republik Indonesia Serikat**

Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuasaan Kolonial Belanda. Kabinet ini bertugas kurang dari satu tahun sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 20 Desember, kabinet RIS terbentuk dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini terdiri atas 13 menteri dan tiga menteri Negara, 11 orang diantaranya adalah Republikan. Tokoh-tokoh terkemuka yang duduk dalam kabinet ini antara lain dari pihak Republik Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Ir, Djuanda, Mr. Wilopo, Prof. Dr. Supomo, dr. Leimena, Arnold Mononutu, Ir, Herling Laoh, sedangkan dari BFO adalah Sultan Hamid II dan Ide Anak Agung Gde Agung. Kabinet ini merupakan *zaken kabinet* (yang mengutamakan keahlian anggota- anggotanya) dan bukan kabinet koalisi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Memang ada menteri yang merupakan anggota partai politik (PNI, Masyumi, dan Parkindo), tetapi mereka duduk dalam kabinet bukan sebagai wakil partai, melainkan sebagai perseorangan.

Kabinet Hatta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif, walaupun hubungan diplomatik masih lebih banyak dilakukan dengan negara-negara Barat daripada dengan Negara komunis. Hubungan dengan negeri Belanda diusahakan

menjadi lebih baik dengan harapan Belanda akan menyerahkan Irian Barat (Irian Jaya). Atas inisiatif pihak RI, pada bulan April 1950 di Jakarta dilangsungkan Konferensi Tingkat Menteri yang pertama antara Indonesia dan Belanda. Pada konferensi tersebut dibicarakan persiapan-persiapan untuk menyelesaikan sengketa Irian Barat. Sebagai hasilnya dibentuk Komisi Irian, yang anggota-anggotanya terdiri dari atas wakil-wakil Indonesia dan Belanda. Tugas komisi ini ialah mengadakan penyelidikan di Irian Barat serta melaporkan hasilnya. Konferensi selanjutnya memutuskan untuk melanjutkan perundingan mengenai masalah Irian Barat atas dasar laporan Komisi dalam Konferensi Tingkat Menteri Kedua di Den Haag pada tanggal 4 Desember 1950.

Delegasi RI yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Mr. Mohammad Roem mengajukan dua usul kompromi, yaitu agar pengakuan kedaulatan atas Irian Barat dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1950, sedangkan penyerahannya dapat dilaksanakan pada pertengahan tahun 1951 (Posesponegoro, Notosusanto 2010:303) Delegasi Indonesia juga memberikan jaminan mengenai kemerdekaan agama, hak-hak asasi manusia, dan otonomi seluas-seluasnya bagi penduduk Irian Barat serta jaminan perlindungan atas kepentingan-kepentingan Belanda. Namun, pihak Belanda tetap bersikukuh pada pendiriannya bahwa kedaulatan atas Irian Barat berada pada Uni Indonesia-Belanda, sedangkan de facto pemerintahan tetap di tangan mereka. Belanda menyerahkan pembentukan Dewan Irian Barat dan dalam dewan ini Indonesia mempunyai wakil-wakil Belanda. Dengan adanya perbedaan pendapat itu, perundingan tidak dapat diharapkan mencapai hasil. Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Reorganisasi tentara menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah RIS. Reorganisasi APRIS juga dihadapkan pada permasalahan psikologis tentara. Pemerintah RIS mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatasi masalah tersebut. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah RIS bertujuan agar proses peleburan bekas tentara KNIL ke dalam APRIS dapat berjalan dengan aman dan tertib, serta tidak timbul permasalahan di Belakang

hari, akan tetapi permasalahan tetap saja timbul menyangkut penyerahan dan pemasukan bekas tentara KNIL ke dalam APRIS.

Penyelesaian masalah reorganisasi KNIL pada masa awal dibentuknya APRIS mempengaruhi struktur angkatan perang pada masa itu. Pada masa APRIS, struktur pemerintahan militer dinyatakan tetap berlaku. Jabatan gubernur militer bertanggung jawab atas keamanan daerah serta merangkap sebagai koordinator keamanan untuk daerah kekuasaannya. Struktur organisasi APRIS pada awal pembentukannya disesuaikan pada masalah peleburan eks KNIL ke dalam APRIS yang sebagian besar adalah Angkatan Darat.

Di berbagai perundingan RI dengan Belanda, terutama Konferensi Meja Bundar nasib KNIL turut dibahas. Dalam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949, disepakati para serdadu KNIL, yang ditetapkan akan dibubarkan pada 26 Juli 1950 diberi pilihan untuk bergabung ke dalam APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Pembubaran itu mengakibatkan serdadu KNIL berkulit putih dipulangkan ke Belanda. Ribuan serdadu dilebur ke APRIS, dan personil lainnya dibebastugaskan meski masih menyisakan penyelesaian.

Sistem pemerintahan federal sesuai dengan KMB ternyata tidak berumur panjang. Pengakuan kedaulatan yang dilakukan pada tanggal 27 Desember 1949, itu justru mendorong gerakan persatuan yang bukan saja muncul di kalangan elit Indonesia, tetapi juga di kalangan masyarakat bawah sendiri. Gerakan ini menghendaki diubahnya bentuk federalis menjadi bentuk negara kesatuan.

Sistem federal dianggap sebagai warisan kolonial sehingga harus segera diganti. Dalam pandangan rakyat Indonesia, sistem federal dipandang sebagai alat pengawasan Belanda, sehingga sistem federal merupakan halangan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Mempertahankan sistem federal berarti mempertahankan warisan penjajahan masa lampau yang tidak disukai. (Kahin, 1955:571).

### **c. Kembali menjadi RI**

RI yang berpusat di Yogyakarta, memiliki peran yang besar dalam mewujudkan NKRI. Hal ini bisa dilihat dengan adanya unsur-unsur RI di dalam negara-negara dan daerah-daerah bagian lainnya di dalam RIS. Unsur-unsur tersebut ialah pemerintahan gerilya Tentara Nasional Indonesia (TNI) di daerah-daerah

pedalaman yang dibentuk sejak Agresi Militer Belanda dimulai dan para pamong praja (pegawai) RI yang bersikap tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan federal (Ranty, 1985:99). Keadaan tersebut menimbulkan dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan kembar (*dubbel bestuur*). Pemerintahan kembar adalah pemerintahan RI yang diselenggarakan oleh para pamong praja RI yang bergerilya bersama TNI serta pemerintahan yang diselenggarakan oleh pamong praja negara bagian yang menunggu likuidasinya (Ranty, 1985: 100).

Rakyat yang menetap di negara bagian, sebagian besar berpihak kepada pemerintah RI, karena mereka lebih percaya kepada pamong praja pemerintahan RI dan juga masih banyak rakyat di negara bagian yang mendambakan kembali kepada RI. Sehingga, pemerintah negara bagian tersebut tidak berjalan dengan lancar. Hal inilah yang menyebabkan di beberapa tempat diadakan kompromi antara pemerintah RI dengan pemerintah negara bagian. Adanya perundingan-perundingan terkait pemerintahan kembar antara pemerintah RI dengan pemerintah negara bagian, menyebabkan banyak daerah di wilayah kekuasaan negara bagian diperintah oleh pamong praja RI, dengan demikian semua daerah-daerah dari tingkat Kabupaten hingga Keresidenan terdapat pemerintahan RI yang diikuti oleh rakyat. Pemerintahan para pamong praja RI itu didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat RI di Yogyakarta (Ranty, 1985: 100-102).

Selanjutnya, semakin kuatnya gerakan kesatuan dari rakyat di negara-negara dan daerah-daerah bagian RIS yang menginginkan agar wilayahnya dikembalikan kepada RI, menyebabkan hampir semua negara- negara dan daerah-daerah bagian secara resmi dibubarkan oleh pemerintah RIS dan menggabungkan wilayahnya ke negara RI berdasarkan UU Darurat No. 11 Tahun 1950.

## **2. Indonesia Masa Demokrasi Liberal**

### **a. Sistem Pemerintahan Parlementer.**

Penyusunan UUDS 1950 bermula semenjak diadakan perundingan- perundingan antara Pemerintahan RIS atas nama NIT dan NTS, dengan Pemerintahan RI yang ingin kembali ke Negara Kesatuan. Sebagai hasil dari perundingan yang diadakan pada tanggal 19 Mei 1950 ditandatangani Piagam Persetujuan antara Pemerintahan RIS dan pemerintahan RI (ditandatangani oleh masing-masing perdana menteri). Sebagai kelanjutannya dibentuklah panitia yang merancang

UUDS negara Kesatuan (diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo (pihak RIS) dan Mr Abdul Hakim (pihak RI). Negara kesatuan RI, sebagaimana Republik Indonesia Serikat (RIS), adalah menganut sistem pemerintahan Kabinet Parlementer. Ketentuannya dapat dilihat pada pasal 45 ayat (1) yang mengartikan “Presiden ialah Kepala Negara”, begitu juga pasal 83 UUDS 1950, menerangkan:

1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.  
2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintahan. Sistem pertanggung jawaban Menteri menurut UUDS 1950 adalah Kepala Negara bukan penyelenggara kekuasaan pemerintahan, oleh karena itu dapat diganggu gugat. Serta Pemerintahan diselenggarakan oleh Dewan Menteri (Kabinet dengan Pedana Menteri sebagai Ketua). Menteri-menteri baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri harus mempertanggung jawabkan kebijaksanaan pemerintahannya kepada Badan Perwakilan Rakyat dengan konsekuensi:

- 1) Kalau kebijaksanaan tidak diterima, Dewan Menteri/ menteri yang bersangkutan harus jatuh;
- 2) Kalau dalam perselisihan Pemerintah merasa bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi mencerminkan kemauan rakyat, dapat meminta bantuan Kepala Negara untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya mengadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau ternyata masih ada perselisihan antara Pemerintahan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, maka Pemerintahan harus mengundurkan diri.
- 3) Kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh Pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **b. Kehidupan Politik Era Demokrasi Liberal**

Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, sistem politik yang dimiliki oleh Indonesia telah berhasil mendorong munculnya berbagai macam partai politik. Hal tersebut disebabkan karena dalam sistem kepartaian, sistem politik Indonesia menganut sistem multipartai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer yang memiliki gaya barat dengan sistem multipartai yang dianut, maka partai-partai politik yang mulai muncul ini lah yang akan menjalankan pemerintahan Indonesia melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 sampai dengan tahun 1959.

Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan Indonesia, adalah sebagai berikut.

- Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

- a) Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
- b) Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
- c) Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
- d) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
- e) Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir antara lain

- 1) Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
- 2) Indonesia masuk PBB,
- 3) Berlangsung perundingan antara Indonesia- Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

- Kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952)

Program pokok Kabinet Sukiman adalah

- 1) Menjamin keamanan dan ketentraman,
- 2) Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani,
- 3) Mempercepat persiapan pemilihan umum.
- 4) Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya, dan
- 5) Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat

buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

- Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Program pokok dari Kabinet Wilopo di dalam negeri adalah Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD, Meningkatkan kemakmuran rakyat, dan Meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Sedangkan untuk program luar negeri Kabinet Wilopo berfokus pada Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, hingga menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Kabinet ini tidak mempunyai prestasi yang bagus, justru sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul antara lain sebagai berikut.

- a) Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
- b) Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
- c) Munculnya gerakan sparatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat

alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.

d) Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya.

Kabinet ini jatuh dengan adanya Peristiwa Tanjung Morawa.. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

- Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu, Pembebasan Irian Barat secepatnya, Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB., Penyelesaian Pertikaian politik. Kabinet Ali I memiliki beberapa program kerja yang hampir seluruhnya berhasil dilaksanakan seperti mempersiapkan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955, Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955., Konferensi Asia-Afrika I ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955.

- Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru, Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi, Perjuangan pengembalian Irian Barat, Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih konstituante). Terdapat

70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

- Kabinet Ali Sastroamijoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)  
Ali Sastroamijoyo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Program pokok kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, seperti (a) Perjuangan pengembalian Irian Barat (b) Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD (c) Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai (d) Menyejahterakan perimbangan keuangan negara (e) Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selain hal tersebut Kabinet Ali II Melakukan lobi untuk membatalkan KMB, Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, hingga Melaksanakan keputusan KAA.

- Kabinet Djuanda ( 9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh Ir. Juanda.

Program Kabinet Djuanda disebut Panca Karya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya, programnya yaitu Membentuk Dewan Nasional, Normalisasi keadaan Republik Indonesia, Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB, Perjuangan pengembalian Irian Jaya, Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu (1) Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. (2) Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan

kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. (3) Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI. (4) Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

- a) Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
- b) Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.
- c) Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara.

### **c. Kehidupan Ekonomi Era Demokrasi Liberal**

Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut:

- 1) Gunting Syafruddin. Akibat dari perang kemerdekaan selama 5 tahun perekonomian di Indonesia terbelangai dan kacau sehingga Menteri Keuangan Indonesia Syafruddin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan sanering atau pengguntingan uang dengan tujuan menyehatkan keuangan negara. Dari kebijakan tersebut, uang kertas dengan nilai Rp 5.000 ke atas dinyatakan bernilai setengahnya.
- 2) Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir dan direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (Menteri Perdagangan). Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia dengan memberi bimbingan, bantuan kredit, serta

kesempatan bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

3) Nasionalisasi De Javasche Bank. Pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemriian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintahan Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan dari nasionalisasi De Javasche adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan;

4) Sistem Ekonomi Ali Baba. Pada pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Agustus 1954-Agustus 1955), Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Tjokroadisurjo memprakarsai sistem ekonomi yang dikenal dengan nama sistem Ali Baba. Sistem ini merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha nonpribumi (khususnya Cina) yang diidentikkan dengan Baba.

5) Devaluasi mata uang rupiah. Dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp 1.000 dan Rp 5.00 menjadi Rp 100 dan Rp 50.

6) Mengeluarkan deklarasi ekonomi. Deklarasi ekonomi (dekon) dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963. Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan sistem ekonomi terpimpin.

#### **d. Berakhirnya Demokrasi Liberal di Indonesia.**

Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehinggi menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap.

Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa

Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan- golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara.

Situasi dan kondisi seperti itu, beberapa partai politik mengajukan usul kepada Presiden Soekarno agar mengambil kebijakan untuk mengatasi kemelut politik.

Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang berisi sebagai berikut; a) Pembubaran Konstituante; b) Berlakunya kembali UUD 1945; c) Tidak berlakunya UUDS 1950; dan d) Pembentukan MPRS dan DPAS.

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensial dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

### **3. Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin**

#### **a. Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959**

Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk Undang – Undang Dasar baru atau Konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950. Konstituante melaksanakan sidang untuk merumuskan UUD yang baru dalam rangka menggantikan UUDS 1950. Namun sampai tahun 1958 Konstituante belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya perdebatan sengit yang berlarut-larut karena anggota Konstituante lebih mementingkan partainya dibanding kepentingan negara. Dalam kondisi tersebut, muncul pendapat di masyarakat untuk kembali kepada UUD 1945.

Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD yang baru terjadi karena sering terjadi perpecahan pendapat antara anggota Konstituante. Terlebih, konstituante terpecah ke dalam dua kelompok besar yang saling bertentangan, yaitu kelompok Islam dan kelompok Nasionalis. Kelompok Islam menghendaki dasar Negara Islam. Sedangkan kelompok nasionalis menghendaki dasar Negara Pancasila.

Pemilu 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas politik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintah pusat dengan

beberapa pemerintah di daerah. Perpecahan tersebut ditandai dengan berdirinya gerakan-gerakan bersifat kedaerahan seperti; Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Benteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi gerakan yang ingin memisahkan diri. Daerah – daerah tersebut tidak mengakui pemerintah pusat dan bahkan membentuk pemerintahan sendiri seperti PRRI dan PERMESTA.

Dengan melihat berbagai kondisi yang terjadi selama masa demokrasi Liberal, pemilu yang tidak bisa menciptakan stabilitas politik, gejolak di berbagai daerah, diperparah dengan kegagalan Konstituante dalam merumuskan UUD yang baru, maka presiden menganggap Indonesia dalam keadaan bahaya sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 ia mengeluarkan dekrit.

### **b. Kebijakan Demokrasi Terpimpin**

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat , TNI, Mahkamah agung serta sebagian besar anggota DPR. Hal ini disebabkan masyarakat mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin muncul seiring keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS Nomor VIII/MPRS/1959. Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno memperkenalkannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dianggap sebagai Manifesto Politik yang disingkat Manipol. Isi Manipol disimpulkan menjadi lima prinsip yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Manipol-USDEK dikaitkan dengan dasar negara Pancasila sehingga menjadi rangkaian pola ideologi Demokrasi Terpimpin.

Sukarno menghendaki persatuan ideologi antara Nasionalisme, Islam dan Marxis dengan doktrin Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Doktrin ini mengandung arti bahwa PNI (nasionalis), Partai NU (Agama) dan PKI (komunis) akan berperan secara bersama dalam pemerintahan disegala tingkatan sehingga

menghasilkan sistem kekuatan koalisi politik. Namun pihak militer tidak setuju terhadap peran PKI di pemerintahan (Ricklefs, 1991:406).

Kebijakan–kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin selain bertentangan dengan politik bebas aktif, juga dianggap menguntungkan PKI. Kebijakan yang dianggap menyimpang dari politik bebas aktif antara lain adanya pandangan tentang kekuatan yang saling berlawanan yaitu Oldefo dan Nefo, yang dalam hal ini memosisikan Indonesia masuk kedalam kelompok Nefo. Selain itu Indonesia juga menggunakan politik mercusuar dan membentuk poros Jakarta-Peking.

### **c. Pembebasan Irian Barat**

Dalam Konferensi Meja Bundar(KMB) di Den Haag tahun 1949 telah disepakati tentang pengakuan atas kedaulatan RI oleh Belanda kecuali wilayah Irian Barat. Irian Barat akan dibicarakan satu tahun setelah KMB sebagai upaya kompromi antara kedua belah pihak. Para Wakil Indonesia dalam KMB berusaha secepatnya memperoleh pengakuan kedaulatan sehingga bersedia menerima penundaan penyerahan atas Irian Barat. Hal ini disebabkan adanya kekawatiran jika pembicaraan masalah Irian Barat berlarut-larut akan menimbulkan komplikasi yang menghambat pelaksanaan penyerahan kedaulatan (Sayidiman Suryohadiprojo, 1996:115).

Namun lebih dari sepuluh tahun dari kesepakatan KMB Belanda menolak menyerahkan Irian Barat. Sebaliknya, Belanda memperkuat kedudukannya secara militer dan politik di wilayah tersebut. Para pemimpin RI dan TNI menyimpulkan bahwa Belanda mengingkari hasil KMB sehingga pada tanggal 8 Mei 1956 Pemerintah RI memutuskan secara sepihak untuk membatalkan perjanjian KMB. Pemerintah membawa masalah ini ke forum PBB namun ketika dalam Sidang Umum PBB ke-12 tahun 1957 yang salah satu agendanya membahas Irian Barat, kembali Indonesia gagal.

Kegagalan jalur diplomasi tersebut menyebabkan Indonesia mengambil jalan radikal atau jalur konfrontasi. Dalam pidato rapat raksasa di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan suatu komando untuk pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikora (Tri Komando rakyat), yang berisi sebagai berikut:

- 1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda
- 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Isi Trikora ini kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan rapat pada 31 Desember 1961 Depertan dan Koti yang menghasilkan: Pembentukan Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibukota Kota Baru dan Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yang diberi nama Perjanjian New York.

#### **d. Konfrontasi Indonesia-Malaysia**

Konfrontasi dengan Malaysia dilatarbelakangi ketika pada tahun 1961 terdapat rencana pembentukan Negara Federal Malaysia. Pembentukan negara tersebut, yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Serawak, Brunei, Sabah dan Singapura ditentang oleh Presiden Sukarno. Sukarno menganggap bahwa pembentukan Malaysia sebagai "Proyek Neokolonialisme" (Nekolim) dari Inggris sehingga membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Sebaliknya, Sukarno mendukung berdirinya Negara Kesatuan Kalimantan Utara yang diproklamirkan di Manila, Philipina oleh A.M Azhari dari Brunei.

Philipina juga menentang pembentukan Negara Malaysia, dengan alasan bahwa secara historis dan yuridis wilayah Sabah yang akan dimasukkan dalam Negara Malaysia adalah milik Sultan Sulu dari Philipina yang disewakan kepada pemerintah Inggris. Akibatnya muncul ketegangan antara Indonesia dan Philipina disatu pihak dengan Persekutuan Tanah Melayu.

Presiden Sukarno berusaha keras menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia tersebut. Untuk melaksanakan kebijakannya dilancarkan konfrontasi bersenjata dengan Malaysia berdasarkan Dwikora (Dwi Komando Rakyat, yakni:

- 1) Perhebat ketahanan revolusi Indonesia
- 2) Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia.

Para sukarelawan dan TNI berusaha masuk ke daerah Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara untuk melancarkan operasi militer terhadap angkatan perang

persemakmuran Inggris. Namun TNI-AD berusaha mencari jalan agar dalam konfrontasi dengan Malaysia tersebut tidak dijadikan oleh PKI sebagai jalan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam strategi politiknya. (Frederick P. Bunnell, dalam Mahaimin, 2002:181).

#### **4. Ancaman Disintegrasi Bangsa dan Usaha Penyelesaiannya**

##### **a. Pemberontakan PKI Madiun**

Latar belakang pemberontakan PKI Madiun, berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifudin. Sebagai Perdana Menteri yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville. Sejak penandatanganan perjanjian Renville, Amir Syarifudin tidak lagi mendapat dukungan dalam kabinet. Selanjutnya dibentuk Kabinet baru dengan Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Pembentukan kabinet baru tidak disetujui oleh Amir Syarifudin dengan kelompok sayap kiri lainnya, yang kemudian bergabung dalam FDR.

Di bawah pimpinan Muso PKI berusaha meraih kekuasaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih kekuasaan adalah dengan menarik partai dan berbagai organisasi untuk bergabung dengan FDR. Mendorong melakukan demonstrasi, pemogokan kaum buruh dan petani. Muso juga memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah, dengan melakukan kritik atau pernyataan yang tidak menguntungkan, bahkan membahayakan strategi diplomasi Indonesia melawan Belanda yang pada waktu itu ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) (Rosa, 2008). Pernyataan-pernyataan Muso lebih menunjukkan keberpihakannya pada Uni Soviet, sementara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua Negara berseberangan dalam Perang Dingin, Puncak dari upaya yang dilakukan oleh PKI adalah melakukan pembontakan Senjata pada tanggal 18 September 1948 di Kota Madiun. Bersamaan dengan itu pula diproklamirkan berdirinya "Republik Soviet Indonesia" dan dibentuknya pemerintahan baru ( Abdullah, 2012).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meredam aksi yang dilakukan PKI adalah dengan melakukan diplomasi dengan pimpinan PKI Muso. Namun demikian upaya diplomasi menemukan jalan buntu. Mengingat situasi pada saat itu sudah semakin memanas. Aksi yang dilakukan oleh PKI pada awal pemberontakan adalah melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, tokoh-tokoh partai politik

anti komunis dan juga membunuh kaum santri. PKI juga melakukan tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap tokoh-tokoh yang berseberangan dengan PKI tidak segan-segan mereka membunuh dan menembak lawan-lawan politiknya. Pemberontakan PKI Madiun akhirnya dapat ditumpas oleh pasukan Divisi Siliwangi. Pemberontakan PKI Madiun dapat dipadamkan dan pemimpin pemberontakan Muso tewas tertembak, sementara Amir Syarifudin ditangkap dan jatuh hukuman mati. Sedangkan tokoh-tokoh PKI muda seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri dan pada saat itu PKI belum dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

### b. Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) yang dipimpin oleh Kartosuwirjo, pada awalnya hanya berlangsung di Jawa Barat, kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Kartosuwirjo sendiri pada awalnya seorang pejuang melawan Belanda. Ia diangkat menjadi sekretaris Masyumi Jawa Barat. Berawal dari hasil perjanjian Renville, sesuai dengan perjanjian Renville, maka TNI harus meninggalkan daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Sementara itu laskar Hisbullah dan Sabilillah di bawah pengaruh Kartosuwirjo tidak bersedia pindah atau meninggalkan Jawa Barat, bahkan mereka membentuk Tentara Islam Indonesia (TII). Bersama dengan TII, kemudian Kartosuwirjo menyatakan pembentukan Darul Islam pada Agustus 1949 (Abdullah, 2012)

Pada saat pasukan Siliwangi tersebut berhijrah, DI/TII dengan leluasa melakukan gerakannya dengan merusak dan membakar rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, serta menyiksa dan merampas harta benda yang dimiliki oleh penduduk di daerah tersebut. Kemudian ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat, Kartosuwirjo tidak mau mengakui TNI, kecuali TNI bergabung dengan DI/TII. Itu artinya Kartosuwirjo tidak mengakui pemerintah RI di Jawa Barat. Pada Tanggal 7 Agustus 1949, di sebuah desa yang terletak di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo mengumumkan bahwa Negara Islam Indonesia telah berdiri di Negara Indonesia, dengan gerakannya yang disebut dengan DI (Darul Islam) dan para tentaranya diberi julukan dengan sebutan TII (Tentara Islam Indonesia). Gerakan DI/TII ini dibentuk pada saat provinsi Jawa

Barat ditinggalkan oleh Pasukan Siliwangi yang sedang berhijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dalam rangka melaksanakan perundingan Renville.

Untuk menghadapi pasukan DI/TII, pemerintah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk meringkus kelompok ini. Pada tahun 1960 para pasukan Siliwangi bekerjasama dengan rakyat untuk melakukan operasi “Bratayudha” dan “Pagar Betis” untuk menumpas kelompok DI/TII tersebut. Pada Tanggal 4 Juni 1962 Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan para pengawalnya di tangkap oleh pasukan Siliwangi dalam operasi Bratayudha yang berlangsung di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Setelah Sekarmadji ditangkap oleh pasukan TNI, Mahkamah Angkatan Darat menyatakan bahwa Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dijatuhi hukuman mati, dan setelah Sekarmadji meninggal, pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dapat dimusnahkan.

Pemberontakan DI/TII merupakan pemberontakan yang hampir menyeluruh terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berikut merupakan cakupan wilayah pemberontakan DI/TII.

Tabel Pemberontakan DI/TII di berbagai wilayah

No	Pemberontakan	Waktu	Pemimpin
1	Jawa Barat	7 Agustus 1949	Kartosuwiryo
2	Jawa Tengah	23 Agustus 1949	Amir Fatah
3	Aceh	20 Spetember 1953	Daud Beureueh
4	Kalimantan Selatan	Oktober 1959	Haderi bin Umar
5	Sulawesi Selatan	1951	Kahar Muzakar

c. Pemberontakan APRA

Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut APRA merupakan pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda sebagai Negara RIS. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di pimpinan oleh Kapten Raymond Westerling dan didalangi oleh golongan kolonialis Belanda. Landasan yang mendorong gerakan APRA adalah kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil. Westerling memahami bahwa sebagian rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan, baik oleh Belanda atau Jepang, mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Menurut ramalan itu akan datang seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang akan memerintah rakyat dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman dan damai

dan rakyat akan makmur dan sejahtera. Selanjutnya Westerling menghimpun rakyat dan mantan tentara KNIL yang pro terhadap Belanda untuk ikut bergabung menjadi bagian dari tentara APRA.

Tujuan Westerling membentuk APRA ini adalah mengganggu prosesi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949. Upaya itu dihalangi oleh Letnan Jenderal Buurman van Vreeden, Panglima Tertinggi Tentara Belanda. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS (Djoened, 2010).

Operasi penumpasan dan pengejaran terhadap gerombolan APRA yang sedang melakukan gerakan mundur segera dilakukan oleh TNI. Sisa pasukan Wasterling di bawah pimpinan Van der Meulen yang bukan anggota KNIL Batujajar dan polisi yang menuju Jakarta, pada 24 Januari 1950 dihancurkan Pasukan Siliwangi dalam pertempuran daerah Cipeuyeum dan sekitar Hutan Bakong dan dapat disita beberapa truk dan pick up, tiga pucuk bren, 4 pucuk

Di kota Bandung juga diadakan pembersihan dan penahanan terhadap mereka yang terlibat, termasuk beberapa orang tokoh Negara Pasundan. Bagaimana dengan Wasterling? Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling masih melanjutkan petualangannya di Jakarta. Ia merencanakan suatu gerakan untuk menangkap semua Menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet, dan membunuh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mr. A. Budiardjo, dan Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang.

Gerakan tersebut dapat digagalkan dan kemudian diketahui bahwa otaknya adalah Sultan Hamid II, yang juga menjadi anggota Kabinet RIS sebagai Menteri tanpa portofolio. Sultan Hamid II dapat segera ditangkap, sedangkan Westerling sempat melarikan diri ke luar negeri. Dengan kaburnya Wasterling, maka gerakannya pun jadi bubar.

#### d. Pemberontakan Andi Azis

Pemberontakan Andi Azis yang terjadi di Makassar pada tahun 1950, dipimpin oleh Andi Aziz sendiri, seorang perwira mantan KNIL. Pada dasarnya pemberontakan tersebut dilatar belakangi oleh keinginan Andi Aziz dengan gerombolannya ingin mempertahankan Negara Indonesia Timur, Disamping di

latar belakang pula oleh penolakan masuknya TNI ke dalam bagian Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tindakan yang dilakukan oleh Andi Azis adalah menduduki tempat-tempat penting, dan menawan Panglima Teritorium Indonesia Timur yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginata.

e. Pemberontakan RMS

Pemberontakan RMS yang didalangi oleh mantan jaksa agung NIT, Soumokil bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diproklamasikannya Republik Maluku Selatan (RMS), Gubernur Sembilan Serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan RI. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi RMS, Soumokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI dipandang buruk oleh Soumokil

Dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara diplomasi perdamaian. Karena upaya perdamaian yang diajukan oleh pemerintah tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan Gerakan Operasi Militer (GOM) III yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E Kawilarang, yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.

f. Pemberontakan PRRI/Permesta

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan PERMESTA sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949 dan pada saat bersamaan Divisi Banteng diciutkan sehingga menjadi kecil Pada saat itu juga, terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatra dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu terbentuknya dewan militer daerah yaitu Dewan Banteng yang berada di daerah Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956.

Selanjutnya, PRRI membentuk Dewan Perjuangan dan tidak mengakui kabinet Djuanda. Dewan Perjuangan PRRI akhirnya membentuk Kabinet baru yang disebut Kabinet Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Kabinet PRRI). Dewan Perjuangan PRRI mengeluarkan pernyataan berupa “Piagam Jakarta” yang berisi sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Soekarno supaya “bersedia kembali kepada kedudukan yang konstitusional, menghapus segala akibat dan tindakan yang melanggar UUD 1945 serta membuktikan kesediaannya itu dengan kata dan perbuatan...”. Tuntutan tersebut antara lain:

- a. mendesak kabinet Djuanda supaya mengundurkan diri dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno,
- b. mendesak pejabat presiden, Mr. Sartono untuk membentuk kabinet baru yang disebut Zaken Kabinet Nasional yang bebas dari pengaruh PKI (komunis),
- c. mendesak kabinet baru tersebut diberi mandat sepenuhnya untuk bekerja hingga pemilihan umum yang akan datang,
- d. mendesak Presiden Soekarno membatasi kekuasaannya dan mematuhi konstitusi,
- e. Jika tuntutan tersebut di atas tidak dipenuhi dalam waktu 5×24 jam maka Dewan Perjuangan akan mengambil kebijakan sendiri.

Tujuan dari pemberontakan PRRI ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, sebab pada saat itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. PRRI memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat (Abdullah, 2012). Meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI ini benar, namun cara yang digunakan untuk mengoreksi pemerintah pusat itu salah.

Untuk melancarkan penumpasan terhadap Pemberontakan tersebut, pemerintah membentuk sebuah pasukan Operasi Militer yang operasinya disebut Operasi Merdeka pada bulan April 1958 dan operasi tersebut di pimpin oleh Letkol Rukminto Hendradiningrat. Organisasi PERMESTA diduga mendapatkan bantuan dari tentara asing, dan bukti dari bantuan tersebut adalah jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L Pope (Seorang Warga negara Amerika) yang tertembak jatuh di Ambon pada tanggal 18 Mei 1958. Pada tanggal 29 Mei 1961, Achmad Husein menyerahkan diri, dan pada pertengahan tahun 1961, para tokoh-tokoh

yang bergabung dalam gerakan PERMESTA juga menyerahkan diri.

g. Pemberontakan G30S/PKI

Peristiwa G30S merupakan puncak kemelut politik, dari pertikaian kekuatan-kekuatan politik yang bersumber pada pertentangan (konflik) ideologi yang telah berlangsung sebelumnya. Ideologi menjadi sumber konflik, mengingat dalam sejarah kepartaian di Indonesia, partai tumbuh dan berkembang berdasarkan pada ideologi tertentu. Di penghujung pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, tiga kekuatan politik hadir dipentas perpolitikan Indonesia. Tiga kekuatan tersebut adalah Soekarno sebagai sosok yang memegang kekuasaan, Militer-TNI AD sebagai penjaga kedaulatan negara yang sekaligus memiliki peran sosial-politik, dan PKI sebagai kekuatan politik yang memiliki basis masa cukup kuat dan sebagai satu-satunya kekuatan politik yang mampu mengimbangi kekuatan militer. Munculnya tiga kekuatan politik tersebut, merupakan sebuah proses panjang dari pertikaian kekuatan politik yang bernuansa ideologis dalam setiap periode pemerintahan, dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin, kemudian bermuara pada tragedi berdarah peristiwa G30S.

Terjadi peristiwa pada malam 30 September 1965 terkait penculikan para jenderal. Dari peristiwa tersebut membuat ketujuh jenderal tersebut meninggal dunia. Setelah peristiwa puncak tersebut, muncul berbagai pandangan dan saling melempar tanggung jawab mengenai siapa dalang dibalik peristiwa kejam tersebut. Terjadi pergolakan hebat setelah hari – hari tersebut. PKI yang dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab mendapat tekanan yang luar biasa. Namun demikian Presiden Soekarno tetap menghimbau rakyat untuk tetap bersatu dan tidak termakan fitnah.

Masyarakat secara luas menuntut beberapa hal yang sering dikenal dengan Tritura. Bubarkan PKI, Perombakan kabinet Dwikora, dan turunkan harga pangan. Soekarno mengeluarkan surat perintah guna pengamanan Pemerintahan, yang sampai saat ini dikenal sebaga Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).

### D. Rangkuman

Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, bukan akhir dari perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk dapat kembali menguasai Indonesia seperti dengan cara agresi ataupun menggunakan kekuatan bangsa Indonesia sendiri untuk melakukan pemberontakan. Namun akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan RI melalui KMB.

KMB bukan sebatas cek kosong, karena pengakuan kemerdekaan tersebut diikuti syarat lain dari Belanda yang bertujuan tetap mempunyai peran dan pengaruh di Indonesia. Salah satu syaratnya Indonesia diharuskan menerapkan negara serikat dalam sistem pemerintahannya. Hal ini sebagai upaya Belanda untuk dapat mempengaruhi negara-negara serikat yang mendukungnya.

Meski demikian, upaya memecah belah dengan menggunakan sistem pemerintahan tersebut dapat digagalkan karena bentuk pemerintahan serikat tidak sesuai dengan kemauan mayoritas rakyat Indonesia sehingga akhirnya kembali ke bentuk Republik Indonesia.

Setelah bentuk serikat (RIS) dibubarkan maka Indonesia memasuki sistem pemerintahan demokrasi liberal. Namun sistem ini tidak dapat menunjukkan stabilitas dalam berbagai hal sehingga diganti dengan Demokrasi Terpimpin melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Untuk kebijakan politik luar negeri, saat itu terjadi dua bentuk konfrontasi dengan negara lain. Pertama dengan Belanda terkait pembebasan Irian Barat, kedua konfrontasi dengan Malaysia.

Dalam rentang waktu setelah kemerdekaan sampai jatuhnya pemerintahan Sukarno, terdapat berbagai macam pemberontakan dan gerakan separatis dengan berbagai latar belakang dan penyelesaiannya.

## **Pembelajaran 6. Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi**

### **A. Kompetensi**

Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi guru bidang studi yang lebih spesifik pada pembelajaran 6. Indonesia masa Orde Baru dan reformasi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, adalah guru P3K mampu;

1. Menjelaskan kondisi politik dan pemerintahan Orde Baru
2. Menganalisis pemerintahan Masa Reformasi

### **B. Indikator Pencapaian Kompetensi**

Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran 6. Indonesia Masa Orde Baru dan reformasi adalah sebagai berikut;

1. Menjelaskan lahirnya pemerintahan Orde Baru
2. Mengidentifikasi karakter pemerintahan Orde Baru
3. Mengidentifikasi kehidupan politik dan pemerintahan pada Masa Orde Baru.
4. Menganalisis proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru
5. Mengidentifikasi sistem pemerintahan Era Reformasi.
6. Menganalisis masa pemerintahan BJ Habbibie sampai pemerintahan Joko Widodo.

### **C. Uraian Materi**

#### **1. Kondisi Politik dan Pemerintahan Orde Baru**

##### **a. Lahirnya Orde Baru**

Salah satu fase penting dalam sejarah Indonesia adalah masa peralihan dari pemerintahan Sukarno ke Soeharto. Tahapan ini dimulai setelah meletusnya peristiwa penculikan para pemimpin Angkatan Darat (AD) pada 1 Oktober 1965. Penculikan tersebut mengakibatkan pucuk pimpinan AD menjadi kosong. Melihat

masalah tersebut, Soeharto sebagai salah satu pimpinan AD berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan jajaran pimpinan yang masih ada serta segera menyusun strategi untuk mengambil alih keadaan dan mengamankan situasi. Dari sini kemudian ia diberikan wewenang oleh Sukarno pada 3 Oktober 1965 sebagai pelaksana pemulihan keamanan dan ketertiban. Gerak cepat yang dikomandoi oleh Soeharto ini kemudian membawanya masuk ke dalam jajaran eksekutif pemerintahan sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat sekaligus panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Sebagai pengganti Ahmad Yani, Soeharto kemudian mengambil tindakan dengan membekukan PKI dan organisasi yang berada dalam naungannya.

Akibat peristiwa 1 Oktober 1965 itu, terjadi berbagai goncangan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Hal ini kemudian menyulut gerakan massa yang dimotori oleh para mahasiswa yang terbabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 25 Oktober 1966. Setelah itu, banyak bermunculan kesatuan aksi lain dari berbagai lapis kelompok masyarakat. Munculnya kesatuan aksi ini bermuara pada demonstrasi besar-besaran yang mulai dilakukan pada Januari 1966. Di Jakarta demonstrasi secara maraton. Dari sinilah lahir aspirasi bertajuk Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah yang berisikan (1) bubarkan PKI, (2) retool kabinet Dwikora, dan (3) turunkan harga/perbaiki ekonomi (Kartasasmita, dkk., 1995).

Tuntutan dari masyarakat telah mendorong Sukarno untuk melakukan perubahan kabinet. Pada 21 Februari 1966, ia mengumumkan susunan kabinet baru yang terdiri atas 102 menteri. Kabinet ini disebut 'Kabinet Dwikora yang Disempurnakan.' Akan tetapi, para mahasiswa menyebutnya sebagai 'Kabinet 100 Menteri.' Tak ayal lagi, hal ini memicu kekecewaan di kalangan mahasiswa. Akibatnya, setelah pelantikan kabinet pada 24 Februari 1966, terjadi kembali demonstrasi dan aksi serentak pengempisan ban-ban mobil. Aksi ini mengakibatkan bentrok yang menewaskan Arif Rahman Hakim. Di tubuhnya bersarang timah panas yang dimuntahkan oleh Resimen Cakrabirawa. Ini pulalah yang mengakibatkan pada 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010).

Serangkaian peristiwa pada akhir tahun 1965 sampai awal tahun 1966 bermuara pada dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Supersemar lahir dari kegentingan situasi yang telah mencapai klimaks. Isi dalam Supersemar

itu adalah memerintahkan kepada Soeharto untuk mengamankan Pancasila, mengamankan UUD 1945, menjaga stabilitas nasional, dan menjaga keamanan Bung Karno. Akan tetapi dalam perkembangannya terjadi berbagai macam kontroversi tentang naskah asli Supersemar.

Dampak dari Supersemar sangatlah terasa. Tidak lama setelah Soeharto menerimanya, keluarlah Keputusan Preseden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin besar Revolusi Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam surat tersebut turut dibubarkan pula semua organisasi yang sezasas/berlindung/bernaung di bawah PKI. Surat tersebut ditandatangani oleh Soeharto atas nama presiden (Kartasasmita, dkk., 1995).

Kedudukan Supersemar semakin menguat ketika dikukuhkan menjadi Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Pangti ABRI/PBR/Mandataris MPRS. Ketetapan ini dikeluarkan bersama 23 ketetapan lain dalam sidang umum MPRS IV pada 20 Juni 1966 sampai 5 Juli 1966. Pada sidang umum itu pula Sukarno membacakan pidato berjudul *Nawaksara* (*nawa* = sembilan, *aksara* = pasal). Pidato yang sering dianggap sebagai pertanggungjawaban presiden ini ternyata dianggap tidak memenuhi harapan karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan presiden tentang peristiwa Gerakan 30 September.

Di dalam ketetapan MPRS tersebut diputuskan pula untuk “Mempercayakan kepada Letnan Jenderal TNI. Soeharto Menteri Panglima Angkatan Darat, pemegang Ketetapan tersebut, untuk memikul tanggung jawab wewenang yang terkandung didalamnya dengan penuhkebijaksanaan, demi pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan Revolusi dan demi kebulatan serta kesatuan Bangsa dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.”

Telah dikukuhkannya Supersemar sering ditandai sebagai pembuka babakan baru dalam kehidupan bernegara. Babakan sejarah ini sering disebut sebagai Orde Baru. Sebagaimana tertuang dalam lampiran Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Supersemar sebagai kunci babak baru dalam sejarah revolusi Indonesia, yaitu babak pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Masih menurut ketentuan tersebut, Supersemar diharapkan mampu menguatkan Pancasila dan pemerintahan, sehingga dapat merealisasikan dasar dan tujuan revolusi secara bertahap.

### **b. Karakteristik Orde Baru**

Menurut Prof. Dwight Y King, pakar politik dari Amerika, pemerintahan Orde Baru memiliki karakteristik *bureaucratic authoritarian*. Ciri-cirinya adalah: (1) kewenangan tertinggi di tangan militer, (2) adanya mentalitas teknokratik yang merata, (3) adanya proses untuk menciptakan massa mengambang, menciptakan konsensus dan konformitas, (4) upaya untuk mencapai tujuan melalui represi. Pada awal Orde Baru, militer memainkan lebih banyak peran dalam aspek politik dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dalam perkembangannya militer memegang posisi penting dalam kabinet dan elite birokrasi. Lekatnya militer dalam pemerintahan Orde Baru disebabkan konsep Dwi Fungsi yang ada di dalam militer Indonesia. Militer tidak hanya berperan dalam masalah ketahanan negara, tetapi juga dalam masalah sosial dan politik masyarakat.

Pada masa Orde Baru, berdasarkan Tap MPR No. VIII/MPR/1973 tentang pemilihan umum disebutkan bahwa susunan keanggotaan DPR dan DPRD terdiri atas Golongan Politik, Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Sedangkan susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota DPR ditambah Utusan Daerah, Utusan Golongan Politik, Utusan Golongan Karya ABRI dan bukan ABRI. Dalam MPR Fraksi ABRI memiliki hak veto apabila suatu keputusan politis dianggap membahayakan keselamatan negara (Widiarto, Syafaat dan Suryokumoro, 2007). Di bidang ideologi, Pancasila tampak semakin diperkuat. Upaya memperkuat Pancasila dilakukan lagi dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) atau yang sering dikenal dengan P4. Puncaknya adalah dengan dijadikannya Pancasila sebagai Azas Tunggal setelah berlangsungnya Sidang Umum MPR tahun 1983 dengan adanya Tap MPR No. II/1983 (Santoso, 1993).

Dalam bidang pemerintahan, tercipta pola patronase di kalangan elite. Hal ini tampak dari pengangkatan pejabat-pejabat pusat yang cenderung berasal dari lingkungan terdekat Soeharto. Akibatnya, posisi Presiden amatlah sentral karena melahirkan pola loyalitas patron-client yang berpusat pada Soeharto. Dalam pemerintahan Orde Baru adalah sentralisasi yang kuat dan ambivalensi hubungan

pusat-daerah (Santoso, 1993). Pemerintahan Orde Baru telah berhasil menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Pada 14 Juli sampai 4 Agustus 1969 berhasil diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

**c. Kehidupan Politik dan Pemerintahan pada Masa Orde Baru.**

Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, pada 6 Juni 1968 diumumkan susunan Kabinet Pembangunan (Kartasasmita, dkk., 1995). Tugas pokok kabinet ini sebagaimana dalam Ketetapan MPRS No XLI/MPRS/1968 disebut sebagai Pancakrida. Rinciannya adalah sebagai berikut.

- Menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pemilihan Umum;
- Menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun;
- Melaksanakan Pemilihan Umum selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1971;
- Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S/PKI dan setiap rongrongan, penyelewengan, serta pengkhiatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
- Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat rendah.

Dalam kabinet yang pertama ini, Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi. Reformasi dilakukan dengan menyederhanakan dan penggabungan departemen. Pada masa itu, hanya terdapat 5 menteri negara dan 18 menteri/pimpinan departemen yang duduk di dalam kabinet. Sebagai tindak lanjut Pancakrida, pada 3 Maret 1969 dibentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Lembaga ini bertugas (1) memulihkan keamanan dan ketertiban dalam hubungan dengan sebab akibat pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan-kegiatan eksterm dan subversi lainnya; dan (2) mengamankan kewibawaan pemerintah dan alat- alatnya dari pusat sampai dengan daerah, untuk menjamin kelangsungan hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini benih-benih kekuasaan militer semakin mengemuka dan menjadi pendukung utama Orde Baru (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010). Inilah yang menjadikan pemerintahan Orde Baru mampu bertahan selama 32 tahun.

Selanjutnya, pemerintahan masa Orde Baru sejak 1968 berhasil menjalankan pemerintahan selama 7 periode kabinet. Kabinet pada masa Orde Baru sejak 1968 dinamakan Kabinet Pembangunan. Sepanjang periode Orde Baru, berhasil disenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali. Pemilihan umum pertama dilakukan pada 1971. Selanjutnya pemilihan dilakukan secara rutin setiap lima tahun semenjak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilihan umum pertama tahun 1971, peserta sejumlah 10 partai politik/organisasi. Peserta ini merupakan yang terbanyak selama Orde Baru.

Pemungutan suara dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Pada pemilu ini, partai-partai politik mendapat 124 kursi di DPR dan Golongan Karya mendapat 261 kursi. Sementara itu, ABRI mendapat 75 kursi. Pada pemilihan umum selanjutnya, hanya terdapat dua partai politik dan satu golongan karya. Hal ini merupakan hasil dari penyederhanaan partai politik yang telah digagas sejak pertemuan antara predisen dengan partai politik pada 27 Februari 1970. Gagasan penyederhanaan ditindaklanjuti dengan terbentuknya kelompok nasionalis pada 4 Maret 1970 dan kelompok spirituil pada 14 Maret 1970. Kelompok Nasionalis terdiri atas PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik. Kelompok ini kemudian dinamakan kelompok demokrasi pembangunan. Sementara itu kelompok spirituil terdiri atas NU, Parmusi, PSII, dan Perti yang menamakan diri kelompok persatuan.

#### **d. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru**

Pemilihan Umum 1997 menetapkan Golkar sebagai pemenang dengan suara mayoritas. Hal ini mendorong dicalonkannya kembali Soeharto yang telah berusia 76 tahun menjadi presiden. Pada 11 Maret 1998 secara aklamasi Soeharto kembali terpilih didampingi oleh B.J. Habibie. Tak lama berselang pada 14 Maret 1998, dibentuklah kabinet yang di dalamnya terdapat beberapa kerabat dekat Soeharto. Terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden ditambah dengan kondisi ekonomi yang kian parah telah mendorong munculnya kekuatan oposisi yang telah sekian lama dibatasi gerakannya. (Ricklefs, 2008).

Pada tahun 1990-an berbagai kelompok oposisi mulai bermunculan. Abdurrahman Wahid, pemimpin Nahdlatul Ulama tampil sebagai sosok yang memperjuangkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, serta pluralisme. Hal yang tidak kalah menarik adalah perpecahan dalam tubuh PDI yang akhirnya mencuatkan nama Megawati Soekarnoputri yang kelak menjadi presiden RI. Akibat perpecahan dalam PDI

pada pemilihan 1997, suara PDI anjlok. Selain itu kelompok-kelompok intelektual dan aktivis mulai bergeliat. Salah satunya adalah Amien Rais yang berinisiatif untuk mengoordinasi beberapa demonstrasi antipemerintah pada Mei 1998.

Merespon masalah ini, berbagai demonstrasi digelar sejak awal 1998. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menuntut agar segera dilakukan reformasi politik. Akan tetapi, karena merasa tidak mendapat tanggapan, aksi demonstrasi meluas ke luar kampus. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 1998 setelah pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Pada mulanya mahasiswa merencanakan momentum hari kebangkitan nasional pada 20 Mei 1998 sebagai hari reformasi nasional. Akan tetapi, bentrokan antara aparat keamanan dengan mahasiswa terjadi lebih cepat. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta, telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. Demonstrasi tersebut menuntut dilaksanakannya agenda reformasi sebagai berikut.

- Adili Soeharto dan kroni-kroninya,
- Laksanakan amandemen UUD 1945,
- Hapuskan Dwi Fungsi ABRI,
- Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,
- Tegakkan supremasi hukum,
- Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Penembakan terhadap mahasiswa memicu terjadinya demonstrasi yang lebih besar dan tersebar ke beberapa kota di luar Jakarta seperti Solo. Bahkan kerusuhan tidak dapat dielakkan pada 13-14 Mei 1998. M.C. Ricklefs menggambarkan bahwa kerusuhan Mei 1998 merupakan kerusuhan perkotaan terburuk sepanjang sejarah Indonesia, dengan pusat perbelanjaan, ribuan toko, rumah, dan tempat usaha serta kendaraan dihancurkan. Di tengah kondisi ini, Soeharto justru menghadiri kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi G-15 di Mesir pada 9 Mei 1998. Akan tetapi, karena situasi kian memanas Soeharto kembali ke

Indonesia pada 15 Mei 1998.

Kerusuhan ini sampai menelan ratusan korban di berbagai kota. Puncaknya pada 17-18 Mei 1998, Gedung DPR/MPR berhasil diduduki oleh mahasiswa. Sebagai reaksi atas aksi tersebut Harmoko selaku pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi 'anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri'. Setelah peristiwa itu, Soeharto mulai ditinggal para pembantunya. 14 menteri yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita menyatakan diri tidak bersedia menjabat dalam kabinet baru serta mendesak presiden untuk mundur.

Merespon hal-hal tersebut, pada 20 Mei 1998, Presiden Soeharto bertemu dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meminta pertimbangan dalam rangka pembentukan Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto sendiri. Akan tetapi, Dewan Reformasi urung dibentuk dan akhirnya Soeharto mundur pada 21 Mei 1998 dan menyerahkan kepemimpinan ke B.J. Habibie.

## 2. Pemerintahan Masa Reformasi

### a. Sistem Pemerintahan Era Reformasi

Mundurinya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru". Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

<b>SU dan ST MPR</b>	<b>Waktu</b>	<b>Keputusan</b>
Sidang Umum MPR 1999	14-21 Oktober 1999	Perubahan Pertama UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2000	7-18 Agustus 2000	Perubahan Kedua UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2001	1-9 November 2001	Perubahan Ketiga UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2002	1-11 Agustus 2002	Perubahan Keempat UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Pasal II Aturan Tambahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Tentang sistem pemerintahan negara republik Indonesia dapat dilihat di dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1) Negara Indonesia adalah negara Hukum.

Tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3). Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab IX yang berjumlah 5 pasal dan 16 ayat. (Bandingkan dengan UUD 1945 sebelum perubahan yang hanya 2 pasal dengan 2 ayat). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

2) Sistem Konstitusional

Sistem Konstitusional pada era reformasi (sesudah amandemen UUD 1945) berdasarkan *Check and Balances*. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem "*check and balances*", yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing. Atas dasar semangat itulah perubahan pasal 1 ayat 2, UUD 1945 dilakukan, yaitu perubahan dari "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR", menjadi "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan berdasar undang-undang dasar yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam undang-undang dasar. Oleh

karena itu kedaulatan rakyat, dilaksanakan oleh MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur oleh UUD. Bahkan rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya melalui pemilihan umum.

Pada era reformasi diadakan tata urutan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak dua kali, yaitu Menurut TAP MPR III Tahun 2000: 1) UUD 1945; 2) TAP MPR; 3) UU; 4) PERPU; 5) PP; 6) Keputusan Presiden; dan 7) Peraturan Daerah. Sedangkan Menurut UU No. 10 Tahun 2004: 1) UUD 1945; 2) UU/PERPU; 3) Peraturan Pemerintah; 4) Peraturan Presiden; dan 5) Peraturan Daerah

### 3) Sistem Pemerintahan

Sistem ini tetap dalam frame sistem pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem presidensial itu, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetap bertanggung kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang- Undang Dasar.

### 4) Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut: 1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3) Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD; dan 4) Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pada awal reformasi Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR (Pada Pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri untuk masa jabatan lima tahun. Tetapi, sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 (2001) presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara (Presiden) dari Pasal 4 s.d. 16, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 s.d. 22B), maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial.

6) Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden yang pembentukan, perubahan dan pembubarannya diatur dalam undang-undang (Pasal 17).

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR, selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20 A ayat 2 dan 3).

8) Sistem Kepartaian  
Sistem kepartaian di era Reformasi menggunakan sistem multipartai atau banyak partai.

Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era Orde Baru. Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (Electoral Threshold) Pemerintahan Sejak 1999-2014.

#### **b. Pemerintahan BJ Habibie sampai Pemerintahan Joko Widodo**

Dalam modul ini, materi tentang sistem pemerintahan reformasi dari masa Habibie sampai pemerintahan Joko Widodo tidak dikupas secara panjang lebar. Hal ini disebabkan materi tersebut termasuk sejarah kontemporer dimana para pembaca modul telah mengalami era pemerintahan mereka masing masing, sehingga merasakan dan mengalami sendiri. Untuk itu, pembaca perlu secara kreatif mencari literatur dan referensi dari masa pemerintahan B.J. Habibie yang diawali dengan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 diikuti dengan pelantikan B.J.

Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya pemerintahan Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001). Di masa kepemimpinannya yang singkat, Gus Dur berhasil melakukan beberapa langkah strategis. Terdapat beberapa catatan tentang pemulihan perekonomian pada masa Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Satu capaian penting dalam hal sosial budaya ditorekhan oleh Abdurrahman Wahid. Ia dikenal sebagai sosok yang mendorong pluralisme dan keterbukaan.

Megawati Soekarnoputri yang memerintah tahun 2001- adalah presiden wanita pertama Indonesia. Dalam pembangunan stabilitas makro ekonomi, pemerintahan Megawati dinilai cukup berhasil. Hal ini disebabkan kebijakan pengembangan kelembagaan, independensi Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan moneter, serta penataan ulang Kementerian Keuangan.

Selanjutnya masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, sebagai pengganti Megawati. Presiden tersebut yang sering dipanggil SBY memimpin dalam dua periode pemerintahan, yakni tahun 2004-2009, dan 2009-2014. Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama Wakil Presiden Boediono.

Selanjutnya, pemerintahan SBY digantikan oleh Joko Widodo (dikenal dengan Bapak Jokowi) yang periode pertama pemerintahannya berpasangan dengan wakilnya Jusuf Kalla (2014-2019). Selanjutnya periode kedua pemerintahannya saat ini, Joko Widodo berpasangan dengan Ma'ruf Amin yang sebelumnya menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia.

Pembaca modul diharapkan secara aktif dan kreatif dapat menemukan referensi terkait program kerja, permasalahan politik, ekonomi, keamanan, hukum, politik luar negeri, peran Indonesia dalam percaturan dunia dan hal-hal yang menonjol lainnya dari masa pemerintahan reformasi tersebut. Sebagai bagian dari Sejarah Kontemporer atau sejarah kekinian, tentunya para pembaca modul lebih mudah mendapatkannya sumber sumber ilmiah mengenai hal yang dimaksud.

## **D. Rangkuman**

Pemerintahan Orde Baru lahir sejak berakhirnya pemerintahan Sukarno. Orde Baru lahir sebagai dampak konflik sosial politik di pemerintahan Sukarno, yang puncaknya dalam peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965.

Pemerintahan ini dibangun dengan kekuatan militer , didukung dengan birokrat yang dipimpin oleh Soeharto. Pemerintahan ini mempunyai karakteristik tersendiri yakni cenderung semi-otoriter. Kehidupan politik relatif stabil dikarenakan menggunakan kekuatan keamanan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan keamanan. Meski demikian, dalam bidang perkembangan ekonomi pemerintahan ini dianggap berhasil meski akhirnya tumbang oleh sistem yang telah dibangunnya.

Tumbangnya Orde Baru melahirkan pemerintahan demokratis dengan presidennya adalah B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudoyono, dan Joko Widodo.

## Penutup

Modul belajar mandiri yang telah dikembangkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi Anda dalam mengembangkan dan *me-refresh* pengetahuan dan keletampilan. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan modul belajar mandiri sebagai salah satu bahan belajar mandiri untuk menghadapi seleksi Guru P3K.

Anda perlu memahami substansi materi dalam modul dengan baik. Oleh karena itu, modul perlu dipelajari dan dikaji lebih lanjut bersama rekan sejawat baik dalam komunitas pembelajaran secara daring maupun komunitas praktisi (Gugus, KKG, MGMP) masing-masing. Kajian semua substansi materi yang disajikan perlu dilakukan, sehingga Anda mendapatkan gambaran teknis mengenai rincian materi substansi. Selain itu, Anda juga diharapkan dapat mengantisipasi kesulitan-kesulitan dalam materi substansi yang mungkin akan dihadapi saat proses seleksi Guru P3K.

Pembelajaran-pembelajaran yang disajikan dalam setiap modul merupakan gambaran substansi materi yang digunakan mencapai masing-masing kompetensi Guru sesuai dengan indikator yang dikembangkan oleh tim penulis/kurator. Selanjutnya Anda perlu mencari bahan belajar lainnya untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang studinya masing-masing, sehingga memberikan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif. Selain itu, Anda masih perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan Anda dengan cara mencoba menjawab latihan-latihan soal tes yang disajikan dalam setiap pembelajaran pada portal komunitas pembelajaran.

Dalam melaksanakan kegiatan belajar mandiri Anda dapat menyesuaikan waktu dan tempat sesuai dengan lingkungan masing-masing (sesuai kondisi demografi). Harapan dari penulis/kurator, Anda dapat mempelajari substansi materi bidang studi pada setiap pembelajaran yang disajikan dalam modul untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga siap melaksanakan seleksi Guru P3K.

Selama mengimplementasikan modul ini perlu terus dilakukan refleksi, evaluasi, keberhasilan serta permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan

dapat langsung didiskusikan dengan rekan sejawat dalam komunitas pembelajarannya masing-masing agar segera menemukan solusinya.

Capaian yang diharapkan dari penggunaan modul ini adalah terselenggaranya pembelajaran bidang studi yang optimal sehingga berdampak langsung terhadap hasil capaian seleksi Guru P3K.

Kami menyadari bahwa modul yang dikembangkan masih jauh dari kesempurnaan. Saran, masukan, dan usulan penyempurnaan dapat disampaikan kepada tim penulis/kurator melalui surat elektronik (e-mail) sangat kami harapkan dalam upaya perbaikan dan pengembangan modul-modul lainnya.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historio-grafi. Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Abdullah, Taufik A. L. (2012). *Indonesia Dalam Arus Sejarah*. Jakarta: PT Ichtisar Baru Van hoeve
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logis Wacana Ilmu.
- Bahar, Saafoedin. 1991. *Perjuangan Menuju Persatuan dan Kesatuan Bangsa* Semarang: PT. Mandira Jaya Abadi
- Benda, Harry J. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia Pada MasaPendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Berg, H.J. Van Den dan Baganding Tua S. 1958. *Prasedjarah dan Pembagian Sedjarah Eropah*.Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Boechari. 1968. *Sri Maharaja Mapanji Garasakan*. Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia IV (1-2) : 1-26.
- Daljoeni, N. 1984. *Geografi Kesejarahan II (Indonesia)*. Bandung:Penerbit Alumni.
- Frederick, William H. dan Soeri Soeroto. 1982. *Pemahaman Sejarah Indonesia. Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Gazalba, Sidi. 1981. *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu*. Jakarta: Bhratara.
- Gottschalk, Louis. 1983. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas indonesia.
- Haekal, Muhammad Husain. 2002. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- HAMKA. 1981. *Sejarah Umat Islam IV*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harun, Yahya. 1995. *Sejarah Masuknya Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Hannigan, Tim. 2015. *The Brief History of Indonesia*. Singapore: Tuttle. Hatta, Moh.. 1979. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tinta Mas.
- Haviland, William a. 1985. *Antropologi jilid 2*. Edisi keempat (terjemahan oleh R.G. Soekadijo). Jakarta: Erlangga.
- Heekeren, H.R. Van. 1972. *Prehistoric Life In Indonesia*. Djakarta: Soeroengan.

- Kahin, George MT. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu
- Kahin, G. McYurnan. 1955. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan bekerjasama dengan UNS Press.
- Kartodirdjo, Sartono, Poesponegoro MD, Notosusanto, N. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Depdiknas.
- Kartodirdjo, Sartono. 1985. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartasasmita, Ginandjar dkk. 1995. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Sekretariat Negara
- Koentjaraningrat. 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kuntowijoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kurasawa, Aiko. 1993. *Mobilisasi dan Kontrol Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945*. Jakarta: Gramedia
- Lucas, Anton. 1989. *Peristiwa Tiga Daerah, Revolusi dalam Revolusi*. Jakarta: Grafiti
- Lombard, D. 2003. *Nusa Jawa: Silang Budaya 3 jilid. Buku ke III: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhaimin, Yahya, A. 2002. *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Munoz, P.M. 2009. *Kerajaan-kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Prasejarah-Abad XVI)*. Yogyakarta: Mitra Abadi.
- Moedjanto, G. 1992. *Indonesia Abad Ke-20 Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggajati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Norma-norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Oktorino, Nino. 2013. *Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Poerbatjaraka, R.M. Ng. 1952. *Riwayat Indonesia I*. Jakarta: Pembangunan.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Ed.). 2009. *Sejarah Nasional Indonesia I; Zaman Prasejarah di Indonesia (Edisi Pemutakhiran)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poespoprodjo, W. 1987. *Subjektivitas Dalam Historiografi*. Bandung: Remaja Karya.
- Prasetyo, Bagyo dkk. 2004. *Religi pada Masyarakat Prasejarah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Pringgodigdo, AG. 1952. *Tatanegara di Djawa Pada Waktu Pendudukan Djepang Pada Bulan Maret Sam*
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Noegroho Notosusanto. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto (ed). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka
- Pujianti, Selvi M. 2011. *Perundingan Roem-Royen Versi I*, diunduh pada tanggal 27 Novbeemr 2014.
- Reid, Anthony. 1987. *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Ricklefs, M.C. 1981. *A History Of Modern Indonesia*. Terj. Drs. Dharmono Hardjowidjono. 1992. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Ricklefs, MC. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rose, Mavis. 1987. *Indonesia Merdeka. Biografi Politik Mohammad Hatta*. Terj. Hermawan Sulistyio. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Renier, G.J. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, Priyo Budi. 1993. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhartono.2001. *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Jakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 2010. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadi Pustaka Semesta

- Sumarmo, Iwa. 1985. *Indonesia Merdeka atau Mati: Sejarah Pasukan Pelajar IMAM selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Keluarga Besar Imam
- Supriatna, Nana. 2002. *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*. Bandung: Grafindo Media Pratama
- Sedyawati, Edi (Ed.). 2001. *Prasejarah Indonesia dalam Konteks Asia Tenggara di Sekitar Holosen Awal Data Baru dalam Penelitian Dasawarsa Terakhir dalam Arung Samudera; Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lopian*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Lembaga Universitas Indonesia.
- Sjamdulhuda. 1987. *Penyebaran dan Perkembangan Islam-Katolik-Protestan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sjamsuddin, Helius. 1996. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soejono, R. P. 1976. *Tinjauan Tentang Pengkerangkaan Prasejarah Indonesia*. Jakarta: Proyek Pelita Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional.
- Soekmono, R. 1985. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekmono, R. 1985. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekmono. 1973. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia; Volume 1*. Jakarta: Yayasan Kanisius.
- Soemadio, B. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia jilid II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka.
- Sutrasno. 1975. *Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soebagijo I.N. 1981. *Sudiro Pejuang Tanpa Henti*. Jakarta. PT. Gunung Agung
- Tjandrasasmita, Uka. 2000. *Penelitian Arkeologi Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*. Kudus: Menara Kudus.
- Tohir, M. 1981. *Sejarah Islam dari Andalus sampai Indus*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Wahyudi, D.Y. 1997. *Pemujaan Dewi Śrī pada Masyarakat Jawa Kuna (X-XVIM) dan Tradisinya*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: IKIP Malang.
- Wahyudi, D.Y. 2005. *Rekonstruksi Keagamaan Candi Panataran pada Masa Mapahit*. Tesis tidak diterbitkan. Depok: Universitas Indonesia.
- Watt, M. 1988. *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: P3M.

- Widja, I.G. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah. Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.
- Widja, I.G. 2002. *Menuju Wajah Baru Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Widiarto, Aan Eko, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro. 2007. *Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: In-Trans Publishing.
- Wirawan, Anak Agung Bagus. 2012. *Pusaran Revolusi Indonesia di Sunda Kecil 1945-1950*. Denpasar: Udayana University Press
- Yuanshi, Kong. 2005. *Muslim Tionghoa Cheng Ho, Misteri Perjalanan Muhibah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Zed, Mestika. 2002. Beberapa Catatan Tentang Epistemology Sejarah. Dalam Sunaryo Purwo Sumitro. *Dari Samudera Pasai ke Yogyakarta. Persembahan Kepada Teuku Ibrahim Alfian*. Jakarta: MSI dan Sinergi Press.
- Zuhdi, Susanto (Peny). 1997. *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutera*. Jakarta: Depdiknas.

## **Lampiran**

# Modul Belajar Mandiri

---

## CALON GURU

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

